



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

AGUSTUS 2026





Laporan Perekonomian **PROVINSI BALI**



AGUSTUS **2026**

*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kelompok Perumusan Provinsi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali*



KPwBali-KPKP@bi.go.id

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju."

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang Rupiah dan keandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

...Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan disusun sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan informasi dan analisis terkini mengenai perkembangan ekonomi, sistem keuangan, serta sistem pembayaran di Provinsi Bali bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bank Indonesia memandang bahwa perekonomian di daerah, utamanya Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, perkembangan perekonomian Bali sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, serta aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara, serta dinamika sektor selain pariwisata yang memiliki daya ungkit tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh tinggi dan berkelanjutan.

Laporan Perekonomian Provinsi Bali memuat berbagai informasi mengenai perkembangan indikator utama perekonomian daerah, di antaranya sektor riil, sektor keuangan, serta dinamika stabilitas sektor keuangan, inflasi, maupun sistem pembayaran. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan serta mengambil langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Kami turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi, di antaranya Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, maupun pihak terkait lainnya. Kolaborasi dan sinergi sangat penting dalam penyusunan laporan ini secara komprehensif. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini. Semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi berbagai pihak dalam mendukung penguatan perekonomian daerah maupun nasional.

Denpasar, September 2026

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Achris Sarwani
Direktur



DAFTAR ISI

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 1

1.1.	KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN II 2026	2
1.2.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN	3
1.2.1.	KONSUMSI	3
1.2.2.	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5
1.2.3.	EKSPOR DAN IMPOR	6
1.3.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA	7
1.3.1.	PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	8
1.3.2.	PERDAGANGAN	8
1.3.3.	TRANSPORTASI	9
1.3.4.	KONSTRUKSI	10
1.3.5.	PERTANIAN	11

BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 19

2.1.	PERKEMBANGAN INFLASI	20
2.2.	INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	21
2.3.	INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	26
2.4.	KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	29
2.5.	TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2026	30

BAB III STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 39

3.1.	KINERJA PERBANKAN	40
3.1.1.	DANA PIHAK KETIGA	41
3.1.2.	PENYALURAN KREDIT	43
3.1.3.	LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)	45
3.2.	KINERJA KEUANGAN KORPORASI	45
3.2.1.	POTENSI RISIKO KORPORASI	45
3.2.2.	KONDISI PERKEMBANGAN KORPORASI	46
3.2.3.	PENYALURAN KREDIT KORPORASI	47
3.3.	KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA	48
3.3.1.	POTENSI RISIKO RUMAH TANGGA	48
3.3.2.	PERKEMBANGAN TINGKAT KEYAKINAN RUMAH TANGGA	48
3.3.3.	PENYALURAN KREDIT RUMAH TANGGA	49
3.3.3.1.	PENYALURAN KPR DAN KPA	50
3.3.3.2.	PENYALURAN KKB DAN KREDIT MULTIGUNA	51
3.4.	AKSES KEUANGAN DAN UMKM	51
3.4.1.	ASESMEN KREDIT UMKM	51
3.4.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM DAN EKONOMI SYARIAH	52

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

63

4.1.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI	64
4.2.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI	64
4.2.1.	SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA	64
4.2.2.	SISTEM PEMBAYARAN RETAIL	66
4.3.	PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI	69
4.4.	UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN	69
4.4.1.	SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	69
4.4.2.	SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI	70

BAB V KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

79

5.1.	KETENAGAKERJAAN	80
5.2.	KESEJAHTERAAN	83
5.2.1.	PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN	83
5.2.2.	KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN	84
5.2.3.	KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK	85
5.2.4.	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI	86
5.2.5.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	87

BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

93

6.1.	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL	94
6.1.1.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2026	94
6.1.2.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2026	95
6.2.	PRAKIRAAN DAN RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2026	96
6.2.1.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI	96
6.2.2.	RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI	98
6.2.3.	PRAKIRAAN INFLASI	99

BOKS

BOKS 1 MESIN PERTUMBUHAN BARU MENUJU EKONOMI BALI YANG LEBIH <i>RESILIENT</i>	12
BOKS 2 TANTANGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN KETAHANAN PANGAN BALINUSRA SERTA ARAH PENGUATAN GERAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PANGAN SEJAHTERA (GPIPS)	32
BOKS 3 BALI JAGADHITA VII 2026: PENGUATAN PERDAGANGAN, PARIWISATA, DAN INVESTASI UNTUK MENDUKUNG EKONOMI BALI YANG TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	58
BOKS 4 <i>QRIS CROSS BORDER</i> DAN PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL BALI	74
BOKS 5 <i>HIGH LEVEL MEETING</i> TPID PROVINSI BALI: PENGUATAN SINERGI PENGENDALIAN INFLASI DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA DAN PASOKAN DI BALI MENJELANG GALUNGAN-KUNINGAN TAHUN 2026	88



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Ekonomi Bali dan Nasional	2
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Triwulan II 2026	2
Grafik 1.3.	Perkembangan Konsumsi Listrik RT	4
Grafik 1.4.	Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali	4
Grafik 1.5.	Perkembangan Penyaluran Kredit RT di Provinsi Bali	4
Grafik 1.6.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	5
Grafik 1.7.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	5
Grafik 1.8.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali	5
Grafik 1.9.	Perkembangan Kredit Investasi Provinsi Bali	5
Grafik 1.10.	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	6
Grafik 1.11.	Perkembangan Penanaman Dalam Negeri (PMDN)	6
Grafik 1.12.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	6
Grafik 1.13.	Nilai Ekspor Barang Nonmigas Provinsi Bali	6
Grafik 1.14.	Perkembangan Nilai Impor Barang	7
Grafik 1.15.	Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi <i>Broad Economic Categories</i> (BEC)	7
Grafik 1.16.	Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali	8
Grafik 1.17.	Perkembangan Omzet Survei Penjualan Eceran Provinsi Bali	9
Grafik 1.18.	Perkembangan Kredit Perdagangan di Bali	9
Grafik 1.19.	Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Pesawat ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai	9
Grafik 1.20.	Perkembangan Jumlah Keberangkatan Kargo domestik Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai	10
Grafik 1.21.	Realisasi Pengadaan Semen di Bali	10
Grafik 1.22.	Perkembangan Kredit Konstruksi di Bali	10
Grafik 1.23.	Produksi Padi di Bali	11
Grafik 1.24.	Kredit Pertanian	11
Grafik 1.25.	Kredit Perikanan	11
Grafik B1.1.	Perkembangan Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali	13
Grafik 2.1.	Inflasi Provinsi Bali* (%yoy)	20
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali* (%yoy)	20
Grafik 2.3.	Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Bali*	21
Grafik 2.4.	Perkembangan Harga Bawang Merah (Rp/Kg)	21
Grafik 2.5.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)	21
Grafik 2.6.	Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; yoy)	21
Grafik 2.7.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)	22
Grafik 2.8.	Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%; yoy)	22
Grafik 2.9.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	22
Grafik 2.10.	Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; yoy)	22
Grafik 2.11.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	23
Grafik 2.12.	Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; yoy)	23
Grafik 2.13.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	23
Grafik 2.14.	Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; yoy)	23
Grafik 2.15.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di	

Provinsi Bali (%; avg-mtm)	24
Grafik 2.16. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; yoy)	24
Grafik 2.17. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	24
Grafik 2.18. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; yoy)	24
Grafik 2.19. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	25
Grafik 2.20. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; yoy)	25
Grafik 2.21. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	25
Grafik 2.22. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; yoy)	25
Grafik 2.23. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	26
Grafik 2.24. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; yoy)	26
Grafik 2.25. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga	31
Grafik 2.26. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen	31
Grafik B2.1. Perkembangan Inflasi Balinusra dan Nasional	33
Gambar B2.1.Dokumentasi Kegiatan GPIPS Balinusra 2026	37
Grafik 3.1. Perkembangan Aset Perbankan	40
Grafik 3.2. Perkembangan DPK Perbankan	41
Grafik 3.3. Pangsa Kepemilikan DPK	41
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan	41
Grafik 3.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan Saat Ini	41
Grafik 3.6. Perkembangan DPK Perseorangan dan Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik	41
Grafik 3.7. Perkembangan Posisi Surat Berharga Negara Berdasarkan Jenis dan Kepemilikan	42
Grafik 3.8. Total Nominal dan Pertumbuhan DPK Kabupaten/Kota	42
Grafik 3.9. Proporsi DPK Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata	42
Grafik 3.10. Perkembangan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan	43
Grafik 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Skala Likert Persediaan, dan Penjualan Domestik	43
Grafik 3.12. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali	43
Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Sektoral	44
Grafik 3.14. Perkembangan PDRB Provinsi Bali	44
Grafik 3.15. Perkembangan NPL Kredit	44
Grafik 3.16. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit	44
Grafik 3.17. Perkembangan LAR Kredit	44
Grafik 3.18. Total Nominal dan Pertumbuhan Kredit Kabupaten/Kota	45
Grafik 3.19. Proporsi Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata	45
Grafik 3.20. Perkembangan LDR	45
Grafik 3.21. Perkembangan Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik dan Penjualan Ekspor	46
Grafik 3.22. Kondisi Rentabilitas Korporasi	47
Grafik 3.23. Kondisi Likuiditas Korporasi	47
Grafik 3.24. Kondisi Akses Kredit Korporasi	47
Grafik 3.25. Perkembangan Kredit Korporasi	47
Grafik 3.26. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral	48
Grafik 3.27. Perkembangan NPL Kredit Korporasi	48
Grafik 3.28. Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Mei 2026	48
Grafik 3.29. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	48

Grafik 3.30. Perkembangan Kredit RT	49
Grafik 3.31. Perkembangan NPL Kredit RT	49
Grafik 3.35. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	52
Grafik 3.33. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	52
Grafik 3.34. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral	52
Grafik 3.1. Persebaran Pondok Pesantren Binaan KPwBI Provinsi Bali	55
Grafik 4.1. Aliran Uang Kartal di Provinsi Bali	64
Grafik 4.2. Perkembangan Nominal Transaksi BI- FAST	65
Grafik 4.3. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST	65
Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali	65
Grafik 4.5. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali	65
Grafik 4.6. Perkembangan Vol. Transaksi SKNBI Bali	66
Grafik 4.7. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali	66
Grafik 4.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/debit di Bali	66
Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Bali	66
Grafik 4.10. Volume Transaksi Kartu ATM/debit Berdasarkan Jenis Transaksi	67
Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi	67
Grafik 4.12. Perkembangan Nominal Transaksi UE Bali	67
Grafik 4.13. Perkembangan Transaksi UE di Bali	67
Grafik 4.14. Volume Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Jenis Transaksi	67
Grafik 4.17. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali	68
Grafik 4.18. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali	68
Grafik 4.15. Nominal Transaksi QRIS CB	68
Grafik 4.16. Volume Transaksi QRIS CB	68
Grafik 4.19. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali	69
Grafik 4.20. Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Triwulan 1 Tahun 2026 di Bali Berdasarkan Mata Uang	69
Grafik B3.1. Nominal Transaksi QRIS Cross Border Provinsi Bali	77
Grafik B3.1. Volume Transaksi QRIS Cross Border Provinsi Bali	77
Grafik 5.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	82
Grafik 5.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali	84
Grafik 5.3. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional	86
Grafik 5.4. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk	86
Grafik 5.5. Perkembangan NTP Bali dan Nasional	86
Grafik 5.6. Perkembangan NTP Bali	86
Grafik 5.7. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	87
Grafik 5.8. Perbandingan IPM Bali dengan Nasional	87
Grafik B5.1. Perkembangan Inflasi Bali dan Nasional, Mei–Juni 2026 (% yoy)	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (% <i>, yoy</i>)	3
Tabel 1.2.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II 2026 Sisi Lapangan Usaha (% <i>, yoy</i>)	8
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	26
Tabel 2.2.	Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	27
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Tabanan per Kelompok Pengeluaran	28
Tabel 2.4.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Badung per Kelompok Pengeluaran	28
Tabel 2.5.	Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Provinsi Bali Periode Semester I 2026	29
Tabel B2.1.	<i>Share</i> Volume Masuk terhadap Total Kebutuhan Pangan Balinusra Semester I 2026	34
Tabel B2.1.	<i>Matriks</i> Kesepakatan GPIPS Balinusra 2026	35
Tabel 3.1.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bali (Kedatangan Wisman Ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Paspor yang Dipegang)	46
Tabel 3.2.	Perkembangan Kredit KPR+KPA	50
Tabel 3.3.	Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA	50
Tabel 3.4.	Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna	51
Tabel 3.5.	Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna	51
Tabel 5.1.	Tabel Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali	80
Tabel 5.2.	Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribuan Orang)	81
Tabel 5.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan	81
Tabel 5.4.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan	82
Tabel 5.5.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)	83
Tabel 5.6.	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2021 – 2026	84
Tabel 5.7.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	85
Tabel B5.1.	Tantangan Pengendalian Inflasi dan Respons TPID Bali	90
Tabel 6.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	95

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh kuat sebesar 5,78% (yoy), di tengah gejolak geopolitik global. Capaian ini meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya (5,58%; yoy) dan berada di atas nasional (5,29%; yoy).

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 sebesar 3,27% (yoy) dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2026

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh kuat sebesar 5,78% (yoy), di tengah gejolak geopolitik global. Capaian ini meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya (5,58%; yoy) dan berada di atas nasional (5,29%; yoy). Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II bersumber dari LU Konstruksi utamanya didorong proyek konstruksi pemerintah dan masih tingginya proyek swasta. LU Pertanian turut berkontribusi terhadap ekonomi Bali didukung oleh peningkatan produksi hortikultura tahunan (jeruk, alpukat, manggis), peternakan (daging ayam ras dan telur), perikanan, dan padi. Sementara itu, LU Akmamin tercatat tumbuh melambat imbas konflik Timur Tengah, yang berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontraksi sebesar -5,17% (yoy). Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh solidnya Konsumsi Rumah Tangga (RT), meningkatnya investasi dan tetap tingginya Konsumsi Pemerintah.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 sebesar 3,27% (yoy), meningkat dari triwulan I 2026 (2,81%; yoy), namun masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi seiring konflik geopolitik di Timur Tengah. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau dan Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Kota Denpasar mengalami inflasi tertinggi diikuti Kabupaten Tabanan dan Singaraja. Sementara itu Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.

Selanjutnya, Inflasi Bali pada triwulan III 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni (i) masuknya musim kemarau panjang dengan kondisi El Nino hingga akhir triwulan III 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah tanaman pangan, dan (ii) meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang peak season pariwisata. Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh berkurangnya dampak mulai meredanya tekanan konflik timur tengah dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tetap kuat dan terjaga. Hal tersebut tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan kondisi tersebut, masih tersedia ruang yang cukup luas untuk mendorong penyaluran kredit di tengah risiko kredit yang relatif rendah, khususnya dalam rangka diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan penyaluran jenis kredit, peningkatan pertumbuhan kredit utamanya didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan peningkatan aktivitas usaha dan ekspansi kapasitas produksi, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini juga mengindikasikan peningkatan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi.

Selanjutnya, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan di Bali pada triwulan II 2026 tetap terjaga. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 41,69%. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen perbankan yang masih kuat dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 6,11% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kinerja positif kredit UMKM pada LU akmamin, Industri Pengolahan, dan Pertanian. Di sisi lain, kredit UMKM pada LU Perdagangan masih mengalami kontraksi sehingga menahan pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan.

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net outflow sebesar Rp0,90 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatat net inflow sebesar Rp1,76 triliun. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal masyarakat seiring penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata serta momentum libur pada triwulan II 2026. Kondisi ini juga sejalan dengan pola siklikal aliran uang kartal di Bali yang pada triwulan II cenderung mengalami net outflow seiring peningkatan kebutuhan transaksi masyarakat.

Kemudian, velositas pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Pada layanan BI-FAST, pertumbuhan nominal dan volume transaksi terus tumbuh menjadikan

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tetap terjaga dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Ke depan, optimalisasi pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

Velositas sistem pembayaran Provinsi Bali terus tumbuh pada triwulan II 2026.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan level yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan II 2026.

BI-Fast sebagai salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Sementara itu, transaksi pada SKNBI dan BI-RTGS mengalami perbaikan. Peningkatan velositas transaksi juga tercermin dari peningkatan transaksi kartu kredit, Uang Elektronik (UE), dan QRIS seiring meningkatnya adopsi digital di masyarakat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten memperkuat perannya dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, baik berbasis tunai maupun digital, guna menunjang aktivitas perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dorongan terhadap peningkatan penggunaan transaksi nontunai terus diakselerasi melalui kerja sama erat dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Inisiatif ini melibatkan institusi keuangan, kalangan pendidikan, generasi muda, serta masyarakat luas, dengan harapan dapat menciptakan proses transaksi yang lebih praktis dan aman, sekaligus memperluas akses keuangan serta membangun ekosistem pembayaran yang semakin modern dan inklusif di Bali.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, mendukung capaian pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan II 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan penyerapan tenaga kerja terbesar secara pangsa sektoral terjadi pada LU Pertanian, Perdagangan, dan Akomodasi dan Makan Minum.

Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan kondisi nasional, tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada ketimpangan dan intensitas kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat Bali terus membaik.

Dengan perkembangan ini, Bali terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja pada berbagai LU utama, dan stabilitas inflasi yang terjaga.

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global, yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional pada rentang 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diperkirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diperkirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multitalah, meningkatnya proyek infrastruktur pemerintah, dan dimulainya proyek strategis nasional yakni konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambangan. Kinerja LU terkait pariwisata diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan kendati sedikit termoderasi akibat gejolak geopolitik global.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% di tengah Konflik Timur Tengah yang menyebabkan gejolak harga minyak dunia khususnya avtur global. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan kinerja sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya tahan, serta inflasi yang tetap terkendali, ekonomi Bali mampu berdaya tahan di tengah gejolak global.

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy).

Lebih lanjut, tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.

TABEL INDIKATOR

PERTUMBUHAN EKONOMI (% , yoy)

Indikator		2024				2024	2025				2025	2026		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)														
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	5.97	5.36	5.44	5.19	2.51	5.59	5.95	5.88	5.86	5.82	5.58	5.78	
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.64	3.92	3.00	0.61	1.36	5.17	-0.30	1.97	0.25	1.70	2.06	6.35	
	Pertambangan dan Penggalian	0.50	1.53	2.42	0.95	5.19	0.81	1.26	0.12	0.66	0.71	3.01	2.35	
	Industri Pengolahan	-0.14	1.23	11.00	9.37	11.78	-0.06	3.28	4.72	7.71	3.94	8.94	8.28	
	Pengadaan Listrik dan Gas	11.46	11.34	15.23	9.50	1.25	8.59	1.97	5.12	3.93	4.88	0.22	15.98	
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.65	0.17	-3.92	4.57	1.82	3.83	3.81	1.55	0.97	2.51	4.13	4.76	
	Konstruksi	1.64	1.31	0.02	4.24	3.95	3.09	6.28	4.12	2.84	4.06	5.03	8.4	
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.32	3.75	2.67	5.01	5.99	5.38	8.43	6.83	5.97	6.65	7.25	8.22	
	Transportasi dan Pergudangan	7.33	6.74	3.82	6.30	11.90	6.78	7.30	6.26	5.53	6.46	5.56	-0.64	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.98	12.66	12.04	10.14	1.91	7.21	13.76	10.94	8.90	10.25	6.52	3.68	
	Informasi dan Komunikasi	1.21	1.40	2.51	2.50	15.06	2.67	4.22	5.64	5.99	4.65	3.98	3.89	
	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.64	19.34	16.09	5.85	1.73	6.65	0.32	-5.09	6.70	1.98	-5.01	1.89	
	Real Estate	0.41	2.16	1.84	2.42	6.64	1.98	4.28	2.61	1.82	2.67	3.85	3.36	
	Jasa Perusahaan	5.77	6.37	6.92	7.43	7.29	5.94	7.89	9.74	7.61	7.84	4.95	4.76	
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.60	2.97	3.75	6.61	1.40	20.26	3.62	9.37	12.14	10.99	16.67	14.31	
	Jasa Pendidikan	2.52	0.94	1.21	1.04	2.36	5.63	3.47	9.39	7.89	6.55	7.7	7.28	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.60	1.97	2.24	2.66	6.16	4.71	4.61	6.97	8.51	6.21	6.98	4.98	
	Jasa lainnya	5.42	5.76	5.82	7.55	2.51	5.20	7.27	7.90	5.10	6.38	4.86	7.74	
	B.	Berdasarkan Pengeluaran:	5.92	5.43	5.45	5.19	5.49	5.59	5.95	5.88	5.86	5.82	5.58	5.78
1. Pengeluaran Konsumsi		7.52	3.96	5.70	4.82	5.44	5.21	3.40	4.86	6.33	4.97	6.96	7.01	
1 a. Konsumsi Rumah Tangga		4.33	4.09	5.46	4.73	4.65	5.31	5.54	5.20	5.85	5.47	5.02	5.48	
1 b. Konsumsi LNPR		80.93	10.67	14.53	10.44	27.04	-19.04	9.75	8.90	-6.99	-3.97	6.40	12.93	
1 c. Konsumsi Pemerintah		19.68	2.41	5.66	4.36	6.37	13.47	-8.37	2.29	10.73	3.90	20.28	14.9	
2. Investasi		8.58	9.12	0.44	4.74	5.54	3.57	6.55	7.54	5.95	6.13	7.77	9.98	
2 a. PMTB		8.23	8.55	1.92	4.19	5.56	5.13	6.61	6.12	5.47	6.03	6.78	9.81	
2 b. Perubahan Inventori		56.62	103.21	-267.28	-55.10	-4.53	-143.22	1.07	-148.33	-116.04	60.29	-197.83	25.80	
3. Neraca Perdagangan Bersih														
3 a. Ekspor Luar Negeri		24.39	17.47	9.14	15.67	16.00	6.55	13.47	7.54	5.43	8.21	2.84	2.23	
C.	Ekspor													
	Nilai Ekspor Barang Nonmigas (USD Juta)	163.15	150.57	155.22	150.19	619.12	154.36	124.51	126.56	151.11	556.55	138.98	139.86	
	Nilai Ekspor Barang Nonmigas (% , yoy)	-27.58	9.02	16.53	-2.30	-4.79	-5.39	-17.31	-18.46	0.61	-40.54	-9.97	12.33	
	D.	Impor												
		Nilai Impor Barang Nonmigas (USD Juta)	40.54	37.48	37.51	46.20	161.73	31.49	33.21	50.18	44.25	159.13	34.68	36.38
		Nilai Impor Barang Nonmigas (% , yoy)	52.61	21.69	19.77	54.38	36.36	-22.33	-11.38	33.77	-4.21	-4.15	10.14	9.53
	E.	Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	3.67	2.71	2.67	2.35	2.35	1.89	2.94	2.51	2.91	2.91	2.81	3.27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp miliar)

Indikator		2024				2024	2025				2025	2026	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Ekonomi Makro Regional (Atas Dasar Harga Berlaku)													
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)													
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	69.613	74.756	75.722	78.348	298.440	75.494	81.371	82.235	85.048	324.149	82.208	89.268
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.365	10.118	10.002	10.585	40.070	10.277	10.528	10.647	11.077	42.529	10.934	11.474
	Pertambangan dan Penggalian	610	631	653	656	2.550	633	661	680	678	2.652	672	706
	Industri Pengolahan	4.536	4.637	4.714	4.778	18.665	4.700	4.984	5.117	5.384	20.185	5.337	5.679
	Pengadaan Listrik dan Gas	177	177	173	191	717	191	182	184	203	761	197	215
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	111	112	116	119	459	119	120	121	124	483	128	130
	Konstruksi	6.508	6.708	6.958	7.389	27.563	6.842	7.262	7.386	7.763	29.253	7.421	8.434
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.046	6.300	6.513	7.034	25.893	6.534	7.046	7.188	7.683	28.451	7.235	7.838
	Transportasi dan Pergudangan	7.187	7.654	8.027	7.755	30.623	7.663	8.288	8.619	8.486	33.056	8.661	9.115
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.357	15.812	16.675	17.022	63.866	15.974	18.489	18.942	18.795	72.200	17.236	19.560
	Informasi dan Komunikasi	3.919	3.972	4.076	4.134	16.101	4.061	4.164	4.297	4.385	16.908	4.237	4.391
	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.753	3.927	4.065	3.711	15.455	4.088	4.020	3.937	4.060	16.105	3.985	4.275
	Real Estate	2.682	2.837	2.903	3.028	11.449	2.808	3.063	3.075	3.166	12.113	3.004	3.241
	Jasa Perusahaan	796	866	881	902	3.445	863	962	996	999	3.820	935	1.036
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.293	4.065	3.479	4.118	14.956	4.007	4.237	3.813	4.609	16.666	4.764	4.982
	Jasa Pendidikan	3.350	3.766	3.421	3.707	14.244	3.600	3.938	3.857	4.114	15.509	4.057	4.450
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.700	1.837	1.727	1.821	7.086	1.819	1.955	1.891	2.018	7.683	1.995	2.116
	Jasa lainnya	1.223	1.337	1.340	1.397	5.297	1.314	1.472	1.485	1.505	5.776	1.412	1.624
B.	Berdasarkan Pengeluaran:	69.613	74.756	75.722	78.348	298.453	75.494	81.371	82.235	85.048	324.149	82.208	89.268
	1. Pengeluaran Konsumsi	45.089	48.178	48.160	51.477	192.903	48.469	50.394	51.838	56.162	207.406	53.137	56.075
	1. a. Konsumsi Rumah Tangga	38.369	38.984	39.508	40.386	157.247	41.323	42.136	42.814	43.955	170.228	44.521	45.656
	1. b. Konsumsi LNPRT	1.786	1.162	1.228	1.541	5.717	1.473	1.300	1.374	1.471	5.618	1.615	1.516
	1. c. Konsumsi Pemerintah	4.934	8.032	7.424	9.550	29.939	5.677	7.499	7.650	10.735	31.560	7.000	8.903
	2. Investasi	19.404	20.610	20.876	22.322	83.212	20.440	22.253	22.776	24.118	89.715	23.145	25.640
	2. a. PMTB	19.136	20.313	21.112	22.435	83.018	20.684	21.951	22.655	24.089	89.380	23.021	25.243
	2. b. Perubahan Inventori	258	291	(244)	(113)	193	-115	302	121	29	336	124	398
	3. Neraca Perdagangan Bersih	5.130	5.974	6.695	4.549	22.348	6.453	8.184	7.621	4.768	27.027	5.926	7.552
	3. a. Total Ekspor	37.939	41.598	46.219	45.402	171.158	42.036	49.781	49.849	48.378	190.043	44.707	51.921
	3. b. Total Impor	32.809	35.624	39.524	40.853	148.810	35.582	41.596	42.228	43.610	163.016	38.781	44.595

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (Rp miliar)

Indikator		2024				2024	2025				2025	2026	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Ekonomi Makro Regional (Atas Dasar Harga Konstan)													
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)													
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	39.719	42.236	42.413	43.831	168.199	41.938	44.748	44.906	46.401	177.993	44.276	47.336
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.117	5.474	5.348	5.647	21.587	356	370	378	374	21.954	5.492	5.804
	Pertambangan dan Penggalian	353	365	377	372	1.467	356	370	378	374	1.478	367	378
	Industri Pengolahan	2.708	2.754	2.773	2.787	11.022	2.706	2.845	2.904	3.002	11.457	2.948	3.080
	Pengadaan Listrik dan Gas	98	98	96	105	396	106	100	101	110	416	106	116
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83	83	85	87	338	86	86	86	88	346	89	90
	Konstruksi	4.009	4.120	4.266	4.491	16.885	4.132	4.379	4.441	4.618	17.571	4.340	4.746
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.818	3.946	4.078	4.364	16.205	4.023	4.279	4.356	4.624	17.282	4.315	4.630
	Transportasi dan Pergudangan	2.540	2.689	2.781	2.707	10.718	2.712	2.885	2.956	2.857	11.410	2.863	2.867
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.270	7.900	8.256	8.341	31.767	7.794	8.987	9.160	9.084	35.024	8.302	9.318
	Informasi dan Komunikasi	3.210	3.242	3.298	3.354	13.104	3.296	3.379	3.484	3.555	13.714	3.427	3.510
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.157	2.236	2.305	2.106	8.804	2.300	2.244	2.187	2.247	8.978	2.185	2.286
	Real Estate	1.869	1.963	1.993	2.065	7.890	1.906	2.047	2.045	2.102	8.101	1.980	2.115
	Jasa Perusahaan	484	522	531	539	2.076	513	563	582	580	2.239	538	590
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.024	2.473	2.140	2.535	9.471	2.434	2.562	2.340	2.843	10.179	2.840	2.929
	Jasa Pendidikan	2.157	2.406	2.188	2.350	9.102	2.279	2.490	2.393	2.536	9.698	2.454	2.671
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.090	1.170	1.103	1.155	4.518	1.142	1.224	1.179	1.253	4.798	1.221	1.285
	Jasa lainnya	732	796	796	825	3.149	770	853	859	867	3.349	808	919
B.	Berdasarkan Pengeluaran:	39.719	42.236	42.413	43.831	168.199	41.937,95	44.748,20	44.905,64	46.401,16	177.993	44.276	47.336
	1. Pengeluaran Konsumsi	26.887	28.485	28.551	30.211	114.134	28.288	29.453	29.939	32.123	119.803	30.200	31.517
	1. a. Konsumsi Rumah Tangga	23.076	23.226	23.635	24.005	93.942	24.300	24.513	24.863	25.409	99.085	25.520	25.855
	1. b. Konsumsi LNPRT	1.041	671	710	886	3.308	843	737	773	824	3.176	896	832
	1. c. Konsumsi Pemerintah	2.770	4.588	4.206	5.319	16.884	3.146	4.204	4.302	5.890	17.542	3.783	4.830
	2. Investasi	11.720	12.332	12.452	13.298	49.801	12.214	13.139	13.412	14.089	52.853	13.150	14.450
	2. a. PMTB	11.597	12.194	12.566	13.350	49.708	12.267	13.000	13.357	14.080	52.704	13.098	14.276
	2. b. Perubahan Inventori	123	137	-114	-52	93	-53	139	55	8	149	52	174
	3. Neraca Perdagangan Bersih	1.113	1.419	1.410	322	4.264	1.436	2.156	1.554	190	5.337	929	1.368
	3. a. Total Ekspor	22.059	24.015	26.483	25.768	98.326	23.500	27.455	27.419	26.344	104.718	24.045	27.657
	3. b. Total Impor	20.946	22.596	25.074	25.446	94.062	22.064	25.298	25.865	26.154	99.381	23.187	26.289

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (% , yoy)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (%YOY)														
Jembrana (% , yoy)	6.11	5.69	6.05	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56	-4.98	-0.65	2.98	3.66	4.98	5.26
Tabanan (% , yoy)	6.12	6.45	6.53	6.19	6.14	5.37	5.71	5.58	-6.17	-1.97	2.94	3.56	4.94	5.45
Badung (% , yoy)	7.64	6.82	6.98	6.24	6.81	6.08	6.73	5.81	-16.55	-6.74	9.97	11.29	5.94	6.26
Gianyar (% , yoy)	7.08	6.82	6.80	6.30	6.31	5.46	6.01	5.62	-8.40	-1.07	4.04	5.06	5.47	5.89
Klungkung (% , yoy)	6.25	6.05	5.98	6.11	6.28	5.32	5.48	5.42	-6.38	-0.23	3.12	4.70	5.08	5.67
Bangli (% , yoy)	6.20	5.94	5.83	6.16	6.24	5.31	5.48	5.45	-4.10	-0.33	2.79	3.50	4.54	5.31
Karangasem (% , yoy)	5.93	6.16	6.01	6.00	5.92	5.06	5.44	5.50	-4.49	-0.56	2.58	3.10	4.33	5.25
Buleleng (% , yoy)	6.78	7.15	6.96	6.07	6.02	5.38	5.60	5.51	-5.80	-1.22	3.11	3.64	5.04	5.54
Denpasar (% , yoy)	7.51	6.96	7.00	6.14	6.51	6.05	6.42	5.82	-9.43	-0.91	5.02	5.69	5.55	6.11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp miliar)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU - RP MILIAR)														
Jembrana	6.973	7.770	9.020	10.198	11.168	12.116	13.137	14.137	13.439	13.510	14.532	15.612	16.845	18.236
Tabanan	11.470	12.967	15.066	16.996	18.630	20.377	22.128	23.796	22.258	22.010	23.681	25.530	27.649	29.983
Badung	27.201	31.790	37.273	42.429	47.208	52.344	57.791	62.836	49.014	44.804	55.290	68.397	75.098	81.663
Gianyar	13.605	15.368	17.909	20.140	22.113	24.224	26.460	28.520	25.865	25.836	27.944	30.529	33.046	36.116
Klungkung	4.398	4.900	5.676	6.426	7.112	7.785	8.459	9.100	8.451	8.529	9.210	10.080	11.015	12.003
Bangli	3.363	3.779	4.382	4.946	5.457	5.977	6.490	6.994	6.716	6.799	7.338	7.908	8.465	9.155
Karangasem	8.232	9.293	10.785	12.233	13.411	14.598	15.886	17.087	16.408	16.488	17.669	18.974	20.120	21.084
Buleleng	16.927	19.144	22.355	25.170	27.690	30.319	32.927	35.362	33.306	33.337	35.805	38.351	41.387	45.120
Denpasar	25.819	29.389	34.210	38.424	42.384	46.836	51.375	55.456	49.559	49.588	54.650	60.100	65.300	71.099

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (Rp miliar)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (ATAS DASAR HARGA KONSTAN - RP MILIAR)														
Jembrana	6.366	6.728	7.135	7.576	8.028	8.452	8.924	9.420	8.951	8.893	9.158	9.492	9.965	10.488
Tabanan	10.500	11.178	11.908	12.645	13.421	14.142	14.949	15.783	14.809	14.517	14.942	15.472	16.236	17.121
Badung	24.028	25.667	27.458	29.170	31.157	33.052	35.275	37.326	31.148	29.050	31.947	35.554	37.667	40.025
Gianyar	12.509	13.361	14.269	15.169	16.125	17.005	18.027	19.041	17.442	17.255	17.957	18.865	19.896	21.067
Klungkung	4.036	4.280	4.536	4.813	5.116	5.388	5.683	5.991	5.609	5.596	5.770	6.041	6.348	6.708
Bangli	3.097	3.281	3.472	3.686	3.916	4.124	4.350	4.587	4.399	4.385	4.507	4.665	4.876	5.135
Karangasem	7.538	8.002	8.483	8.992	9.524	10.006	10.550	11.130	10.630	10.571	10.843	11.179	11.663	12.275
Buleleng	15.480	16.587	17.742	18.819	19.951	21.024	22.201	23.425	22.066	21.798	22.463	23.281	24.453	25.807
Denpasar	23.397	25.026	26.779	28.423	30.273	32.105	34.166	36.154	32.745	32.447	34.083	36.004	38.001	40.322

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PANGSA PDRB KABUPATEN KOTA TERHADAP PROVINSI (%)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PANGSA EKONOMI KABUPATEN/KOTA TERHADAP EKONOMI BALI														
Jembrana (%)	5,91	5,78	5,76	5,76	5,72	5,65	5,60	5,58	5,97	6,12	5,90	5,69	5,64	5,62
Tabanan (%)	9,72	9,65	9,62	9,60	9,55	9,50	9,43	9,39	9,89	9,96	9,62	9,31	9,25	9,24
Badung (%)	23,05	23,65	23,79	23,98	24,19	24,39	24,63	24,81	21,78	20,28	22,46	24,93	25,12	25,17
Gianyar (%)	11,53	11,43	11,43	11,38	11,33	11,29	11,28	11,26	11,49	11,70	11,35	11,13	11,05	11,13
Klungkung (%)	3,73	3,65	3,62	3,63	3,64	3,63	3,61	3,59	3,76	3,86	3,74	3,67	3,68	3,70
Bangli (%)	2,85	2,81	2,80	2,79	2,80	2,79	2,77	2,76	2,98	3,08	2,98	2,88	2,83	2,82
Karangasem (%)	6,98	6,91	6,88	6,91	6,87	6,80	6,77	6,75	7,29	7,46	7,18	6,92	6,73	6,50
Buleleng (%)	14,35	14,24	14,27	14,22	14,19	14,13	14,03	13,96	14,80	15,09	14,55	13,98	13,85	13,91
Denpasar (%)	21,88	21,87	21,83	21,71	21,72	21,83	21,89	21,89	22,02	22,45	22,20	21,91	21,84	21,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit RT. Total (Rp Triliun)	33,27	33,08	33,55	34,28	34,55	35,08	36,07	37,22	37,76	38,58	39,83	40,82	41,13	41,69	42,22	42,89	42,82	42,96
Kredit RT. Total (% yoy)	-4,24	-3,03	-1,32	2,73	3,86	6,05	7,52	8,74	9,26	9,97	10,42	9,68	8,94	8,06	5,99	5,08	4,12	3,04
KPR (Rp Triliun)	10,92	10,19	10,75	10,55	10,61	10,84	11,63	11,86	10,54	12,09	12,30	12,52	12,62	12,67	12,77	12,82	12,67	12,66
RT. KPR < 21	0,63	0,44	0,43	0,43	0,53	0,73	0,7	0,68	0,31	0,58	0,56	0,54	0,53	0,52	0,5	0,50	0,47	0,48
RT. KPR 21 sd 70	6,13	6,18	6,21	6,34	6,51	6,33	6,53	6,66	5,64	6,83	6,94	7,04	7,11	7,11	7,17	7,20	7,11	7,01
RT. KPR >70	4,16	3,57	3,71	3,78	3,57	3,78	4,39	4,52	4,59	4,68	4,79	4,94	4,98	5,04	5,08	5,12	5,09	5,17
KPA (Rp Triliun)	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
RT. KPA sd 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RT. KPA sd 70	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
RT. KPA 70+	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03
K RT. Ruko (Rp Triliun)	0,41	0,41	0,39	0,35	0,34	0,32	0,36	0,34	1,81	0,47	0,46	0,45	0,48	0,48	0,51	0,52	0,52	0,48
KKB (Rp Triliun)	1,26	1,26	1,33	1,53	1,69	1,92	2,12	2,35	2,60	2,67	2,92	3,06	3,12	3,13	0,04	2,96	2,91	2,85
RT. KKB Roda 4	1,15	1,16	1,22	1,43	1,58	1,82	2,02	2,25	2,48	2,55	2,78	2,91	2,97	2,98	2,89	2,80	2,75	2,69
RT. KKB Roda 2	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0	0,11	0,11	0,12
RT. KKB Roda 6	0,01	0,01	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01	0,01
RT. KKB Lainnya	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0,04	0,03	0,03
RT. Multiguna (Rp Triliun)	18,13	18,48	18,50	18,62	18,59	18,48	18,19	18,15	18,32	18,54	18,99	19,14	19,09	19,39	19,7	20,04	20,14	20,26
NPL Kredit RT (Gross %)	1,75	1,67	1,63	1,47	1,52	1,56	1,47	1,33	1,30	1,40	1,36	1,32	1,46	1,55	1,42	1,31	1,28	1,55

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit Korporasi (Rp Triliun)	32,03	32,86	31,56	32,9	30,79	31,26	32,46	31,58	34,01	34,95	34,90	36,40	36,17	36,72	38,99	40,16	40,01	41,79
Kredit Korporasi (% yoy)	4,53	6,48	-0,94	5,43	-3,86	-4,89	2,87	-4,01	10,45	11,8	7,51	13,65	5,63	3,67	10,71	10,31	10,63	13,82
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,21	9,31	9,96	10,39	9,77	11,16	11,67	11,54	11,91	12,23	12,43	13,18	13,02	13,12	13,74	14,06	13,46	14,20
Modal Kerja (% yoy)	8	8,14	-6,04	17,41	6,12	19,87	17,12	11,06	21,9	9,58	6,50	12,79	7,76	4,78	8,83	6,72	3,39	8,25
Investasi (Rp Triliun)	22,79	23,52	21,57	21,86	21,01	20,07	20,19	20,33	22,20	22,88	22,57	23,20	23,12	23,57	25,22	26,07	26,53	27,56
Investasi (% yoy)	3,16	5,99	1,99	-1,99	-7,79	-14,64	-6,37	-6,99	7,80	13,96	11,78	14,14	4,43	3,02	11,74	12,35	14,72	16,93
NPL (Gross,%)	7,62	6,98	7,71	7,95	7,66	4,35	3,89	2,82	2,56	2,67	2,34	1,50	1,23	1,18	1,12	1,21	1,74	1,54

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Asset (Rp Triliun)	134,16	139,71	150,16	160,25	161,55	170,97	183,42	184,09	191,58	200,61	210,31	208,49	209,55	219,91	230,31	222,95	223,08	227,16
Total Asset (% yoy)	3,61	5,1	13,33	17,47	20,41	39,67	41,19	33,75	18,6	17,34	14,66	13,25	9,37	9,62	9,51	6,94	6,46	5,91
DPK (Rp Triliun) - DPK KCKCP	105,58	110,48	119,68	126,48	131,57	138,88	148,2	150,62	157,99	165,67	172,26	172,93	175,66	182,99	190,57	186,08	188,10	191,50
Giro (Rp Triliun)	16,35	17,59	20,39	21,03	22,65	23,41	27,27	25,38	28,68	29,7	33,20	30,27	28,93	31,88	35,08	33,50	33,26	34,99
Tabungan (Rp Triliun)	55,16	59	64,88	70,6	74,47	79,2	82,86	86,88	88,92	94,43	96,02	99,13	100,45	104,21	105,74	106,44	107,87	109,71
Deposito (Rp Triliun)	34,07	33,9	34,42	34,85	34,46	36,27	38,06	38,36	40,4	41,53	43,05	43,53	46,28	46,90	49,75	46,15	46,97	46,80
DPK (% yoy)	7,15	10,66	19,78	21,69	24,75	25,77	23,82	19,09	20,08	19,28	16,24	14,81	11,18	10,46	10,63	7,60	7,08	4,65
Giro%, yoy)	23,94	34,52	46,26	37,81	38,56	33,13	33,78	20,7	26,6	26,88	21,71	19,25	0,90	7,34	5,69	10,67	14,95	9,76
Tabungan(% yoy)	14,52	19,26	27,59	30,72	35,23	34,34	27,73	23,06	19,41	19,23	15,87	14,10	12,96	10,35	10,13	7,37	7,39	5,28
Deposito (% yoy)	-8,36	-9,11	-2,04	0,52	1,17	7,04	10,58	10,06	17,25	14,5	13,10	13,49	14,56	12,93	15,58	6,01	1,49	-0,22
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Pro	105,56	107,11	106,77	108,08	107,63	109,72	112,19	114,68	117,36	120,85	122,97	124,91	124,28	126,06	130,88	134,00	135,53	138,13
Modal Kerja	35	35,69	36,6	36,51	36,11	37,64	38,11	38,23	37,93	38,42	38,43	37,98	37,02	37,69	38,25	38,25	36,94	37,62
Investasi	37,24	38,28	36,56	37,29	36,91	36,95	37,96	39,19	41,63	43,8	44,66	46,07	46,09	46,63	50,38	52,82	55,72	57,31
Konsumsi	33,32	33,13	33,6	34,28	34,61	35,14	36,12	37,26	37,8	38,63	39,88	40,86	41,17	41,74	42,26	42,93	42,87	43,19
Q Umum (% yoy)	1,24	2,97	1,69	4,12	1,96	2,44	5,08	6,11	9,04	10,14	9,61	8,91	5,89	4,31	6,44	7,28	9,05	9,57
Modal Kerja (% yoy)	2,37	4,51	1,17	6,57	3,19	5,46	4,11	4,72	5,03	2,07	0,83	-0,67	-2,40	-1,91	-0,47	0,71	-0,19	-0,16
Investasi (% yoy)	5,44	7,24	5,07	3,26	-0,9	-3,49	3,82	5,09	12,79	18,55	17,66	17,55	10,71	6,46	12,79	14,66	20,89	22,91
Konsumsi (% yoy)	-4,15	-3,03	-1,22	2,55	3,87	6,04	7,5	8,68	9,22	9,94	10,41	9,66	8,92	8,06	5,97	5,08	4,11	3,47
Loan to Deposit Ratio (%)	80,56	77,62	72,27	69,17	81,80	79,00	75,70	76,14	74,28	72,95	71,39	72,23	70,75	68,89	68,68	72,01	72,05	72,13
NPL Gross (%)	4,18	4,07	4,14	4,03	3,83	2,49	2,36	1,91	1,88	1,94	1,80	1,38	1,38	1,42	1,31	1,19	1,38	1,39

Sumber: LBU, Bank Indonesia

DANA PERBANKAN BANK UMUM (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total DPK (Rp Triliun)	105,58	110,48	119,68	126,48	131,57	138,88	148,2	150,62	157,99	165,67	172,26	172,93	175,66	182,99	190,57	186,08	188,10	191,50
Giro (Rp Triliun)	16,35	17,59	20,39	21,03	22,65	23,41	27,27	25,38	28,68	29,70	33,20	30,27	28,93	31,88	35,08	33,50	33,26	34,99
Tabungan (Rp Triliun)	55,16	59,00	64,88	70,60	74,47	79,20	82,86	86,88	88,92	94,43	96,02	99,13	100,45	104,21	105,74	106,44	107,87	109,71
Deposito (Rp Triliun)	34,07	33,90	34,42	34,85	34,46	36,27	38,5	38,36	40,40	41,53	43,05	43,53	46,28	46,90	49,75	46,15	46,97	46,80

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LOKASI BANK UMUM (Rp triliun)

KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
JEMBRANA	Kredit (Rp Triliun)	3,28	3,34	3,35	3,41	3,44	3,51	4,74	4,86	4,88	4,92	5,02	5,04	5,04	5,06	5,08	5,15	5,18	5,27
	DPK (Rp Triliun)	2,35	2,44	2,47	2,54	1,93	1,98	2,79	2,9	2,97	3,13	3,21	3,27	3,40	3,40	3,52	3,53	3,63	3,57
TABANAN	Kredit (Rp Triliun)	5,28	5,38	5,45	5,55	5,61	5,76	9,09	8,91	9,06	9,29	9,53	9,69	9,80	9,86	10,01	10,12	10,17	10,24
	DPK (Rp Triliun)	5,36	5,66	6,01	6,22	4,57	4,83	7,53	7,82	8,32	8,88	9,20	9,30	9,44	9,59	9,60	9,50	9,59	9,59
BADUNG	Kredit (Rp Triliun)	10,78	10,8	10,94	11,06	11,37	11,72	24,36	24,48	26,45	27,08	28,05	28,96	28,89	29,25	32,38	32,53	33,37	33,66
	DPK (Rp Triliun)	22,01	24,31	28,48	31,37	30,42	32,89	40,35	39,97	42,73	44,4	46,69	46,72	47,32	49,81	54,09	51,83	52,93	54,40
GIANYAR	Kredit (Rp Triliun)	4,54	4,61	4,68	4,77	4,79	4,93	9,7	10,23	10,34	10,83	11,02	11,14	11,20	11,23	11,48	11,63	11,62	12,08
	DPK (Rp Triliun)	7,75	8,31	8,28	10,12	5,73	6,32	13,46	13,78	14,43	15,49	16,32	16,34	16,39	17,02	17,75	16,93	16,91	17,06
KLUNGKUNG	Kredit (Rp Triliun)	2,88	2,91	2,93	2,99	2,98	3,03	3,34	3,36	3,37	3,44	3,56	3,54	3,55	3,59	3,63	3,88	3,98	4,09
	DPK (Rp Triliun)	2,44	2,65	2,69	2,77	2,61	2,76	3,26	3,35	3,51	3,65	3,88	3,87	3,96	4,02	4,18	4,15	4,11	4,09
BANGLI	Kredit (Rp Triliun)	2,22	2,23	2,25	2,25	2,26	2,38	3,16	3,24	3,32	3,41	3,50	3,52	3,56	3,58	3,67	3,70	3,75	3,92
	DPK (Rp Triliun)	1,59	1,69	1,84	1,75	1,6	1,7	2,11	2,12	2,32	2,4	2,51	2,46	2,48	2,56	2,68	2,59	2,70	2,78
KARANGASEM	Kredit (Rp Triliun)	3,11	3,19	3,25	3,3	3,34	3,46	4,51	4,58	4,68	4,82	4,97	5,01	5,01	5,07	5,14	5,28	5,37	5,95
	DPK (Rp Triliun)	2,99	3,14	3,27	3,27	2,92	3,16	3,91	3,97	4,23	4,5	4,64	4,60	4,72	4,911	4,99	5,03	5,02	5,06
BULELENG	Kredit (Rp Triliun)	7,31	7,47	7,56	7,54	7,6	7,72	10,67	10,86	10,96	11,26	11,54	11,55	11,97	12,32	12,57	12,76	12,81	13,54
	DPK (Rp Triliun)	5,12	5,26	5,52	5,38	6,1	6,49	6,44	6,65	6,95	7,25	7,39	7,59	7,92	7,97	8,22	8,05	8,37	8,51
DENPASAR	Kredit (Rp Triliun)	45,56	45,79	46,06	46,62	46,58	46,73	42,81	44,11	44,25	45,79	45,78	46,45	45,25	46,04	47,02	48,95	49,28	49,28
	DPK (Rp Triliun)	55,85	56,96	60,12	63,09	75,66	78,71	68,34	70,02	72,59	75,94	78,41	78,78	80,03	83,67	85,53	84,48	84,83	86,42

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT UMKM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

KREDIT UMKM	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit UMKM (Rp Triliun)	44.43	45.4	45.61	46	46.33	47.55	48.59	50.23	52.48	52.64	54.31	53.86	54.21	54.27	55.79	56.63	57.00	57.59
Kredit UMKM (%.yoy)	11.27	11.57	9.88	5.63	4.29	4.73	6.54	9.2	13.27	10.71	11.77	7.21	3.29	3.10	2.74	5.15	5.15	6.11
NPL (%)	3.46	3.65	2.99	2.5	2.54	2.49	2.34	1.9	1.82	2.05	1.92	1.45	1.53	1.66	1.52	1.26	1.40	1.47

Sumber: LBU, Bank Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN NONTUNAI (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Transaksi Tunai																		
Inflow (Rp Triliun)	3.54	1.93	1.92	1.57	4.06	2.55	2.86	1.65	4.62	3.66	1.64	2.09	3.55	3.22	1.52	2.03	5.14	2.39
Outflow (Rp Triliun)	1.52	4.24	2.82	4.21	2.26	4.48	2.31	4.69	2.90	4.70	2.91	3.81	3.92	2.44	3.02	5.24	3.39	3.29
Kliring																		
Nom. Kliring (Rp Triliun)	7.67	7.91	8.34	8.83	7.81	7.44	7.81	9.52	8.12	8.27	9.13	9.25	7.56	7.37	8.12	8.37	6.98	7.11
VoL Kliring (ribu lembar)	195	205	222	238	190	191	179	214	169	180	190	195	150	148	163	167	131	137
RTGS																		
Nom. RTGS (Rp Triliun)	29.65	28.85	32.07	34.27	44.23	47.47	53.27	53.52	54.74	56.33	54.99	60.92	53.19	53.24	52.88	45.19	39.25	39.07
VoL RTGS (ribu lembar)	17.77	19.94	22.29	23.86	23.82	23.45	26.84	27.48	24.72	25.60	28.02	28.34	23.82	22.97	25.40	24.82	21.08	21.15

Sumber: Bank Indonesia





BAB I

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh meningkat sebesar 5,78% (yoy), utamanya bersumber dari pertumbuhan meningkatnya LU Konstruksi dan LU Pertanian. Sementara itu dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali terutama bersumber dari solidnya Konsumsi Rumah Tangga dan meningkatnya investasi.



Pertumbuhan Ekonomi

Tw I 2026 **5,58%** (YOY)Tw II 2026 **5,78%** (YOY)

Konsumsi Rumah Tangga

Tw I 2026 **5,02%** (YOY)Tw II 2026 **5,48%** (YOY)

Konsumsi Pemerintah

Tw I 2026 **20,28%** (YOY)Tw II 2026 **14,90%** (YOY)

Investasi (PMTB)

Tw I 2026 **6,78%** (YOY)Tw II 2026 **9,81%** (YOY)

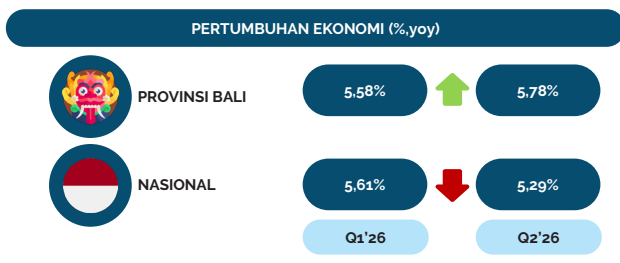
Ekspor Luar Negeri

Tw I 2026 **2,84%** (YOY)Tw II 2026 **2,23%** (YOY)

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh kuat sebesar 5,78% (yoy), di tengah gejolak geopolitik global. Capaian ini meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya (5,58%; yoy) dan berada di atas nasional (5,29%; yoy). Dengan struktur ekonomi Bali yang masih didominasi sektor terkait pariwisata, akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2026 menunjukkan meningkatnya peran sumber pertumbuhan domestik. Hal ini tercermin dari menguatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya aktivitas konstruksi, serta membaiknya kinerja sektor pertanian yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Bali di tengah perlambatan kunjungan wisatawan mancanegara. Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Pemerintah, Ekspor Luar Negeri sedangkan dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran.

1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN II 2026

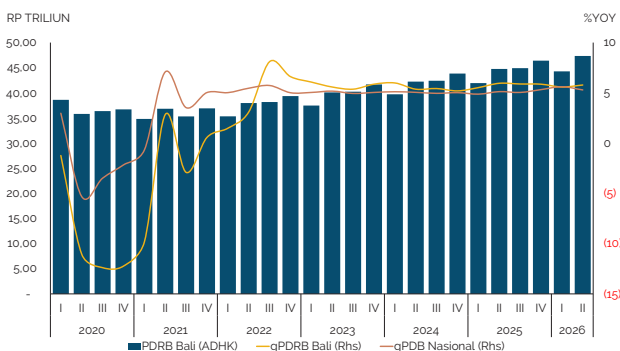


Kinerja perekonomian Bali meningkat pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari Nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan II 2026 sebesar Rp47,33 triliun atau tumbuh 5,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 5,58% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas Nasional yang tumbuh 5,29% (yoy). Dibandingkan provinsi lainnya, Bali menempati peringkat ke-6 pertumbuhan ekonomi tertinggi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha

(LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran. Hal ini sejalan dengan kunjungan wisatawan yang masih tinggi meskipun mengalami penurunan di tengah gejolak geopolitik global, meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan dan peternakan, peningkatan proyek swasta dan pemerintah, serta peningkatan permintaan kebutuhan pokok khususnya pada periode HBKN Galungan-Kuningan, Idul Adha, dan libur sekolah.

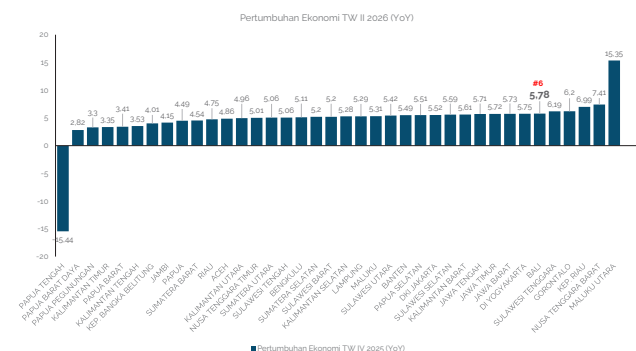
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Bali ditopang oleh Konsumsi RT, PMTB, Konsumsi Pemerintah, Ekspor LN dan. Konsumsi RT didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan momentum perayaan HBKN Galungan-Kuningan, Idul Adha, dan libur sekolah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didorong oleh aktivitas konstruksi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Belanja Modal utamanya yang berasal dari APBN. Konsumsi Pemerintah

Grafik 1.1. Perkembangan Ekonomi Bali dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Triwulan II 2026

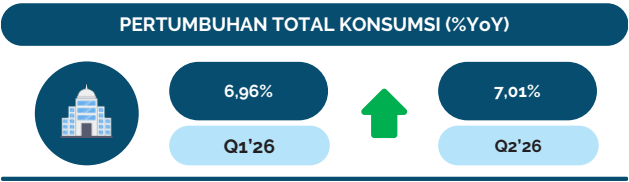


Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

didorong peningkatan realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD, khususnya belanja pegawai. Kuatnya Ekspor Luar Negeri didorong oleh masih tingginya kunjungan wisatawan mancanegara meskipun mengalami penurunan.

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN

1.2.1. Konsumsi



Pertumbuhan total konsumsi pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan I 2026 didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan tetap tingginya Konsumsi Pemerintah. Total konsumsi tercatat tumbuh 7,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,96% (yoy). Peningkatan kinerja Total Konsumsi tersebut utamanya didorong oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga seiring dengan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momen Hari Raya Galungan dan Kuningan, HBKN Idul Adha, masa libur sekolah, dan pelaksanaan beberapa *event* domestik salah satunya Pesta Kesenian Bali (PKB). Di sisi lain, Konsumsi Pemerintah mengalami perlambatan setelah pada triwulan sebelumnya terdapat pencairan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan Pensiunan. Namun demikian, pertumbuhan tetap tinggi didukung oleh seiring realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN dan

APBD terutama dengan adanya pengangkatan PPPK di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2025. Lebih lanjut, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) juga mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya aktivitas lembaga non profit pada kegiatan keagamaan khususnya pada rangkaian Galungan-Kuningan dan HBKN Idul Adha.

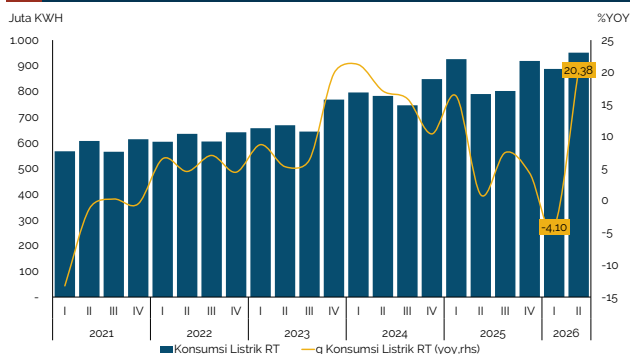
KONSUMSI SWASTA : RUMAH TANGGA (RT) DAN LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (LNPR)

Kinerja konsumsi swasta meningkat pada triwulan II 2026 seiring dengan peningkatan Konsumsi RT, Konsumsi LNPR. Konsumsi RT tumbuh 5,48% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy). Peningkatan Kinerja konsumsi RT seiring dengan daya dorong konsumsi masyarakat yang meningkat seiring dengan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momen Hari Raya Galungan dan Kuningan, HBKN Idul Adha, masa libur sekolah, dan pelaksanaan beberapa event domestik salah satunya Pesta Kesenian Bali (PKB). Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang relatif tinggi pada pengeluaran makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, serta rekreasi dan budaya. Aktivitas masyarakat yang meningkat juga tercermin dari peningkatan konsumsi listrik sebesar 20,38% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,10% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi LNPR pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 12,93% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 6,40%. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas lembaga

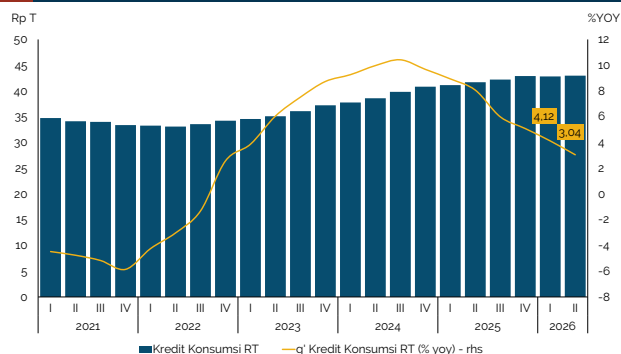
Tabel 1.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (% ,yoy)

Komponen	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi	6,66	6,72	4,08	3,14	5,07	7,52	3,96	5,70	4,82	5,44	5,21	3,40	4,86	6,33	4,97	6,96	7,01
Kons.RT	6,92	5,39	6,08	3,98	5,57	4,33	4,09	5,46	4,73	4,85	5,31	5,54	5,20	5,85	5,47	5,02	5,48
Kons.LNPR	9,09	5,86	6,05	32,85	13,77	80,93	10,67	14,53	10,44	27,04	-19,04	9,75	8,90	-6,99	-3,97	6,40	12,93
Kons. Pemerintah	3,64	14,00	-6,15	-3,76	-0,77	19,68	2,41	5,66	4,36	6,37	13,47	-8,37	2,29	10,73	3,90	22,04	14,90
Investasi	-0,45	0,44	2,72	7,25	2,58	8,58	9,12	0,44	4,74	5,54	3,57	6,55	7,54	5,95	6,13	7,77	9,98
PMTB	-0,49	0,47	2,77	8,89	3,01	8,23	8,55	1,92	4,19	5,56	5,13	6,61	6,12	5,47	6,03	6,88	9,81
Perubahan Inventori	4,68	-5,69	-4,85	-265,41	-66,27	56,62	103,21	-267,28	-55,10	-4,53	-143,22	1,07	-148,33	-116,04	60,29	-197,83	25,80
Ekspor LN	562,00	206,35	60,14	30,59	103,15	24,39	17,47	9,14	15,67	16,00	6,55	13,47	7,54	5,43	8,21	2,84	2,23
Impor LN	1.069,96	153,37	47,04	18,49	108,82	16,94	6,50	10,01	18,61	12,93	0,93	8,46	9,81	6,13	6,28	15,14	-9,60
Net Ekspor antar daerah	1.310,81	291,18	55,71	25,81	98,05	37,99	21,76	5,22	14,08	17,42	5,47	10,06	6,96	6,33	7,20	5,78	10,37
PDRB	6,07	5,58	5,36	5,86	5,71	5,98	5,36	5,43	5,19	5,48	5,52	5,90	5,88	5,86	5,82	5,58	5,78

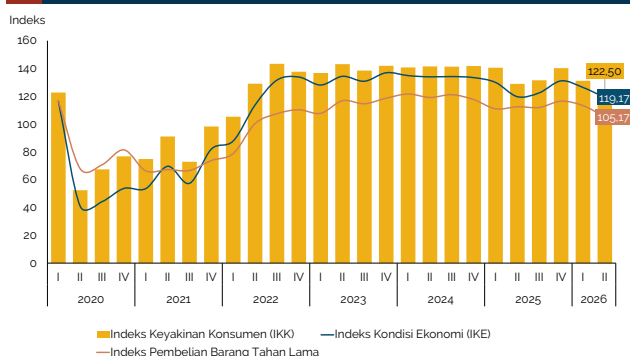
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 1.3. Perkembangan Konsumsi Listrik RT

Sumber: PLN, diolah BI

Grafik 1.5. Perkembangan Penyaluran Kredit RT di Provinsi Bali

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah BI

Grafik 1.4. Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah BI

nonprofit pada berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam merayakan HBKN Galungan dan Kuningan serta Idul Adha. Optimisme konsumen juga masih tinggi tercermin dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE,) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama pada triwulan II 2026 dengan rata-rata masing-masing sebesar 122,50, 119,17 dan 105,17 berada di atas 100 meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan rata-rata masing-masing sebesar 131,11, 126,38, dan 113,17.

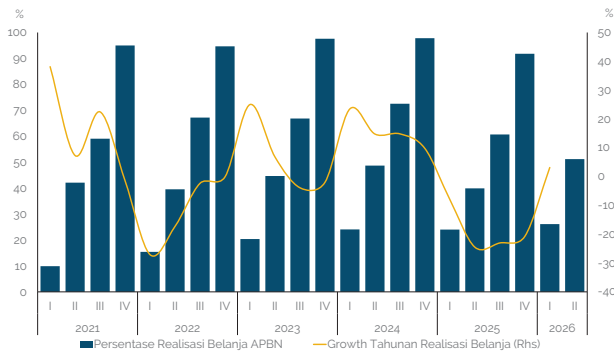
Disisi lain, pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja kredit RT yang mengalami perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit RT pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 3,04% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,12% (yoy). Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis kredit RT mengalami perlambatan di antaranya kredit KPR & KPA, kredit KKB, kredit multiguna dan kredit peralatan RT tumbuh masing-masing sebesar -0,12% (yoy), -9,05% (yoy), 4,48% (yoy) dan 21,15% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 0,66% (yoy), -6,75% (yoy), 5,48% (yoy) dan 36,15% (yoy).

KONSUMSI PEMERINTAH

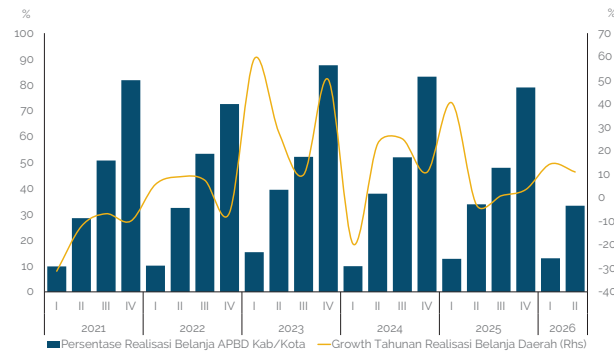
Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi namun melambat pada triwulan II 2026 seiring tingginya realisasi belanja di tengah pagu anggaran yang terbatas. Pada triwulan II 2026, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 14,90% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 22,04% (yoy). Tingginya pertumbuhan secara tahunan didorong peningkatan realisasi belanja pegawai seiring dengan adanya pengangkatan PPPK di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2025. Namun demikian perlambatan disebabkan oleh pagu anggaran keseluruhan tahun yang menurun di tengah realisasi anggaran yang tinggi pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan pembagian administratif, melambatnya konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 disebabkan oleh realisasi APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten yang pertumbuhannya sebesar 7,45% (yoy) dan 10,97% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy) dan 14,39% (yoy). Secara lebih rinci, perlambatan belanja terjadi pada belanja pegawai dengan realisasi pertumbuhan masing-masing sebesar 16,01% (yoy) dan 15,47% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 53,97% (yoy) dan 21,57% (yoy) seiring telah direalisasikannya THR pada periode sebelumnya. Di sisi lain, APBN tumbuh meningkat sebesar 5,15% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,14% (yoy). Peningkatan terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masing-masing sebesar 17,49%

Grafik 1.6. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali



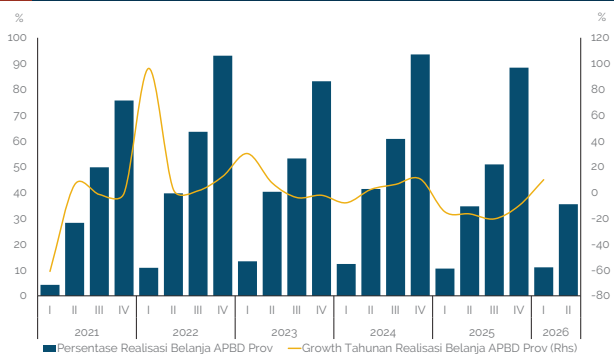
Sumber: BPKAD Provinsi, diolah BI

Grafik 1.8. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali



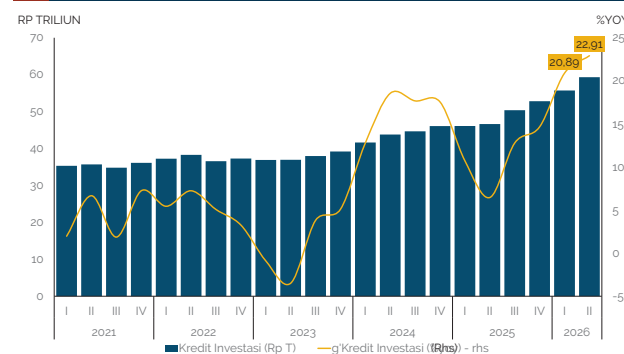
Sumber: Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali

Grafik 1.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali



Sumber: BPKAD Provinsi, diolah BI

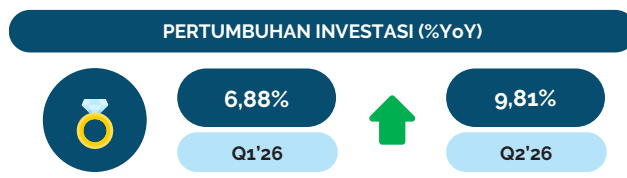
Grafik 1.9. Perkembangan Kredit Investasi Provinsi Bali



Sumber: LBU, diolah BI

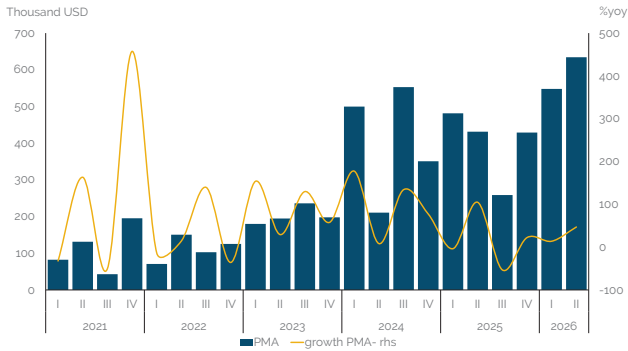
(yoy) dan 12,57% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,12% (yoy) dan 2,54% (yoy).

1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

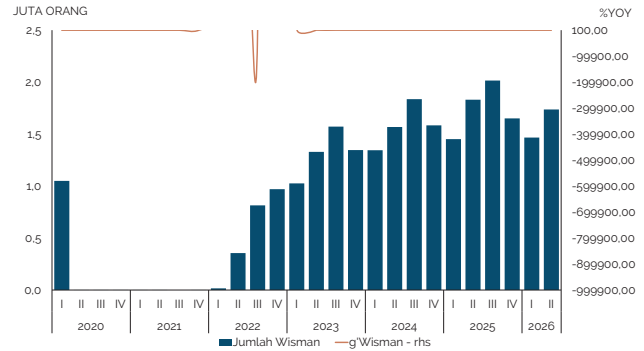


Kinerja Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Bali meningkat pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah. PMTB di Bali tumbuh meningkat sebesar 9,81% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 6,88% (yoy). Peningkatan PMTB utamanya didorong oleh peningkatan investasi swasta yang tercermin dari meningkatnya PMA dan membaiknya PMDN pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 47,02% (yoy) dan -5,89% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) dan -6,20% (yoy). Kinerja investasi

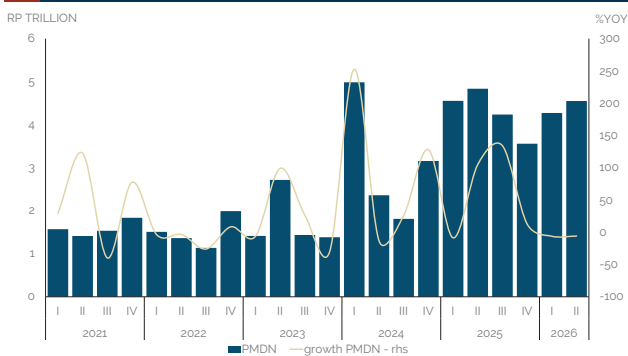
yang kuat terutama didorong PMA mengindikasikan masih tingginya minat investor terhadap prospek ekonomi Bali, khususnya pada sektor akomodasi, konstruksi, serta sektor penunjang pariwisata. Meningkatnya PMTB turut didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal APBN dengan pertumbuhan sebesar 248,87% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 151,20% (yoy). Beberapa proyek pemerintah daerah juga turut mendorong investasi di antaranya lanjutan pembangunan Turyapada Tower, penataan area parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembangunan jembatan akses kawasan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, dan perbaikan jalan. Hal ini tercermin dari peningkatan penjualan semen yang tumbuh sebesar 17,80% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,71% (yoy). Optimisme investasi juga meningkat tercermin dari kredit investasi yang meningkat dengan pertumbuhan sebesar 22,91% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,89% (yoy).

Grafik 1.10. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

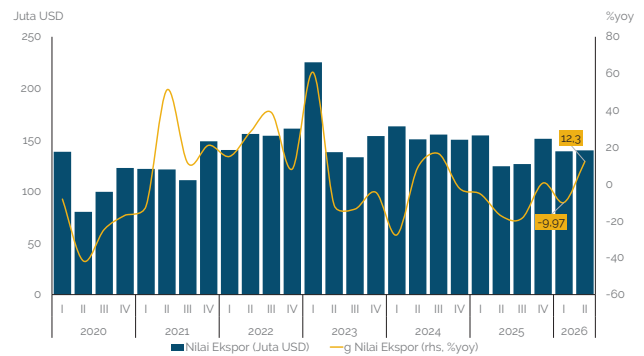
Sumber: BKPM, diolah BI

Grafik 1.12. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali

Sumber: BPS, diolah BI

Grafik 1.11. Perkembangan Penanaman Dalam Negeri (PMDN)

Sumber: BKPM, diolah BI

Grafik 1.13. Nilai Ekspor Barang Nonmigas Provinsi Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

1.2.3. Ekspor dan Impor

PERTUMBUHAN NET EKSPOR (%YoY)

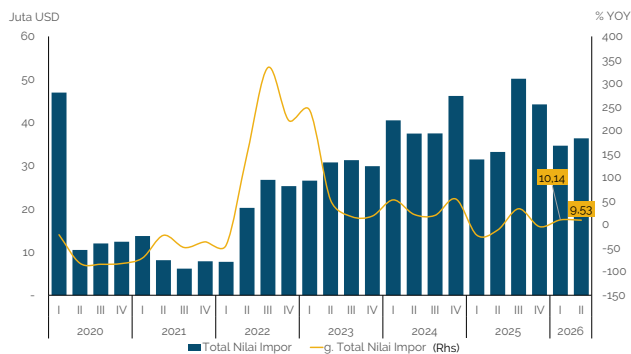
**-40,27%****Q1'26****-36,55%****Q2'26**

Kinerja neraca perdagangan pada triwulan II 2026 masih berkontraksi, meskipun membaik terutama disebabkan melambatnya pertumbuhan ekspor luar negeri. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antardaerah) berkontraksi sebesar -36,55% (yoy) pada triwulan II 2026, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -40,27% (yoy). Berdasarkan nilai nominal, neraca perdagangan Bali pada triwulan II 2026 masih mengalami surplus sebesar Rp1,36 triliun (ADHK) atau sebesar Rp7,32 triliun (ADHB) dengan kontribusi terbesar berasal dari ekspor luar negeri.

Kinerja Ekspor Luar Negeri di Bali melambat sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik yang mengalami

perlambatan. Pada triwulan II 2026, kinerja Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 2,23% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,84% (yoy). Melambatnya kinerja ekspor luar negeri utamanya dipengaruhi oleh kinerja ekspor jasa yang bersumber dari lebih rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dan meningkatnya tarif angkutan udara yang menyebabkan minat berwisata tertahan. Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan II 2026 berkontraksi sebesar -5,17% (yoy) dengan total 1,73 juta kunjungan. Secara pertumbuhan, capaian ini berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,04% (yoy) dengan total 1,46 juta kunjungan. Melambatnya kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan berjalan terjadi pada seluruh negara kantong utama wisatawan mancanegara seperti Australia, Tiongkok, dan India dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,22% (yoy), -5,56 dan -12,66% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang masing-masing

Grafik 1.14. Perkembangan Nilai Impor Barang



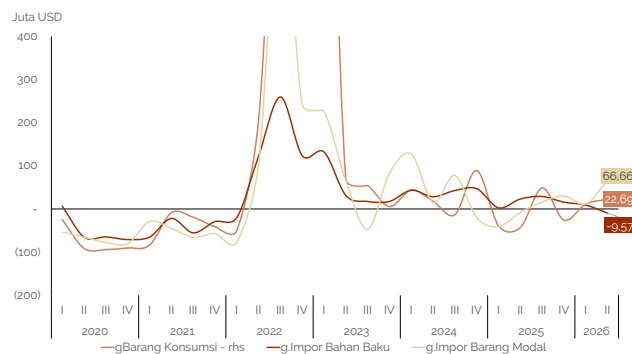
Sumber: Bank Indonesia, diolah BI

tumbuh sebesar 5,76% (yoy), 20,22% (yoy) dan -0,25% (yoy). Perlambatan lebih dalam tertahan oleh kunjungan wisatawan nusantara yang tumbuh sebesar 3,54% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,33% (yoy) seiring memasukinya periode libur sekolah dan diselenggarakannya beberapa event domestik. Meskipun pertumbuhan ekspor jasa melambat, ketahanan sektor eksternal Bali masih relatif terjaga melalui perbaikan ekspor barang nonmigas yang berbalik tumbuh positif sebesar 12,33% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -9,97% (yoy). Kondisi ini menunjukkan mulai meningkatnya kontribusi ekspor barang dalam menopang kinerja eksternal daerah di tengah moderasi sektor pariwisata.

Lebih lanjut kinerja net ekspor antardaerah di Bali pada triwulan II 2026, mengalami defisit sebesar - Rp 15,336 miliar (ADHK) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang defisit sebesar Rp -12,707 Milliar (ADHK).

Di sisi lain, kinerja neraca perdagangan yang membaik didorong oleh kinerja impor luar negeri yang berkontraksi pada triwulan II 2026. Impor Luar Negeri tumbuh -9,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,14% (yoy). Hal ini utamanya disebabkan oleh kinerja impor barang nonmigas Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 9,53% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,14% (yoy). Perlambatan total impor barang Provinsi Bali disebabkan

Grafik 1.15. Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi Broad Economic Categories (BEC)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

oleh impor bahan baku yang berkontraksi sebesar -9,57% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 8,97% (yoy).

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA

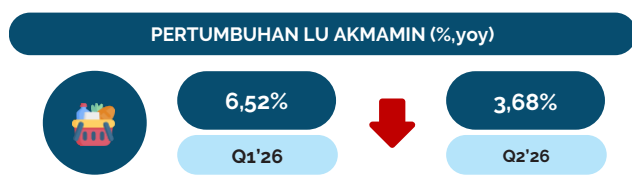
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya didukung oleh produksi pertanian yang meningkat, perdagangan ritel yang meningkat seiring konsumsi masyarakat di tengah beberapa perayaan, dan pembangunan proyek swasta maupun pemerintah. Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja LU Pertanian, LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan LU Konstruksi. Kendati demikian, ekonomi Bali pada triwulan II tertahan oleh perlambatan beberapa LU utama di antaranya kinerja LU Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman (Akmamin), LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud). Peningkatan kinerja LU Pertanian didorong oleh peningkatan produksi komoditas peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan, LU Konstruksi didorong oleh peningkatan proyek swasta dan pemerintah yang tercermin dari peningkatan pertumbuhan pengadaan sementara, dan perdagangan seiring perayaan Galungan-Kuningan dan HBKN Idul Adha serta memasukinya libur sekolah. Sementara itu LU utama lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh penurunan kunjungan wisatawan mancanegara seiring ketidakpastian kondisi geopolitik dan meningkatnya tarif angkutan udara

Tabel 1.2. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II 2026 Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,60	-2,43	-4,72	6,04	-0,47	2,64	3,92	3,00	0,61	2,51	5,17	-0,30	1,97	0,25	1,70	2,06	6,35
Pertambangan dan Penggalian	5,06	2,10	0,00	-0,88	1,48	0,50	1,53	2,42	0,95	1,36	0,81	1,26	0,12	0,66	0,71	3,01	2,35
Industri Pengolahan	0,75	0,68	7,01	1,44	2,33	-0,14	1,23	11,00	9,37	5,19	-0,06	3,28	4,72	7,71	3,94	8,94	8,28
Pengadaan Listrik, Gas	28,81	14,91	4,05	10,22	13,84	11,46	11,34	15,23	9,50	11,78	8,59	1,97	5,12	3,93	4,88	0,22	15,98
Pengadaan Air	1,29	1,88	0,43	11,07	3,48	4,65	0,17	-3,92	4,57	1,25	3,83	3,81	1,55	0,97	2,51	413	476
Konstruksi	-0,53	1,14	0,06	2,86	0,89	1,64	1,31	0,02	4,24	1,82	3,09	6,28	4,12	2,84	4,06	5,03	8,4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,39	3,53	5,73	7,27	5,27	4,32	3,75	2,67	5,01	3,95	5,38	8,43	6,83	5,97	6,65	7,25	8,22
Transportasi dan Pergudangan	36,16	26,89	28,37	12,65	25,28	7,33	6,74	3,82	6,30	5,99	6,78	7,30	6,26	5,53	6,46	5,56	-0,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,97	16,13	16,16	13,86	16,15	12,98	12,66	12,04	10,14	11,90	7,21	13,76	10,94	8,90	10,25	6,52	3,68
Informasi dan Komunikasi	0,11	0,94	2,60	3,29	1,73	1,21	1,40	2,51	2,50	1,91	2,67	4,22	5,64	5,99	4,65	3,98	3,89
Jasa Keuangan	11,34	10,59	15,65	15,66	13,35	19,64	19,34	16,09	5,85	15,06	6,65	0,32	-5,09	6,70	1,98	-5,01	1,89
Real Estate	0,37	0,96	1,72	-0,93	0,51	0,41	2,16	1,84	2,42	1,73	1,98	4,28	2,61	1,82	2,67	3,85	3,36
Jasa Perusahaan	6,08	8,76	8,32	3,87	6,72	5,77	6,37	6,92	7,43	6,64	5,94	7,89	9,74	7,61	7,84	4,95	4,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,92	0,18	-4,93	0,08	-0,98	18,60	2,97	3,75	6,61	7,29	20,26	3,62	9,37	12,14	10,99	16,67	14,31
Jasa Pendidikan	1,62	6,37	-3,54	-4,52	-0,15	2,52	0,94	1,21	1,04	1,40	5,63	3,47	9,39	7,89	6,55	7,7	7,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	4,24	0,59	2,45	2,30	2,60	1,97	2,24	2,66	2,36	4,71	4,61	6,97	8,51	6,21	6,98	4,98
Jasa lainnya	7,23	9,97	9,83	5,18	8,01	5,42	5,76	5,82	7,55	6,16	5,20	7,27	7,90	5,10	6,38	4,86	7,74
PDRB	6,09	5,58	5,38	5,87	5,72	5,97	5,36	5,44	5,19	5,48	5,59	5,95	5,88	5,86	5,82	5,58	5,78

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

1.3.1. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

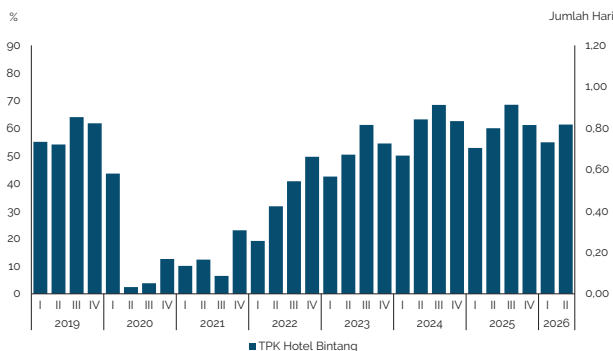


LU Akmamin tumbuh melambat pada triwulan II 2026 disebabkan oleh penurunan kunjungan wisatawan utamanya pada wisatawan mancanegara. Kinerja LU Akmamin tumbuh 3,68% (yoy) pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,52% (yoy). Melambatnya LU Akmamin sejalan dengan penutupan sementara beberapa rute penerbangan Timur Tengah sehubungan eskalasi perang AS-Israel-Iran serta meningkatnya tarif angkutan udara di tengah ketidakpastian geopolitik. Hal ini tercermin dari

melambatnya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara berkontraksi sebesar -5,17% (yoy) dengan total 1,73 juta kunjungan. Secara pertumbuhan, capaian ini berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,04 % (yoy) dengan total 1,46 juta kunjungan.

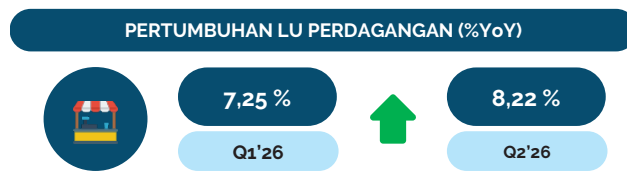
Di sisi lain Kunjungan wisatawan nusantara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,54% (yoy) dengan total kunjungan 7,04 juta kunjungan wisatawan nusantara (intra dan inter provinsi) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,33% (yoy). Lebih lanjut, tingkat hunian hotel bintang pada triwulan II 2026 sebesar 61,32% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar yang 54,88% dengan rata-rata jangka waktu menginap yang sama yaitu 2,42 hari.

Grafik 1.16. Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

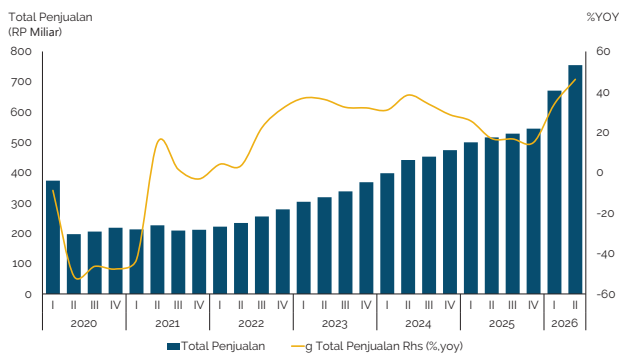
1.3.2. Perdagangan



LU Perdagangan tumbuh meningkat pada triwulan II 2026 seiring dengan permintaan kebutuhan pada periode HBKN Galungan-Kuningan dan Idul Adha, di tengah meningkatnya produksi pertanian, dan

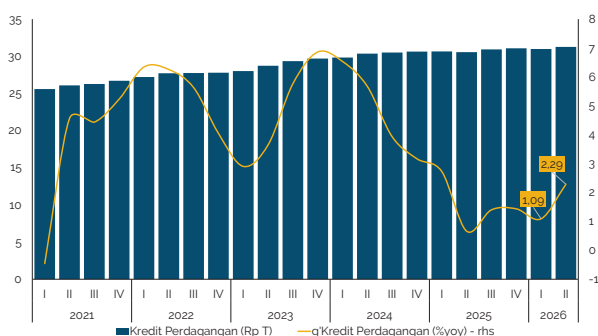
peningkatan kebutuhan bahan baku konstruksi. LU Perdagangan pada triwulan II 2026 tumbuh 8,22% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,25% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Perdagangan tercermin dari omzet penjualan pelaku usaha Survey Penjualan Eceran yang tumbuh meningkat sebesar 46,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 34,06% (yoy) didorong oleh meningkatnya omzet pelaku usaha pedagang perlengkapan rumah tangga, peralatan tulis, dan bahan konstruksi. Kinerja perdagangan kendaraan juga mengalami peningkatan yang tercermin dari penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tumbuh masing-masing sebesar 4,75% (yoy) dan 6,30% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar -6,80% (yoy) dan 1,93% (yoy). Dari sisi kredit, kredit perdagangan juga mengalami peningkatan pertumbuhan dengan kredit yang tumbuh sebesar 2,29% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,09% (yoy).

Grafik 1.17. Perkembangan Omzet Survei Penjualan Eceran Provinsi Bali



Sumber: SPE BI, diolah

Grafik 1.18. Perkembangan Kredit Perdagangan di Bali



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah BI

1.3.3. Transportasi

PERTUMBUHAN LU TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN (%YoY)



5,56%

Q1'26



-0,64%

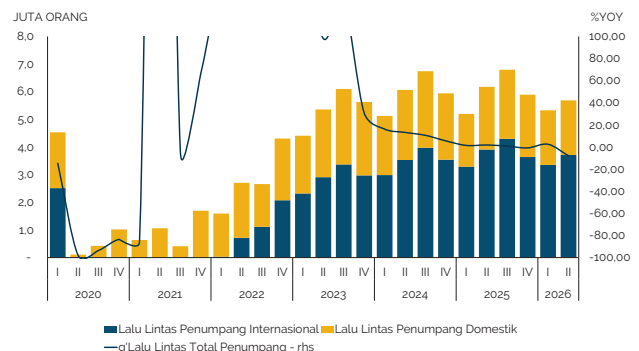
Q2'26

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud)

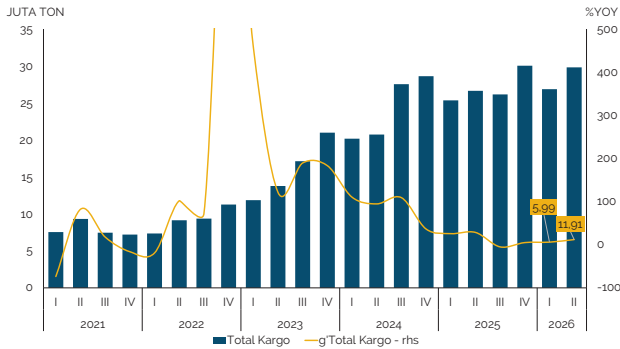
menurun dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan menurunnya aktivitas Angkutan Udara seiring dengan peningkatan Tarif Angkutan Udara di tengah ketidakpastian geopolitik. Pada triwulan II 2026, kinerja

LU Transportasi berkontraksi sebesar -0,64% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,56% (yoy). Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya kinerja angkutan udara yang tercermin dari lalu lintas penumpang pesawat yang berkontraksi sebesar -7,94% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,48% (yoy). Penurunan penumpang terjadi baik pada penumpang internasional dan penumpang domestik yang masing-masing berkontraksi sebesar -1,03% (yoy) dan -10,27% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 1,94% (yoy) dan 3,42% (yoy). Penurunan juga terjadi pada aktivitas ASDP di pelabuhan ASDP Gilimanuk dengan pertumbuhan lalu lintas penumpang sebesar -11,65% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,53% (yoy). Lalu lintas penumpang angkutan laut juga mengalami kontraksi sebesar -13,63% (yoy) lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar -5,65% (yoy).

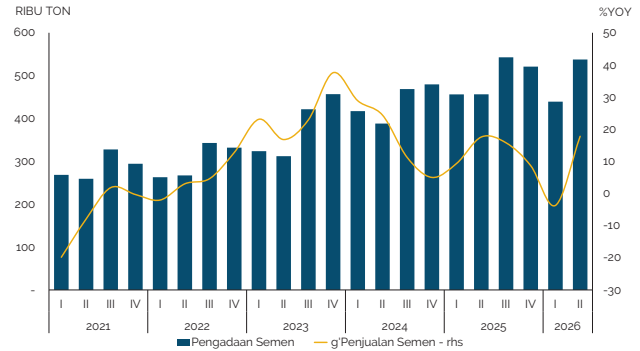
Grafik 1.19. Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Pesawat ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai



Sumber: Angkasa Pura I, (diolah BI)

Grafik 1.20. Perkembangan Jumlah Keberangkatan Kargo domestik Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sumber: Angkasa Pura I, (diolah BI)

Grafik 1.21. Realisasi Pengadaan Semen di Bali

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Penurunan kinerja LU Transgud lebih dalam tertahan oleh lalu lintas angkutan udara yang tumbuh meningkat sebesar 11,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy). Berdasarkan arus kenaikan, peningkatan terjadi baik untuk kargo domestik maupun internasional dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 21,11% (yoy) dan -8,56% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,50% (yoy) dan -15,82% (yoy). Dari sisi lalu lintas barang angkutan laut, jumlah lalu lintas kargo angkutan laut berkontraksi sebesar 66,85% (yoy) lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -71,25% (yoy).

1.3.4. Konstruksi

PERTUMBUHAN LU KONSTRUKSI (%YoY)



5,03 %

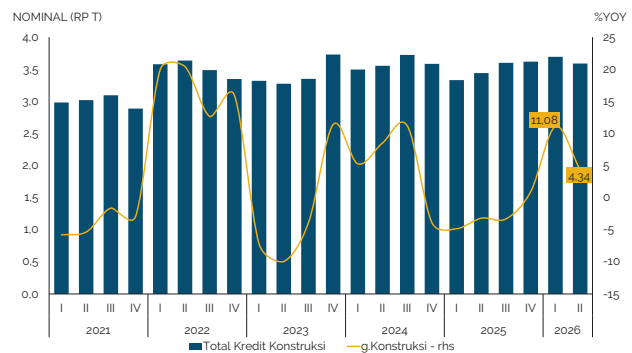
Q1'26



8,40%

Q2'26

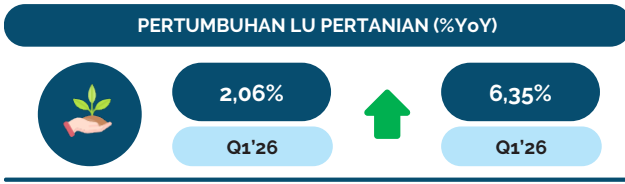
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, LU Konstruksi tumbuh 8,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi utamanya didorong oleh realisasi proyek swasta dan pemerintah. Peningkatan proyek swasta tercermin meningkatnya PMA dan membaiknya PMDN pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 47,02%

Grafik 1.22. Perkembangan Kredit Konstruksi di Bali

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah BI

(yoy) dan -5,89% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) dan -6,20% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi turut didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal APBN dengan pertumbuhan sebesar 248,87% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 151,20% (yoy). Beberapa proyek pemerintah daerah juga turut mendorong investasi di antaranya lanjutan pembangunan Turyapada Tower, penataan area parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembangunan jembatan akses kawasan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, dan perbaikan jalan. Hal ini tercermin dari peningkatan penjualan semen yang tumbuh sebesar 17,80% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -3,71% (yoy). Dari sisi kredit, kredit Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,34% (yoy) lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,24% (yoy).

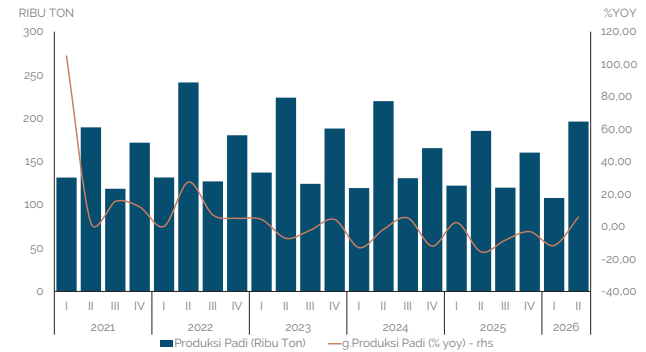
1.3.5. Pertanian



Kinerja LU Pertanian tumbuh meningkat pada triwulan II 2026 seiring peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan. Pada triwulan II 2026 LU Pertanian tumbuh meningkat sebesar 6,35% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,06% (yoy). Peningkatan kinerja sektor pertanian pada triwulan II 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan struktur perekonomian Bali. Di tengah perlambatan sektor terkait pariwisata, sektor pertanian berperan sebagai sumber pertumbuhan alternatif yang mendukung ketahanan ekonomi daerah. Pada subsektor tanaman pangan, peningkatan terutama terjadi pada komoditas padi dengan pertumbuhan produksi pada triwulan II 2026 sebesar 5,79% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -12,29% (yoy). Pada subsektor peternakan, produksi pematangan ternak berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan untuk beberapa komoditas seperti sapi, kambing, dan babi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 48,62% (yoy), 13,43% (yoy), dan 12,59% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,59% (yoy), -7,00% (yoy), dan -5,97% (yoy) seiring peningkatan kebutuhan untuk perayaan Galungan-Kuningan dan pelaksanaan ibadah kurban pada HBKN Idul Adha. Di sisi lain, produksi perikanan berdasarkan data Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mengalami penurunan sebesar -92,13% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -24,83% (yoy). Dari sisi pembiayaan, kinerja penyaluran kredit pertanian mengalami peningkatan dengan pertumbuhan

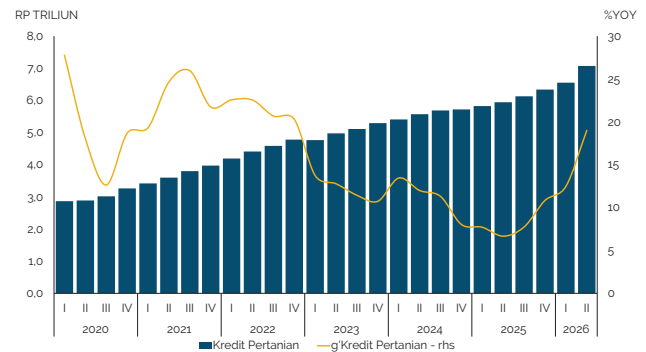
sebesar 19,00% (yoy) meningkat dari triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 12,47% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kredit perikanan juga mengalami perbaikan dengan pertumbuhan yang berkontraksi sebesar -6,05% (yoy) membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar -20,31% (yoy).

Grafik 1.23. Produksi Padi di Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.24. Kredit Pertanian



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.25. Kredit Perikanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah



BOKS 1



MESIN PERTUMBUHAN BARU MENUJU EKONOMI BALI YANG LEBIH RESILIEN



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tuntular
No. 4, Denpasar

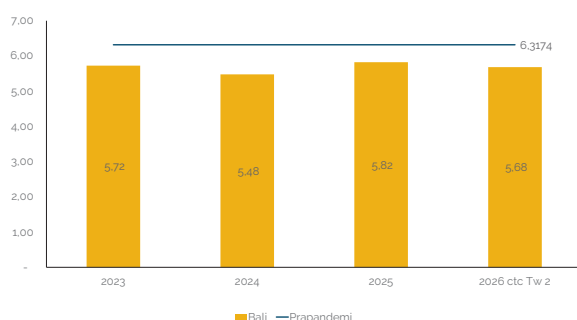


Kebutuhan untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru semakin penting mengingat tingginya ketergantungan struktur ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi pada satu sektor dapat meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pemulihan sektor pariwisata, tetapi juga pada perluasan basis ekonomi melalui penguatan sektor produktif yang memiliki keterkaitan

tinggi antar lapangan usaha dan mampu menciptakan sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Meskipun perekonomian Bali telah pulih pascapandemi, laju pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah rata-rata periode prapandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan yang selama ini menopang ekonomi Bali belum sepenuhnya kembali menuju kapasitas optimalnya. Berdasarkan perhitungan data historis rata-rata pertumbuhan ekonomi, kinerja perekonomian Bali pada prapandemi (2011-2019) berada pada level 6,32% (yoy). Kinerja pertumbuhan tersebut cukup impresif dan lebih tinggi dibandingkan rerata pertumbuhan historis Indonesia prapandemi yang mencapai 5,33% (yoy). Meski demikian, hingga triwulan II 2026 pertumbuhan ekonomi Bali baru mencapai 5,68% (ctc), masih berada di bawah level prapandemi (Grafik B1.1). Dengan demikian, masih terdapat *gap* pertumbuhan sekitar 0,64 poin persentase dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali pada periode prapandemi.

Grafik B1.1. Perkembangan Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali



Sumber : BPS Provinsi Bali

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Bali pada prapandemi ditopang oleh berbagai lapangan usaha dengan didominasi oleh sektor akomodasi dan makan minum (akmamin) yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pariwisata. Masifnya pembangunan konstruksi pada periode tersebut turut memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang didukung realisasi investasi, baik dari swasta maupun pemerintah. Sementara itu, sektor pariwisata lainnya seperti perdagangan serta transportasi dan pergudangan (transgud) juga menjadi mesin pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Bali pada periode prapandemi ditopang oleh basis pertumbuhan yang relatif lebih beragam, tidak hanya berasal dari sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, tetapi juga sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa Pendidikan.

Pada periode pascapandemi (2023-2025), perekonomian Bali semakin bertumpu pada sektor akmamin dimana andil sektor akmamin meningkat menjadi 2,23% atau naik sekitar 86 basis poin dibandingkan periode prapandemi. Meningkatnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Bali masih sangat ditopang oleh aktivitas pariwisata.

Di sisi lain, meningkatnya dominasi sektor pariwisata dalam struktur pertumbuhan ekonomi Bali (Gambar B1.1) menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi masih bertumpu pada sektor tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sumber-sumber pertumbuhan alternatif guna memperkuat ketahanan ekonomi Bali terhadap berbagai dinamika dan risiko eksternal. Sementara itu, melemahnya kontribusi sektor-sektor non-pariwisata, khususnya pertanian, menunjukkan bahwa proses diversifikasi ekonomi Bali belum berlangsung optimal. Padahal sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja, pemasok bahan baku industri, dan penyangga stabilitas harga

pangan. Berlanjutnya alih fungsi lahan, keterbatasan regenerasi petani, serta rendahnya adopsi teknologi menjadi faktor yang membatasi peningkatan produktivitas sektor tersebut.

Sementara itu, peran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai motor ekspansi kapasitas produksi juga masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan faktor utama peningkatan kapasitas produksi jangka panjang. Oleh karena itu, akselerasi PMTB menjadi penting tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan output potensial perekonomian Bali. Selain itu, investasi menjadi penting bagi proses modernisasi usaha, peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan penciptaan nilai tambah.

Gambar B1.1. Perkembangan Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Rata-Rata Sumber Pertumbuhan LU			
Sektor	Prapandemi	Pasca Pandemi	Selisih
Akmamin	1.37	2.23	0.85
Konstruksi	0.73	0.23	-0.5
Perdagangan	0.64	0.51	-0.13
Infokom	0.52	0.22	-0.3
Pertanian	0.48	0.16	-0.32
Transgud	0.46	0.72	0.26
Jasa Pendidikan	0.41	0.14	-0.27
Adpem	0.37	0.31	-0.06
Ind. Pengolahan	0.34	0.25	-0.09

Sumber : BPS Provinsi Bali

Analisis sektor basis dan progresif serta *forward* dan *backward linkage* (Gambar B1.2 dan Gambar B1.3) menunjukkan bahwa strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali ke depan perlu ditempuh melalui dua pendekatan yang saling melengkapi.

Pertama, memperkuat sektor-sektor basis yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian, namun kontribusinya belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Sektor pertanian tetap memiliki peran strategis mengingat tingginya penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan daerah, serta perannya dalam menjaga stabilitas harga. Sementara itu, sektor konstruksi dan perdagangan memiliki efek pengganda yang besar melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, serta aktivitas ekonomi antarsektor. Penguatan sektor-sektor tersebut menjadi penting untuk mengembalikan kapasitas pertumbuhan ekonomi Bali menuju level historisnya.

Kedua, penutupan *gap* pertumbuhan sebesar 0,64 poin persentase juga memerlukan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru (*new source of growth*) yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi sekaligus memperkuat diversifikasi ekonomi Bali. Salah satu peluang utama berasal dari pengembangan industri pengolahan berbasis agro dan perikanan. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar di luar daerah maupun ekspor, serta mendorong terciptanya lapangan kerja pada sektor pengolahan, logistik, dan pemasaran. Pengembangan industri ini juga berpotensi meningkatkan produktivitas sektor primer yang selama ini masih didominasi oleh penjualan produk mentah.

Peluang tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan ekonomi kelautan (*marine economy*) yang terintegrasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. Selain menjadi salah satu sentra perikanan terbesar di Bali, PPN Pengambengan telah memiliki ekosistem industri pengolahan ikan dan fasilitas rantai dingin yang dapat menjadi fondasi pengembangan klaster industri perikanan terintegrasi di Bali bagian barat. Keberadaan PPN Pengambengan tidak hanya berfungsi sebagai

pusat aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, rantai dingin (*cold chain*), logistik, perdagangan, dan ekspor. Integrasi aktivitas hulu hingga hilir tersebut dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus memperbesar nilai tambah di daerah. Secara umum, mesin pertumbuhan baru juga dapat diakselerasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sanur yang berpotensi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan jasa kesehatan dan *medical tourism*. Selain menarik wisatawan yang mencari layanan kesehatan berkualitas, pengembangan KEK Kesehatan Sanur juga berpotensi meningkatkan investasi pada fasilitas kesehatan, pendidikan tenaga medis, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Karakteristik sektor kesehatan yang relatif tidak terlalu bergantung pada siklus pariwisata *massal* menjadikan sektor ini sebagai salah satu alternatif sumber pertumbuhan yang lebih resilien. Pengembangan KEK Sanur juga sejalan dengan kebijakan nasional yang menetapkan kawasan tersebut sebagai KEK kesehatan pertama di Indonesia melalui PP Nomor 41 Tahun 2022, dengan fokus pada pengembangan layanan kesehatan dan pariwisata Kesehatan.

Pengembangan kawasan juga semakin diperkuat dengan rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang direncanakan berlokasi di Bali. Sebagai pusat jasa keuangan internasional, PFII diharapkan mampu menarik aliran modal global, memperdalam pasar keuangan domestik, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan regional. Kehadiran PFII berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang melampaui sektor keuangan melalui peningkatan aktivitas investasi, bisnis, dan perdagangan internasional. Aktivitas tersebut akan mendorong permintaan terhadap sektor akomodasi dan makan

minum, jasa perusahaan, teknologi informasi, transportasi, perdagangan, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Dengan karakteristik aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan berorientasi global, PFI berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru yang memperluas basis ekonomi Bali di luar sektor pariwisata konvensional.

Ekonomi kreatif dan digital juga memiliki prospek yang kuat sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang perekonomian Bali. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia memberikan peluang bagi Bali untuk mengembangkan industri kreatif berbasis digital, seperti pengembangan aplikasi, konten digital, animasi, desain kreatif, maupun berbagai jasa profesional berbasis teknologi. Berbeda dengan sektor konvensional, ekonomi digital memungkinkan penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam maupun kunjungan wisatawan. Selanjutnya, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan berbagai inisiatif ekonomi hijau dapat menjadi katalis pertumbuhan baru yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Selain menciptakan peluang investasi baru dan lapangan kerja hijau (*green jobs*), pengembangan ekonomi hijau juga berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan dan memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Selanjutnya, pengembangan berbagai sumber pertumbuhan baru tersebut perlu didukung oleh peningkatan konektivitas antarkawasan. Dalam konteks ini, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas

antara Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk utama Bali dengan pusat-pusat ekonomi di wilayah selatan. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta memperkuat integrasi rantai pasok sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan. Selain itu, pengembangan sistem transportasi publik modern melalui perluasan layanan BRT, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta rencana implementasi Autonomous Rail Transit (ART) yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan berbagai destinasi utama di Bali akan mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan secara lebih efisien. Perbaikan konektivitas tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tarik investasi dan mempercepat munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Bali. Berbagai program pembangunan tersebut perlu diimplementasikan dengan memperhatikan asas keberlanjutan yang sejalan dengan asas Tri Hita Karana.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi menuju potensinya dengan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan sektor basis yang perlu diperkuat, yaitu pertanian (tabama, peternakan, perikanan), konstruksi, dan perdagangan, serta pengembangan sektor potensial yaitu perikanan dan hilirisasinya, jasa kesehatan, ekonomi kreatif dan digital, serta ekonomi hijau. Sebagai katalisator, diperlukan juga penguatan infrastruktur konektivitas dan inovasi pembiayaan investasi untuk menutup *gap* pertumbuhan terhadap rata-rata kinerja prapandemi. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat diversifikasi ekonomi Bali, meningkatkan resiliensi terhadap guncangan eksternal, memperluas penciptaan nilai tambah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif

Gambar B1.2. Mapping Sektor Basis Progresif di Provinsi Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B1.3. Forward Backward Linkage di Provinsi Bali



Sumber: BPS, diolah

dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Secara keseluruhan, upaya menutup gap pertumbuhan terhadap rata-rata kinerja prapandemi memerlukan kombinasi strategi antara penguatan sektor basis dan pengembangan mesin pertumbuhan baru. Penguatan sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan perlu dilakukan untuk mengembalikan kapasitas pertumbuhan yang telah terbukti menopang ekonomi Bali. Di saat yang sama, pengembangan

industri perikanan terintegrasi, jasa kesehatan berbasis KEK Sanur, ekonomi kreatif dan digital, ekonomi hijau, serta penguatan sektor jasa keuangan berpotensi memperluas basis ekonomi dan meningkatkan nilai tambah daerah. Dengan dukungan infrastruktur konektivitas, inovasi pembiayaan, dan implementasi pembangunan yang sejalan dengan prinsip Tri Hita Karana, strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan resiliensi, inklusivitas, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali dalam jangka menengah dan Panjang.



BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 sebesar 3,27% (yoy), meningkat dari triwulan I 2026 (2,81%; yoy), namun masih terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau dan Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Kota Denpasar mengalami inflasi tertinggi diikuti Kabupaten Tabanan, dan Singaraja. Sementara itu Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.



Inflasi Bulanan Bali

0,71%

Juni 2026, mtm



Inflasi Tahunan Bali

3,27%

Juni 2026, yoy



Rerata 3 Tahun Bali

2,97%

Juni 2026, yoy



Inflasi Tahun Kalender Bali

2,06%

Juni 2026, ytd

GAMBARAN UMUM

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 sebesar 3,27% (yoy), meningkat dari triwulan I 2026 (2,81%; yoy), namun masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi seiring konflik geopolitik di timur tengah. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau dan Kelompok Transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Kota Denpasar mengalami inflasi tertinggi diikuti Kabupaten Tabanan, dan Singaraja. Sementara itu Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.

2.1. PERKEMBANGAN INFLASI

Provinsi Bali pada triwulan II 2026 (Juni 2026) mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 2,81% (yoy). Inflasi tahunan didorong oleh seluruh kelompok pengeluaran, utamanya kelompok transportasi (5,87% yoy), kelompok makanan, minuman dan tembakau (4,03%, yoy), kelompok pakaian dan alas kaki (1,28%, yoy); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar (2,43%, yoy). Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi secara tahunan antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, dan minyak goreng, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/service, biaya Sekolah Menengah Atas, sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, komoditas yang menjadi sumbangan deflasi sehingga menahan inflasi lebih tinggi antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/

pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup. Secara spasial pada triwulan II 2026, secara tahunan seluruh kota/kabupaten IHK di Bali mengalami inflasi. Inflasi tahunan tertinggi di Bali terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,46% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Tabanan sebesar 3,43% (yoy), Kota Singaraja sebesar 3,26% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan yang paling rendah di Bali sebesar 2,80% (yoy). Secara umum, inflasi tahunan Provinsi Bali pada triwulan II 2026 masih berada rentang sasaran 2,5±1% dan di bawah capaian inflasi nasional.

Dibandingkan periode sebelumnya, struktur inflasi Bali pada triwulan II 2026 menunjukkan penguatan pengaruh sektor jasa dan pariwisata terhadap pembentukan harga. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta komoditas terkait hunian seperti sewa rumah. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya mobilitas wisatawan domestik dan mancanegara pada periode libur sekolah serta mulai memasuki *peak season* pariwisata yang mendorong peningkatan permintaan berbagai jasa pendukung ekonomi Bali.

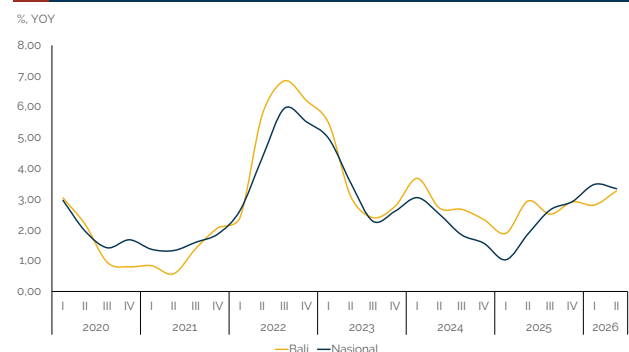
Grafik 2.1. Inflasi Provinsi Bali* (%yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, inflasi Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali* (%yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

2.2. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

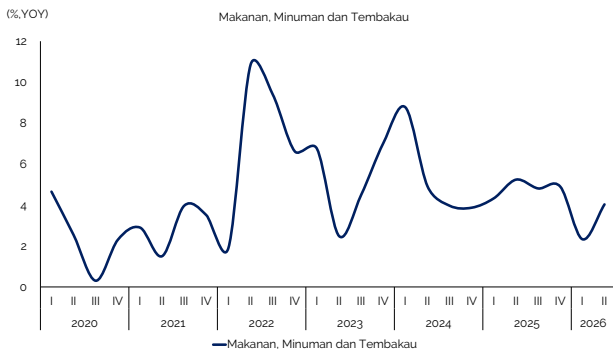
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 4,03% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan inflasi triwulan I 2026 yang sebesar 2,33% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh adanya beberapa perayaan dan event di tengah masuknya *high season* pariwisata. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan II 2026 didorong oleh bawang merah, cabai rawit, beras, minyak goreng, Sigaret Putih Mesin (SPM), cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan daging ayam ras, kue basah, dan bawang putih. Kenaikan harga bahan makanan dipicu peningkatan permintaan pada HBKN Galungan-Kuningan di tengah mulai meningkatnya kunjungan wisatawan domestik seiring dengan masuknya libur sekolah dan mulai masuknya *high season* wisatawan mancanegara, sementara naiknya harga sigaret dipengaruhi kebijakan peningkatan harga

dari produsen. Kenaikan harga sigaret oleh produsen merupakan dampak kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% pada 2023 dan 2024 serta kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025. Inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas terutama tomat dan sawi hijau yang memberikan andil deflasi didukung terjaganya ketersediaan pasokan.

KELOMPOK PAKAIAN DAN ALAS KAKI

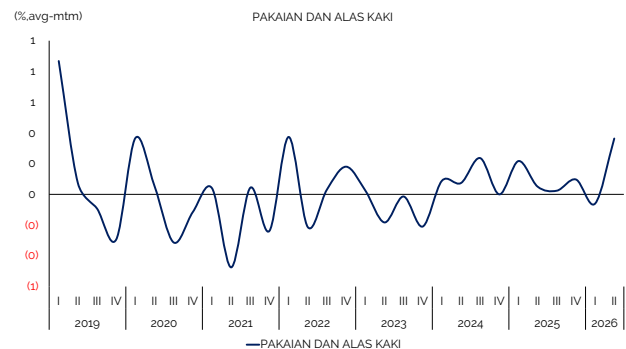
Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi 1,28% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan inflasi triwulan I 2026 yang sebesar 0,34% (yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini dipicu oleh kenaikan harga bahan baku pakaian impor seperti poliester, benang yang terdampak dari pelemahan nilai tukar dan biaya distribusi yang meningkat. Di sisi kelompok Pakaian dan Alas kaki, tekanan inflasi didorong oleh komoditas ongkos binatu/*laundry* dan baju kaos tanpa kerah/*t-shirt* pria, dan seragam sekolah anak. Di sisi lain, beberapa komoditas masih menyumbang deflasi

Grafik 2.3. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Bali*



Sumber : BPS, diolah BI

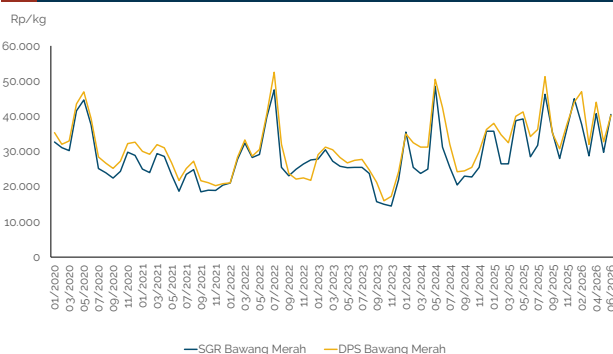
Grafik 2.5. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

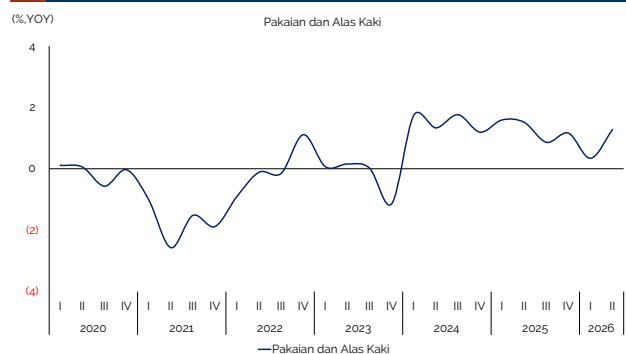
*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.4. Perkembangan Harga Bawang Merah (Rp/Kg)



Sumber : www.bi.go.id/hargapangan, diolah

Grafik 2.6. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

tahunan pada kelompok ini dan menahan peningkatan inflasi lebih tinggi, yakni celana pendek pria dan sandal karet wanita.

KELOMPOK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA

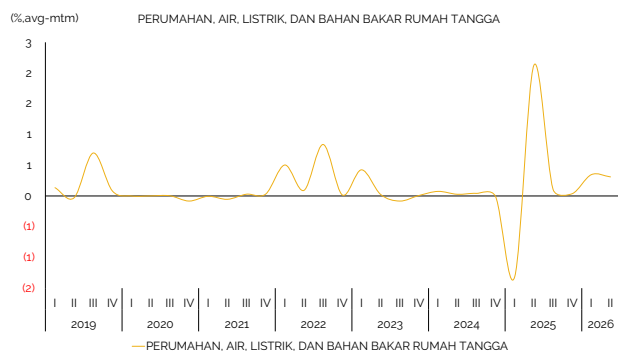
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi 2,43% (yoy) pada triwulan II 2026, menurun dibandingkan inflasi triwulan I 2026 sebesar 7,99% (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari sewa rumah, bahan bakar rumah tangga, tarif air minum PAM, dan iuran pembuangan sampah. Peningkatan tarif sewa rumah dan kontrak rumah didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap properti sewa di Bali. Kenaikan bahan bakar rumah tangga seiring dengan kenaikan harga gas LPG non-subsidi Bright gas 5,5 Kg dan 12 Kg yang resmi diberlakukan pada 18 April 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia. Selain itu, kenaikan tarif air minum PAM seiring kebijakan kenaikan tarif PDAM Tirta Hita Buleleng yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/72/HK/2026. Di samping

itu, iuran pembuangan sampah turut memberikan andil inflasi seiring dengan peningkatan biaya operasional pengelolaan sampah daerah, penyesuaian biaya pengangkutan dan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik yang meningkatkan kebutuhan sarana pengolahan. Sementara itu, peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga keramik, daun pintu, dan kayu lapis seiring permintaan yang terjaga. Inflasi yang lebih rendah juga didorong oleh berakhirnya *base effect* subsidi listrik dari tahun sebelumnya di triwulan I 2025.

KELOMPOK PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA (RT)

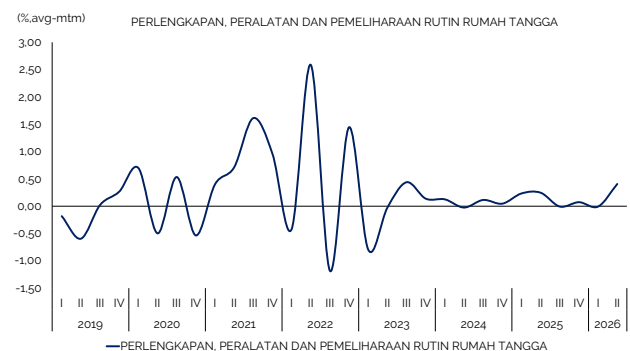
Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT mengalami inflasi 1,40% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan inflasi triwulan I 2026 yang sebesar 0,92% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh upah asisten rumah tangga, harga kasur, kipas angin, dan kompor. Peningkatan UMR di berbagai daerah di Bali pada tahun 2026 berdampak

Grafik 2.7. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

Grafik 2.9. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.8. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

terhadap kenaikan upah asisten rumah tangga. Sementara itu, kenaikan harga kasur, kipas angin, dan kompor merupakan dampak kenaikan biaya produksi dan distribusi seiring kenaikan harga BBM non-subsidi.

KELOMPOK KESEHATAN

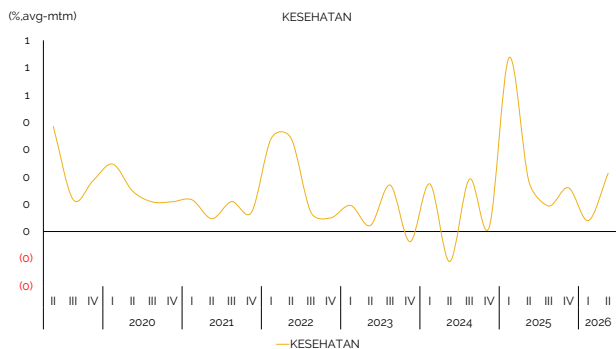
Kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,54% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan inflasi triwulan I 2026 sebesar 1,44% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga subkelompok obat-obatan dan jasa layanan kesehatan, terutama vitamin, tarif dokter spesialis, dan obat dengan resep. Peningkatan harga vitamin dan obat dengan resep dipengaruhi oleh harga bahan baku farmasi global, serta penyesuaian harga oleh distributor dan apotek. Selain itu, inflasi kelompok ini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga subkelompok jasa rawat jalan terutama tarif dokter spesialis. Peningkatan tarif tersebut sejalan dengan penyesuaian tarif layanan medis, pelayanan penunjang nonmedis, farmasi, dan pelayanan kesehatan dengan teknologi tertentu yang diatur pada Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun 2024 untuk Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit.

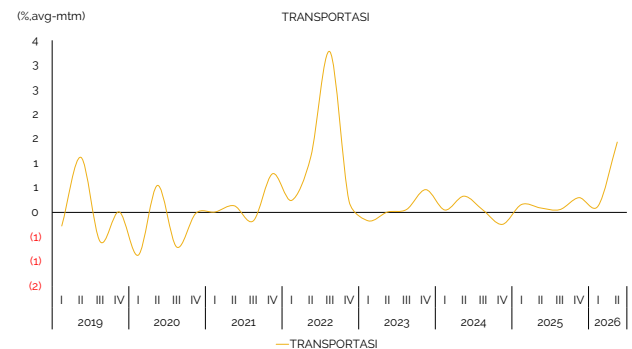
KELOMPOK TRANSPORTASI

Inflasi tahunan Kelompok Transportasi meningkat dari 1,74% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 5,87% (yoy) pada triwulan II 2026. Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok ini disumbang terutama oleh subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan, yaitu bensin, pemeliharaan/*service*; angkutan udara, tarif parkir, mobil, sepeda motor, dan pelumas/oli. Kenaikan harga bensin disebabkan oleh Kenaikan seluruh BBM Non Subsidi mulai 18 April untuk Pertamina Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dilanjutkan dengan kenaikan Pertamina dan Pertamina Green yang memberikan dampak terbesar kepada kenaikan harga bensin dari Rp 12.300/Lt menjadi Rp 16.250/Lt dan Rp 12.900/Lt menjadi Rp 17.000/Lt seiring dengan kenaikan harga minyak global. Kenaikan harga minyak global juga mempengaruhi tarif angkutan udara dan harga pelumas/oli. Selanjutnya, kenaikan

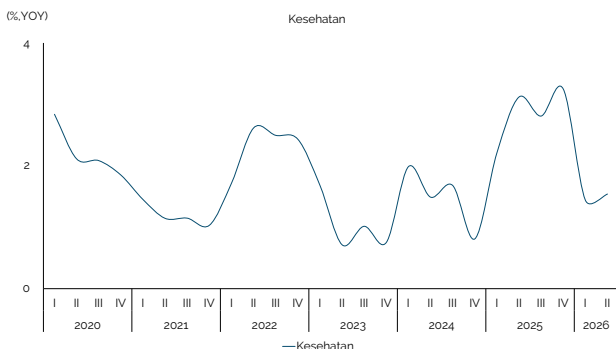
Grafik 2.11. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



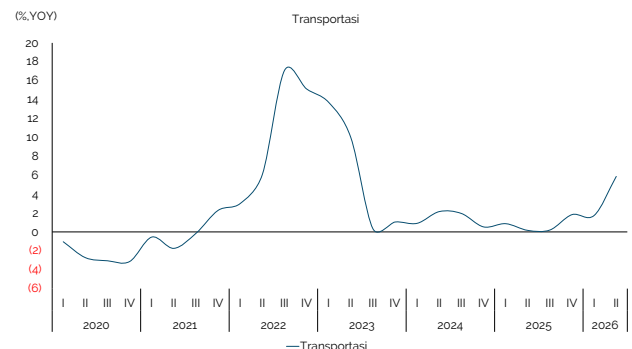
Grafik 2.13. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Grafik 2.12. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; yoy)



Grafik 2.14. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; yoy)



biaya pemeliharaan/*service* kendaraan sejalan dengan peningkatan biaya tenaga kerja teknis dan harga suku cadang. Sementara itu, peningkatan tarif parkir sejalan dengan penyesuaian tarif parkir terbaru di Kabupaten Badung melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagi kendaraan roda dua hingga roda empat sejak Januari 2026. Selain itu, harga mobil dan sepeda motor mencatat kenaikan tahunan yang didorong oleh penyesuaian harga suku cadang dan peningkatan permintaan kendaraan pribadi sejalan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

KELOMPOK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

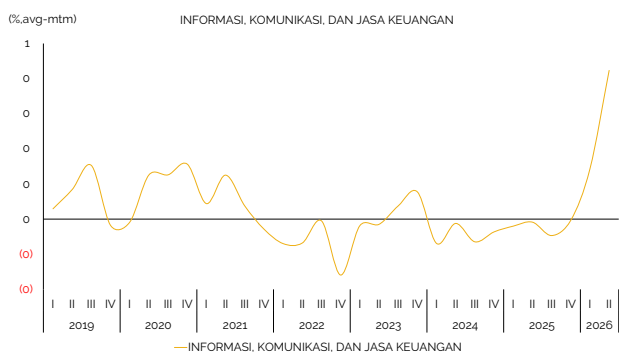
Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi tahunan pada triwulan II 2026 sebesar 1,56% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,24% (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari subkelompok

peralatan informasi dan komunikasi dengan komoditas yang dominan memberikan inflasi, yaitu laptop/notebook dan telepon seluler seiring kebijakan kenaikan harga tahunan di tingkat produsen yang berkaitan dengan strategi penjualan serta kenaikan bahan baku utamanya harga chip global yang meningkat seiring peningkatan permintaan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang *artificial intelligence*.

KELOMPOK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami inflasi 0,43% (yoy) pada triwulan II 2026, berbeda arah dibandingkan inflasi triwulan I 2026 yang sebesar -0,38% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga seiring dengan peningkatan permintaan perlengkapan sekolah memasuki libur pertengahan tahun seperti tas sekolah. Kenaikan juga terjadi pada makanan hewan peliharaan terimbas dari biaya impor yang meningkat seiring dengan kenaikan biaya distribusi.

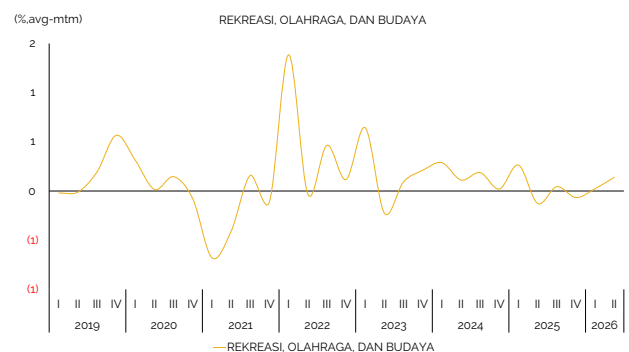
Grafik 2.15. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

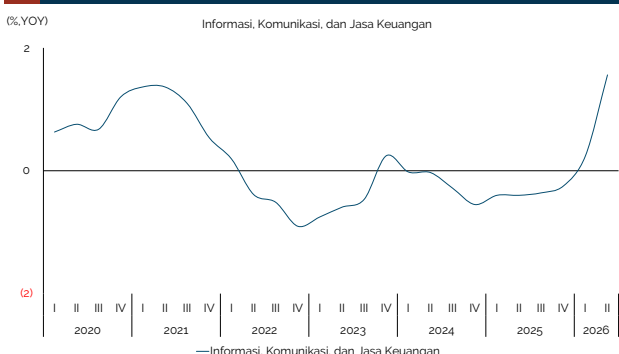
Grafik 2.17. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

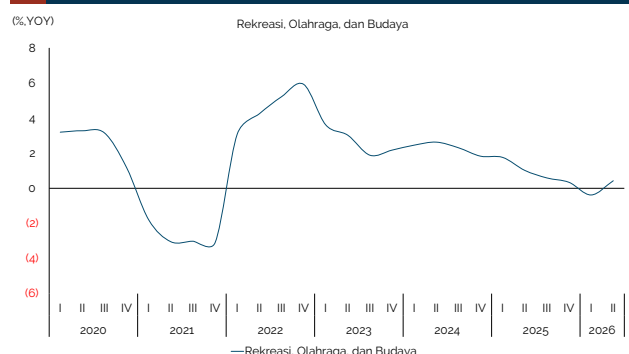
Grafik 2.16. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

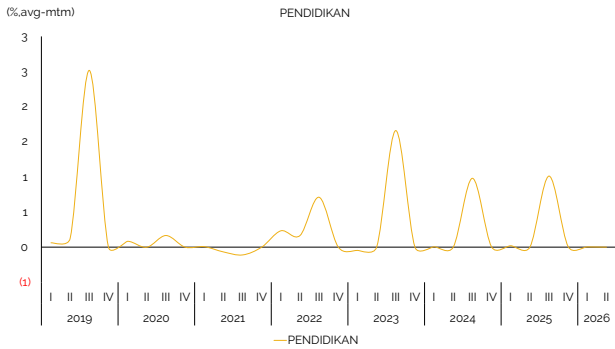
*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.18. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; yoy)



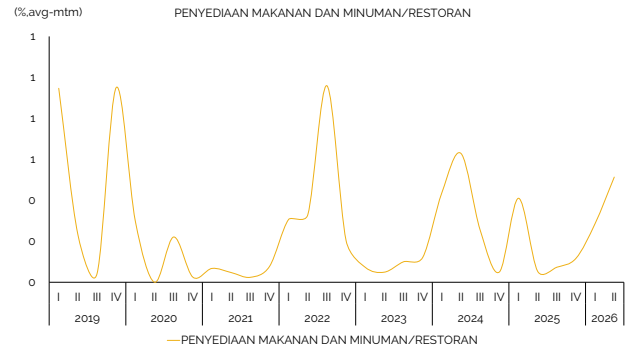
Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.19. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)

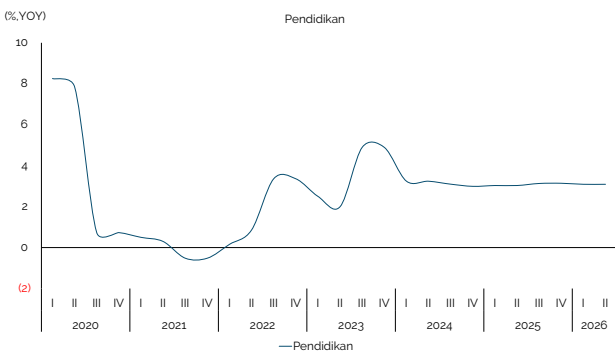
Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.21. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; avg-mtm)

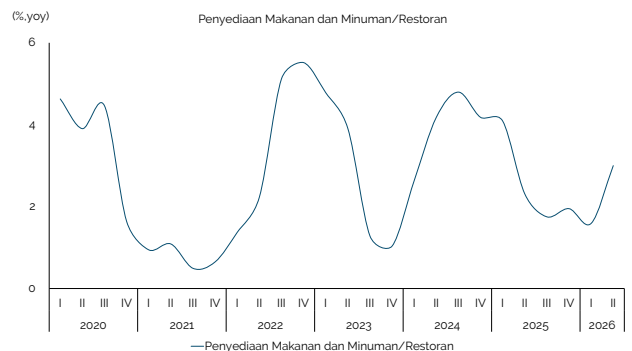
Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.20. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; yoy)

Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.22. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; yoy)

Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

KELOMPOK PENDIDIKAN

Inflasi Kelompok Pendidikan pada triwulan II 2026 sebesar 3,09% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan capaian pada triwulan I 2026 sebesar 3,09% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini dikontribusi oleh biaya Sekolah Menengah Atas, bimbingan belajar, biaya Sekolah Dasar, biaya Akademi/Perguruan Tinggi, serta biaya Sekolah Menengah Pertama. Inflasi tahunan sejalan dengan pelaksanaan tahun ajaran baru 2025-2026, yang umumnya disertai dengan penyesuaian tarif pendidikan, baik dari sisi biaya administrasi, sumbangan pendidikan, maupun layanan penunjang seperti bimbingan belajar atau kursus tambahan. Namun capaian yang stabil seiring dengan belum dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027.

KELOMPOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN

Tekanan inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran meningkat dari 1,59% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 3,00% (yoy) pada triwulan II 2026. Komoditas yang menyumbang peningkatan

inflasi antara lain pepes, nasi dengan lauk, es, ayam goreng, martabak, sate, dan soto. Peningkatan tekanan inflasi kelompok ini disebabkan oleh peningkatan harga beberapa bahan baku makanan jadi di tengah peningkatan permintaan pada periode libur sekolah.

KELOMPOK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA

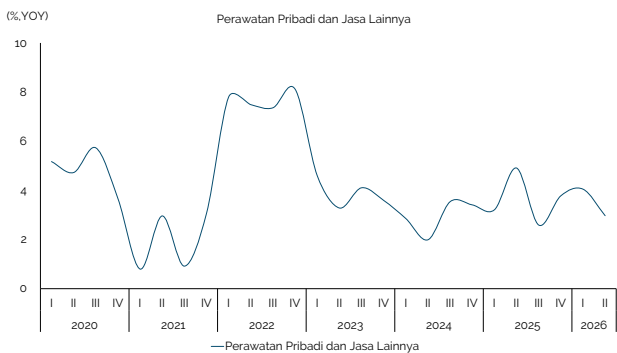
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi 2,97% (yoy) pada triwulan II 2026, menurun dari 4,05% (yoy) pada triwulan I 2026. Tekanan inflasi pada triwulan ini dipicu kenaikan harga emas perhiasan, canang sari, bedak, sabun mandi, dan popok bayi sekali pakai/*diapers*. Kenaikan harga emas perhiasan dipicu peningkatan harga emas global sebagai aset *safe haven* di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu kenaikan harga pasta gigi, sabun mandi, bedak, dan popok bayi sekali pakai/*diapers*, dipengaruhi kenaikan harga dari distributor. Lebih lanjut kenaikan harga canang sari didorong oleh peningkatan permintaan menjelang HBKN Galungan-Kuningan.

Grafik 2.23. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI *sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.24. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI *sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

2.3. INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN

Secara spasial pada triwulan II 2026, tekanan inflasi secara tahunan di tiga dari empat kota/kabupaten IHK di Bali meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Kabupaten Badung mengalami inflasi tahunan (yoy) paling rendah di Bali, sementara Kota Denpasar dan Tabanan mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling tinggi di Bali. Inflasi yang lebih tinggi di Denpasar dan Tabanan dibandingkan Badung mengindikasikan bahwa kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh

aktivitas ekonomi di lokasi utama pariwisata, tetapi juga oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa, biaya distribusi, serta aktivitas perdagangan dan konsumsi di wilayah penyangga. Berdasarkan komoditasnya, bensin, emas perhiasan, dan beras merupakan penyumbang utama (10 andil tertinggi) inflasi tahunan di hampir seluruh kota/kabupaten IHK. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi di keempat kota/kabupaten IHK tertahan oleh penurunan harga sawi hijau dan daging babi yang masuk menjadi 10 penyumbang deflasi tahunan terdalam di hampir seluruh kota/kabupaten IHK.

KOTA DENPASAR

Pada triwulan II 2026, inflasi Denpasar sebesar **3,46% (yoy)** atau lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi **3,02% (yoy)**. Peningkatan inflasi tahunan tersebut terutama bersumber dari delapan kelompok pengeluaran, yaitu makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara itu kelompok pengeluaran yang inflasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya di antaranya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Denpasar antara lain bensin, emas perhiasan, beras, sewa rumah, biaya pendidikan SMA, cabai rawit, Sigaret Putih Mesin (SPM), nasi dengan lauk,

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2023				2024				2025				2026	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	5.50	3.27	2.31	2.54	3.43	3.18	2.99	2.69	2.53	3.30	3.42	3.45	3.02	3.46
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.85	3.15	4.31	6.36	7.53	4.42	2.79	2.40	4.07	4.51	6.56	5.50	2.78	4.32
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	(0.12)	(0.09)	(0.21)	(1.61)	(0.47)	(0.22)	0.73	1.05	1.47	1.42	0.30	0.41	(1.02)	0.22
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	4.02	3.82	0.94	0.93	0.10	0.02	0.56	0.55	(3.82)	2.17	1.99	2.28	7.61	2.71
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	6.83	(1.12)	3.64	(0.46)	0.89	0.99	2.06	1.68	1.77	2.84	2.28	2.64	1.64	1.80
KESEHATAN	1.89	0.72	1.12	0.82	0.21	(1.39)	(0.97)	(0.72)	3.16	5.40	4.95	5.28	1.57	2.66
TRANSPORTASI	13.58	9.70	0.14	1.07	1.15	3.90	3.51	2.11	1.96	0.06	0.14	1.41	0.80	5.20
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	(0.86)	(0.67)	(0.55)	0.23	0.24	0.14	(0.37)	(0.88)	(0.85)	(0.76)	(0.44)	(0.10)	(0.39)	0.32
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	3.02	2.31	1.40	1.91	1.74	2.51	3.05	1.81	1.74	0.29	(0.25)	0.60	(0.31)	0.85
PENDIDIKAN	2.71	2.16	5.27	5.27	6.12	6.12	4.03	4.03	4.00	4.00	4.31	4.31	4.32	4.32
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	5.01	4.22	1.36	1.07	3.85	7.29	8.58	8.33	7.58	4.15	2.94	3.08	1.52	3.92
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	4.37	2.92	3.81	3.35	3.69	2.72	4.19	4.73	4.32	7.63	5.23	5.44	6.30	3.21

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2023				2024				2025				2026	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	5,25	1,87	3,03	4,31	3,71	2,14	1,78	1,93	1,09	2,79	2,39	2,51	3,40	3,26
MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	6,28	(0,49)	5,38	10,12	10,38	5,33	3,74	4,93	3,34	5,79	5,07	4,70	3,00	4,18
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1,03	1,41	1,18	1,25	1,10	0,56	0,53	0,91	0,99	1,32	1,78	1,27	1,28	1,01
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	5,37	5,04	2,71	2,58	0,06	0,19	0,12	0,31	(5,49)	0,14	0,09	(0,05)	8,76	2,89
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,27	(7,24)	(0,55)	(3,28)	(1,92)	(1,59)	(0,23)	(0,34)	0,43	0,70	0,20	1,03	0,33	0,48
KESEHATAN	0,56	0,67	0,47	0,41	1,87	2,64	3,36	4,06	2,47	3,10	2,26	2,92	3,06	1,63
TRANSPORTASI	14,65	12,16	1,72	0,84	0,16	(0,37)	(0,79)	(1,20)	0,07	0,67	0,81	1,38	1,56	4,14
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0,09	0,00	0,18	0,27	(0,76)	(0,60)	(0,96)	(1,02)	(0,31)	(0,11)	(0,34)	(0,35)	0,95	1,03
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	7,65	7,87	5,06	3,89	2,00	1,73	1,89	3,01	2,88	1,82	1,43	0,14	(0,02)	(0,59)
PENDIDIKAN	(0,19)	(0,19)	(0,20)	(0,20)	(0,18)	(0,18)	1,30	1,42	1,42	1,42	1,46	1,34	1,34	1,34
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2,61	0,92	0,59	0,66	1,04	1,88	1,88	1,58	1,57	0,33	0,38	0,27	2,32	3,12
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	6,12	5,76	6,05	5,22	2,76	2,70	3,82	4,05	4,27	5,15	3,70	5,71	6,24	5,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

pepes, angkutan udara, kue basah, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, biaya bimbingan belajar, canang sari, pepaya, daging babi, daging ayam ras, dan cabai merah. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: sawi hijau, tomat, buncis, labu siam/jipang, pasta gigi, pembalut wanita, bawang bombay, celana pendek pria, kacang panjang, ketimun, sandal karet wanita, pakcoy, sabun mandi cair, baju kaos tanpa kerah anak, air teh kemasan, tisu basah, baju muslim anak, handuk, baju anak setelan, dan baju kebaya.

KOTA SINGARAJA

Singaraja mengalami inflasi tahunan sebesar 3,26% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan pada triwulan I 2026 sebesar 3,40% (yoy). Dari 11 kelompok pengeluaran, Empat kelompok menyumbang kenaikan tekanan inflasi yakni kelompok makanan, minuman, tembakau; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; transportasi; penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara itu, terdapat 5 (lima) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan tekanan inflasi, yaitu pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kesehatan; rekreasi, olahraga, dan budaya; perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan di Singaraja disumbang terutama oleh tarif air minum PAM, beras, bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, bensin, cabai merah, pemeliharaan/service, minyak goreng, laptop/notebook, es, mobil, bawang putih, apel, ikan tongkol/ ikan ambu-

ambu, sigaret putih mesin (SPM), jeruk, sate, kue basah, dan sigaret kretek mesin (SKM).

KABUPATEN TABANAN¹

Pada triwulan II 2026, inflasi Kabupaten Tabanan tercatat sebesar 3,43% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi triwulan I 2026 yang sebesar 2,67% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi di Kabupaten Tabanan bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan tekanan inflasi atau mengalami deflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan. Sementara itu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi tahunan. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kabupaten Tabanan antara lain bawang merah, beras, bensin, tahu mentah, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, es, minyak goreng, Sigaret Putih Mesin (SPM), mie kering *instant*, pemeliharaan/service, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), laptop/notebook, telepon seluler, biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas, tongkol diawetkan, tempe, emas perhiasan, telur ayam ras, dan cabai merah. Sementara komoditas yang mengalami deflasi tahunan terdalam antara lain tomat,

1. Dalam perhitungan inflasi, Kabupaten Tabanan baru masuk menjadi kota IHK pada tahun 2024.

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Tabanan per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2024				2025				2026	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	3.95	1.96	2.98	2.44	1.84	3.38	1.88	2.70	2.67	3.43
MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	7.86	3.90	6.15	5.17	5.28	6.52	2.79	4.53	2.28	4.43
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	6.58	2.80	1.29	0.64	1.88	2.38	1.96	1.72	0.52	2.70
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	(0.74)	(0.66)	(0.56)	0.71	(7.73)	0.82	2.04	2.09	11.73	3.70
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	(2.01)	(1.23)	(1.76)	(0.71)	0.95	1.44	1.71	(0.57)	(0.67)	1.11
KESEHATAN	2.57	2.84	2.51	2.21	1.92	1.34	1.34	1.02	(0.06)	0.22
TRANSPORTASI	1.49	1.48	1.40	(0.45)	0.65	(0.18)	0.23	1.04	0.68	4.98
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	(0.37)	(0.37)	(0.27)	(0.06)	(0.15)	(0.70)	(0.90)	(0.95)	1.52	3.91
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	4.98	4.98	2.56	3.04	2.50	2.14	1.37	0.46	(0.89)	0.40
PENDIDIKAN	0.59	0.59	2.25	2.25	2.72	2.72	4.13	4.21	3.73	3.73
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	3.71	2.89	3.04	0.75	1.72	1.62	1.50	2.44	1.71	2.47
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	3.27	(0.31)	2.10	2.02	2.12	4.19	0.58	1.51	0.52	1.03

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah BI

sawi hijau, canang sari, sabun cair/cuci piring, daging babi, kangkung, buncis, masker, kacang panjang, terong, buku tulis bergaris, susu bubuk untuk balita, jagung manis, susu bubuk untuk bayi, celana panjang *jeans* pria, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sabun mandi cair, sabun detergen bubuk, *hand body lotion*, dan lipstik.

KABUPATEN BADUNG²

Pada triwulan II 2026, inflasi Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,80% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,09% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi di Kabupaten Badung bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, kelompok yang mengalami penurunan tekanan inflasi atau deflasi yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok kesehatan. Sementara itu, kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan tekanan inflasi tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kabupaten Badung antara lain komoditas bensin, cabai rawit, bawang merah, tarif parkir, daging ayam ras, pemeliharaan/service, angkutan udara, minyak goreng, telepon seluler, jeruk, ayam goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), telur ayam ras, Sigaret Putih Mesin (SPM), iuran pembuangan sampah, bawang putih, pasir, ikan teri, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, pasta gigi, dan wortel. Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi tahunan terdalam antara lain daging babi, tomat, sawi hijau, buncis, beras, buku tulis bergaris, sabun detergen bubuk, bayam, kacang panjang, kangkung, pembalut wanita, masker, bahan bakar rumah tangga, ban luar motor, susu bubuk untuk bayi, deodorant, rampela hati

2. Dalam perhitungan inflasi, Kabupaten Badung baru menjadi kota IHK pada tahun 2024.

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Kabupaten Badung per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2024				2025				2026	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	Yoy
UMUM	3.92	2.75	2.53	1.98	1.32	2.11	1.32	2.37	2.09	2.80
MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	10.11	6.07	4.39	5.06	4.79	5.04	3.41	4.42	1.22	3.20
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	3.87	4.59	5.87	2.27	2.14	1.19	0.49	2.34	2.67	2.88
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.76	0.99	0.94	0.04	(4.37)	0.65	1.15	1.32	6.21	0.89
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0.34	-0	0.01	0.51	0.30	1.20	1.07	0.99	0.55	1.36
KESEHATAN	5.04	5.05	4.80	0.12	0.53	0.33	0.45	1.49	0.97	0.29
TRANSPORTASI	0.56	0.54	0.83	(1.21)	(0.97)	0.15	(0.20)	3.77	4.96	9.61
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.35	0.35	0.35	0.07	0.07	0.07	0.05	(0.02)	(0.02)	2.56
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	2.56	1.92	0.92	0.11	0.38	1.17	1.21	(0.16)	(0.42)	0.35
PENDIDIKAN	0.80	0.80	2.49	2.01	2.01	2.01	1.00	1.03	1.03	1.03
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0.59	0.48	0.54	0.22	0.40	0.31	0.35	0.35	1.17	1.33
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	1.19	1.85	3.24	1.65	1.33	0.51	(1.36)	1.05	0.91	2.16

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah BI

ayam, pengharum cucian/pelembut, detergen cair, dan sepatu pria.

2.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Pada Triwulan II 2026, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali serta TPID Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut diimplementasikan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Pelaksanaan GPIPS di Provinsi Bali sepanjang Semester I 2026 menunjukkan capaian yang positif dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sinergi pengendalian inflasi dilaksanakan dengan mengacu pada strategi **4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif**. Adapun implementasi strategi 4K oleh TPID se-Bali adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. **Optimalisasi peran Perumda Pangan dan Perumda Pasar** sebagai pemasok dan agregator komoditas dalam pasar murah, termasuk melalui pengoperasian gerai inflasi sebagai referensi harga dan saluran distribusi pangan. Pelaksanaan pasar murah juga diperkuat melalui kolaborasi dengan desa/banjar untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan ketepatan sasaran.
- b. **Intensifikasi pelaksanaan operasi pasar/pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Bali.** Sepanjang Semester I 2026 telah dilaksanakan 350 kali pasar murah dengan komoditas utama berupa beras, minyak goreng, gula pasir, daging

ayam ras, LPG, aneka cabai, dan aneka bawang. Komoditas dipasarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi harga pangan. Kegiatan pasar murah dan operasi pasar dilaksanakan sebagaimana pada Tabel 2.5.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. **Penguatan produktivitas melalui optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP)** pada komoditas padi, bawang merah, serta cabai rawit melalui dukungan sarana dan prasarana berupa *hand tractor*, *power thresher*, *rice transplanter*, *cultivator*, dan *drone sprayer*. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi budidaya, produktivitas, dan kontinuitas produksi pangan.
- b. **Penguatan hilirisasi dan replikasi *best practice* klaster pangan**, antara lain melalui pelatihan pengolahan cabai kepada Kelompok Wanita Tani (KWT), pendampingan digitalisasi UMKM olahan cabai, serta pengembangan *digital farming* melalui pemanfaatan *drone sprayer*. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta memperkuat penyerapan komoditas pangan lokal.
- c. **Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pangan** melalui pelatihan budidaya organik dan *precision farming* kepada kelompok tani. Pelatihan diarahkan pada efisiensi penggunaan input, penerapan budidaya ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas.
- d. Pelaksanaan panen bawang merah dan jagung serentak di Kota Denpasar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat setempat.

Tabel 2.5. Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Provinsi Bali Periode Semester I 2026

Keterangan	Jumlah
Frekuensi Operasi Pasar / Pasar Murah	350
Komoditas	Volume
Beras (kg)	37.250
Cabai Merah (kg)	5.977
Cabai Rawit (kg)	14.656
Bawang Merah (kg)	4.630
Bawang Putih (kg)	1.741
Daging Ayam (kg)	6.577
Gas LPG 3 kg (tabung)	2.400
Gula Pasir (kg)	4.050
Minyak Goreng (liter)	8.939

Sumber: TPID se-Bali, diolah BI

- e. Pelaksanaan panen jagung serentak di Gianyar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat setempat.
3. **Kelancaran Distribusi**
 - a. Penguatan kerja sama antarwilayah melalui penandatanganan Kerjasama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dengan salah satu fokus program prioritas adalah penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi.
 - b. **Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** untuk mendukung kesinambungan pasokan pangan. Hingga Juni 2026, perdagangan B2B telur ayam dari Kabupaten Bangli ke NTT telah mencapai **3,41 juta butir**. Selain itu, sepanjang Semester I 2026 telah terbentuk sejumlah kerja sama baru yang melibatkan Perumda/BUMDes, antara lain untuk komoditas beras, telur ayam, dan hortikultura.
 - c. **Penyediaan subsidi distribusi oleh Pemkab Klungkung berupa subsidi ongkos angkut ke Nusa Penida** untuk komoditas beras, gula, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih guna menekan biaya logistik dan menjaga kelancaran pasokan.
4. **Komunikasi Efektif**
 - a. Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID se-Baligusra pada 27 Juli 2026 dengan kesepakatan utama yaitu (i) peningkatan produksi dan produktivitas di tengah tantangan EL-nino dan (ii) mendorong efektivitas dan kelancaran distribusi serta rantai pasok kebutuhan pangan di Baligusra
 - b. **Penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan sinergi kelembagaan TPID** melalui pelaksanaan **High Level Meeting (HLM) Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dengan fokus antara lain antisipasi tekanan inflasi menjelang HBKN, stabilisasi harga, ketahanan pangan, serta kelancaran pasokan.
 - c. **Penguatan digitalisasi informasi pangan**, antara lain melalui pemanfaatan *running text* di pasar dan penyebaran informasi operasi pasar murah melalui media sosial dan radio, termasuk himbauan untuk belanja bijak dan diversifikasi konsumsi.
 - d. **Pengendalian ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik** antara lain melalui siaran pers dan infografis perkembangan inflasi, publikasi hasil HLM, konten

Belanja Bijak, Sobat Media, dan media sosial.

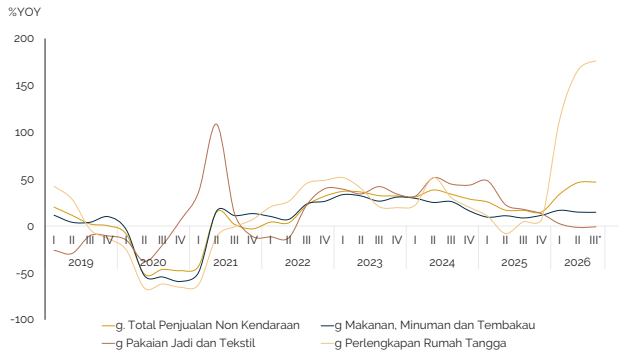
- e. **Penguatan pemanfaatan informasi neraca pangan**, termasuk melalui optimalisasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) sebagai sarana pemantauan harga dan neraca pangan serta *early warning system* untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.

2.5. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2026

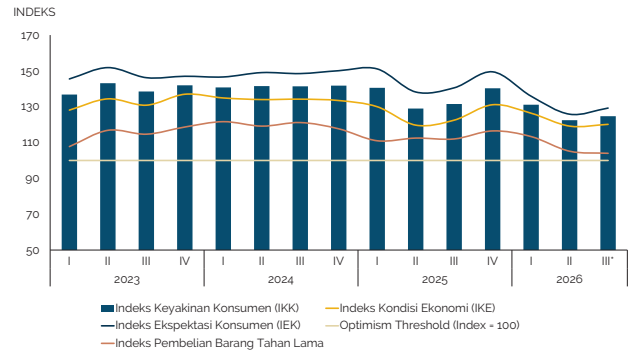
Inflasi Bali pada triwulan III 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni (i) masuknya musim kemarau panjang dengan kondisi EL-Nino hingga akhir triwulan III 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah tanaman pangan serta (ii) meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang peak season pariwisata. Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh mulai meredanya dampak tekanan konflik Timur Tengah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada komoditas-komoditas pangan bergejolak, tekanan inflasi meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya seiring ketidakpastian cuaca yang berpotensi mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura serta penurunan produksi bawang merah. Keterbatasan pasokan yang terjadi di tengah peningkatan permintaan, termasuk untuk kebutuhan *peak season*, turut mendorong kenaikan harga. Meski demikian, tekanan harga lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh peningkatan program TPID seperti pemberian bantuan pompa air dan pengaturan aliran irigasi mengantisipasi EL-nino, penyaluran beras SPHP oleh Bulog, serta pelaksanaan Gerakan pangan murah TPID di berbagai kabupaten/kota.

Pada komoditas-komoditas inflasi inti, tekanan meningkat didorong oleh kenaikan permintaan makanan jadi menjelang *peak season* dan dampak kenaikan bahan baku seiring EL-nino. Selain itu, tren kenaikan harga

Grafik 2.25. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga

Sumber : Bank Indonesia, diolah BI

Grafik 2.26. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen

Sumber : Bank Indonesia, diolah BI

global seperti emas akibat meningkatnya permintaan *safe-haven* dan kopi arabika akibat terbatasnya pasokan dari Brasil dan Vietnam dampak anomali cuaca turut mendorong inflasi. Peningkatan tekanan harga tersebut juga tercermin dalam hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan prakiraan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada triwulan III 2026 cenderung meningkat pada sejumlah kelompok komoditas (Grafik 2.27). Selain itu, kenaikan tekanan inflasi turut didukung oleh ekspektasi konsumsi masyarakat yang masih kuat. Hal ini selaras dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan nilai Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Ekspektasi Konsumen, dan Indeks Kondisi Ekonomi tetap berada di atas ambang optimis (Grafik 2.28).

Pada komoditas-komoditas yang harganya diatur pemerintah, melandainya inflasi pada triwulan III 2026 dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sejalan dengan mulai menurunnya harga BBM secara perlahan seiring dampak konflik timur tengah yang mulai melandai. Meski demikian, terdapat risiko kenaikan akibat *peak season* pariwisata seperti tarif angkutan udara.



BOKS 2



TANTANGAN PENGENDALIAN INFLASI DAN KETAHANAN PANGAN BALINUSRA SERTA ARAH PENGUATAN GERAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PANGAN SEJAHTERA (GPIPS)



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

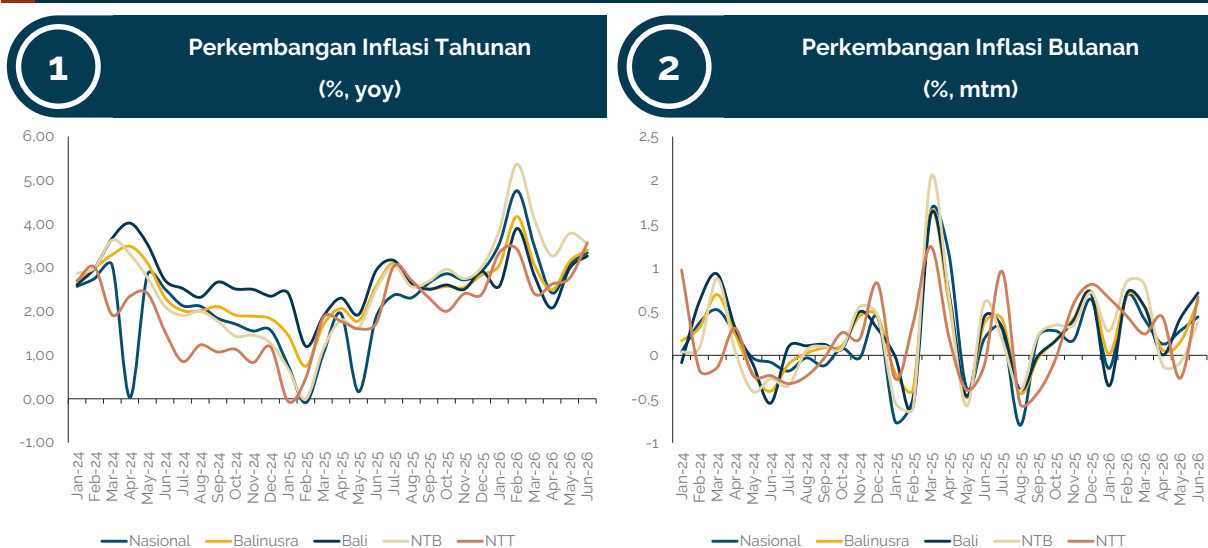


Inflasi wilayah Balinusra tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meskipun peningkatan inflasi Balinusra pada Juni 2026 menunjukkan adanya tekanan permintaan yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Tingginya mobilitas masyarakat selama HBKN, libur sekolah, dan meningkatnya kunjungan wisatawan pada periode *peak season* mendorong kenaikan

permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan dan jasa yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

Pada Juni 2026, inflasi gabungan provinsi di wilayah Balinusra tercatat sebesar 3,40% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 3,34% (yoy), namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Secara spasial, inflasi Bali, NTB, dan NTT

Grafik B2.1. Perkembangan Inflasi Balinusra dan Nasional



Sumber: BPS, diolah.

masing-masing tercatat sebesar 3,27% (yoy), 3,55% (yoy), dan 3,57% (yoy). Sementara secara bulanan, inflasi Balinusra meningkat dari 0,15% (mtm) pada Mei 2026 menjadi 0,62% (mtm) pada Juni 2026, terutama sejalan dengan meningkatnya permintaan pada periode HBKN, libur sekolah, dan *peak season* pariwisata.

Besarnya peran pangan dalam struktur konsumsi menyebabkan stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga inflasi Balinusra. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki bobot sekitar 33% dalam keranjang inflasi Balinusra, tertinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Beras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang merah merupakan komoditas pangan dengan bobot relatif tinggi dalam keranjang inflasi. Sementara itu, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan bawang merah termasuk komoditas yang memiliki volatilitas harga relatif tinggi. Oleh karena itu, bawang merah dan cabai rawit menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengendalian inflasi pangan karena memiliki kombinasi bobot dan volatilitas yang tinggi. Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1, inflasi Balinusra secara umum bergerak searah dengan inflasi nasional, meskipun berada pada level yang sedikit lebih tinggi pada beberapa periode.

Pengendalian inflasi pangan Balinusra ke depan masih dihadapkan pada tantangan dari sisi produksi, perubahan iklim, serta efisiensi rantai pasok. Dari sisi produksi, berkurangnya luas lahan pertanian dan terbatasnya regenerasi petani berpotensi menurunkan

kapasitas produksi pangan domestik dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan sensitivitas harga pangan terhadap gangguan pasokan, terutama pada komoditas hortikultura yang memiliki karakteristik produksi musiman dan relatif mudah terdampak oleh perubahan cuaca.

Kondisi tersebut meningkatkan urgensi regenerasi petani yang disertai dengan penerapan teknologi pertanian modern untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Risiko tersebut turut meningkat sejalan dengan dinamika iklim. Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia akan menghadapi El Nino dengan intensitas moderat hingga sangat kuat pada paruh kedua 2026 hingga awal tahun 2027. Hal tersebut diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian, terutama komoditas tanaman bahan makanan seperti beras.

Di samping tantangan produksi, ketergantungan terhadap pasokan antarwilayah dan tingginya biaya distribusi menjadi titik kritis ketahanan pangan Balinusra. Pada semester I 2026, arus pasokan dari luar daerah masih memiliki peran besar dalam pemenuhan sejumlah komoditas pangan strategis. Secara agregat Balinusra, *share* volume komoditas yang masuk dibandingkan kebutuhan konsumsi tercatat sebesar 104,39% pada bawang putih, 56,30% pada cabai merah, 88,19% pada bawang merah dan 28,15% pada beras. Kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, sehingga kelancaran konektivitas antardaerah menjadi

Tabel B2.1. Share Volume Masuk terhadap Total Kebutuhan Pangan Balinusra Semester I 2026

Komoditas	Share Volume Masuk terhadap Kebutuhan
Bawang Putih	104,39%
Cabai Merah	56,30%
Bawang Merah	88,19%
Beras	28,15%

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah.

kritikal, terutama untuk komoditas yang masih memiliki ketergantungan pasokan yang tinggi dari luar wilayah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1. Tingginya share volume masuk khususnya pada bawang putih, bawang merah, dan cabai merah menunjukkan bahwa kecukupan pasokan komoditas tersebut masih sangat bergantung pada sentra produksi di luar wilayah Balinusra. Akibatnya, gangguan distribusi maupun penurunan produksi di daerah pemasok dapat secara cepat ditransmisikan menjadi tekanan inflasi di wilayah Balinusra

Tantangan distribusi juga tercermin dari rantai perdagangan yang belum sepenuhnya efisien. Hasil pembahasan Rakor TPIP–TPID menunjukkan adanya permasalahan berupa *freight imbalance*, ketidakseimbangan pasokan antardaerah, serta kapasitas BUMD pangan sebagai *offtaker* yang masih perlu diperkuat. Tingginya margin pengangkutan dan perdagangan menyebabkan terbentuknya disparitas harga yang relatif tinggi antara tingkat produsen dan konsumen. Dengan demikian, kenaikan harga di tingkat konsumen tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan sebagai produsen.

Selain itu, intervensi stabilisasi harga melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) masih perlu

diperkuat agar semakin *forward looking*, antara lain melalui pemanfaatan data harga dan neraca pangan sebagai *early warning system*.

Merespons berbagai tantangan tersebut, pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkuat menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Perubahan nomenklatur tersebut mencerminkan perluasan fokus kebijakan dari pengendalian gejolak harga jangka pendek menuju penguatan ekosistem pangan yang mendukung produktivitas, kesejahteraan petani dan nelayan, serta ketahanan pangan jangka Panjang. GPIPS memperluas pendekatan pengendalian inflasi pangan melalui penguatan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap mengacu pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pendekatan tersebut diarahkan tidak hanya untuk merespons gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasi GPIPS Nasional, GPIPS Balinusra 2026 dilaksanakan pada 27 Juli 2026 di Kabupaten Tabanan, Bali, dengan mengangkat isu peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan di tengah tantangan iklim dan dinamika

Tabel B2.1. Matriks Kesepakatan GPIPS Balinusra 2026

ISU	REKOMENDASI & TINDAK LANJUT
Regenerasi, kapasitas, dan kepastian pasar petani/nelayan	1. Pembentukan minimal 1 kelompok petani muda per provinsi; 2. Penguatan linkage dengan Perumda/BUMD/offtaker/koperasi/Horeka; 3. Business matching/Rakor KUR; serta 4. Pelatihan petani dan nelayan
Implementasi GAP dan pemanfaatan IoT dalam pertanian dan perikanan modern	1. Dukungan IoT dan alsintan modern pada sentra produksi serta optimalisasi pemanfaatan lahan nonproduktif
Mitigasi dampak dinamika cuaca terhadap produksi	1. Sekolah lapang/capacity building, 2. dukungan sarpras pengairan modern, dan 3. pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca
Penguatan Operasi Pasar/GPM yang 3T	1. Penyusunan kalender Operasi Pasar/GPM, 2. Penguatan kualitas data harga dan neraca pangan, serta 3. Peningkatan kapasitas TPID
Penguatan kelancaran distribusi dan konsumsi produk hilir	1. Piloting pengiriman melalui moda udara/laut, 2. Subsidi ongkos angkut daerah remote, 3. Perluasan KAD, serta 4. Rakor pada kabupaten/kota IHK

Sumber: Kesepakatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID Balinusra 2026, diolah.

pariwisata. Pelaksanaan GPIPS sekaligus menjadi momentum evaluasi atas kesepakatan Rakor TPIP–TPID Balinusra 2025. Berbagai tindak lanjut telah dilakukan, antara lain penguatan perlindungan lahan pertanian, pemanfaatan bibit unggul dan alsintan, pengembangan petani muda, inisiasi KAD komoditas strategis, subsidi ongkos angkut antarpulau, penguatan *offtaker*, serta perluasan *linkage* antara petani dengan SPPG dan industri pariwisata.

Rangkaian GPIPS Balinusra 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Balinusra yang menghasilkan kesepakatan penguatan strategi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kesepakatan diarahkan pada dua area utama, yaitu peningkatan produksi dan produktivitas di tengah tantangan iklim, serta peningkatan efektivitas distribusi dan rantai pasok pangan. Kedua area tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima fokus rekomendasi dan tindak lanjut hasil GPIPS Balinusra 2026 dirangkum pada Tabel 2.1.

Ke depan, komitmen implementasi kesepakatan tersebut menjadi penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi Balinusra. Dari sisi hulu, penguatan diarahkan pada regenerasi petani, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan mitigasi risiko perubahan iklim. Dari sisi hilir, kebijakan diarahkan pada penguatan intervensi

harga yang lebih *forward looking*, peningkatan kualitas data pangan, perluasan KAD dan Fasilitas Distribusi Pangan, serta penguatan konektivitas wilayah surplus dan defisit. Sinergi kebijakan secara *end-to-end* tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem pangan Balinusra yang semakin tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Pelaksanaan GPIPS Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan juga menjadi momentum penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar B2.1.

Ke depan, konsistensi implementasi berbagai kesepakatan GPIPS menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan Balinusra. Upaya pengendalian inflasi tidak lagi hanya berfokus pada stabilisasi harga saat terjadi gejolak, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi distribusi, dan penguatan kelembagaan pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi kebijakan secara hulu hingga hilir diharapkan mampu menciptakan sistem pangan Balinusra yang lebih produktif, resilien, dan adaptif terhadap berbagai tantangan struktural, termasuk perubahan iklim dan tingginya dinamika permintaan yang bersumber dari aktivitas pariwisata.

Gambar B2.1. Dokumentasi Kegiatan GPIPS Balinusra 2026





BAB III

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali.



Pertumbuhan Kredit*

*Lokasi Proyek

Tw I 2026, yoy **9,05%**

Tw II 2026, yoy **9,57%**



Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga**

**Lokasi Proyek

Tw I 2026, yoy **7,08%**

Tw II 2026, yoy **4,65%**



Pertumbuhan UMKM*

*Lokasi Proyek

Tw I 2026, yoy **5,15%**

Tw II 2026, yoy **6,11%**



Investasi

Tw I 2026, yoy **20,89%**

Tw II 2026, yoy **22,91%**



Non-Performing Loan*

*Lokasi Proyek

Tw I 2026, yoy **1,38%**

Tw II 2026, yoy **1,39%**

Stabilitas sistem keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tetap kuat dan terjaga. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, khususnya pada sektor-sektor utama yang menjadi penggerak perekonomian Bali, seperti akumasi, perdagangan, dan konstruksi, serta beberapa sektor produktif lainnya yang mendukung aktivitas pariwisata dan investasi. Pertumbuhan kredit yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dengan baik dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Untuk menjaga momentum tersebut, otoritas bersama industri perbankan terus mendorong optimalisasi fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari profil risiko kredit yang secara umum masih terkendali, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang berada pada level rendah dan kualitas kredit yang tetap sehat di berbagai segmen pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lending appetite perbankan masih terjaga, sehingga perbankan memiliki kapasitas yang memadai untuk terus menyalurkan kredit kepada sektor produktif dan masyarakat.

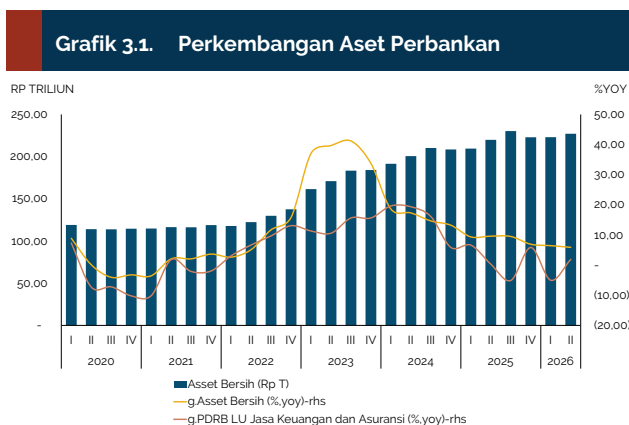
Berdasarkan penyaluran jenis kredit, peningkatan pertumbuhan kredit utamanya didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan peningkatan aktivitas usaha dan ekspansi kapasitas produksi, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini juga mengindikasikan peningkatan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi. Pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan II 2026 kembali melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan kredit konsumsi lebih mencerminkan meningkatnya kehati-hatian rumah tangga dalam mengambil pembiayaan jangka panjang dibandingkan pelemahan konsumsi secara umum. Kondisi ini terjadi di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian global serta meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam mengelola keuangan. Hasil Survei Konsumen menunjukkan bahwa tingkat keyakinan konsumen masih berada pada zona optimis, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali tetap terjaga.

Ke depan, upaya mendorong diversifikasi dan pemerataan pembiayaan menjadi penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, mengurangi konsentrasi kredit pada sektor tertentu, serta memperkuat dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, sistem keuangan daerah tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas, tetapi juga semakin optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih resilien terhadap berbagai risiko eksternal.

3.1. KINERJA PERBANKAN

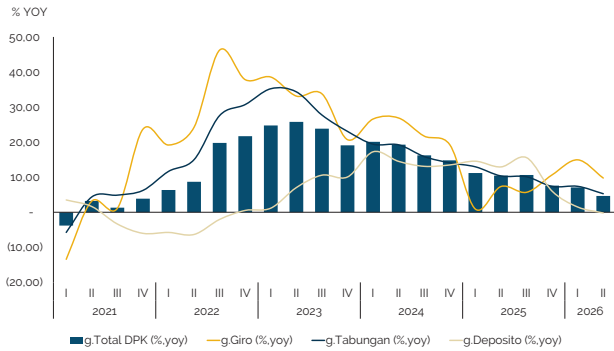
Pada triwulan II 2026, kinerja bank umum di Bali tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2026. Pertumbuhan aset tercatat sebesar 5,91% (yoy), melambat dibandingkan

capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,46% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang belum meningkat secara signifikan seiring moderasi aktivitas ekonomi. Secara historis, pertumbuhan aset mencapai puncaknya pada 2023 seiring meningkatnya aktivitas sektor keuangan, namun selanjutnya mengalami normalisasi. Meskipun pertumbuhan PDRB lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sempat melambat pada 2025, peningkatan aset yang tetap terjaga menunjukkan fundamental sektor keuangan yang masih kuat dan berpotensi mendukung pemulihan kinerja sektor ke depan.



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.2. Perkembangan DPK Perbankan



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

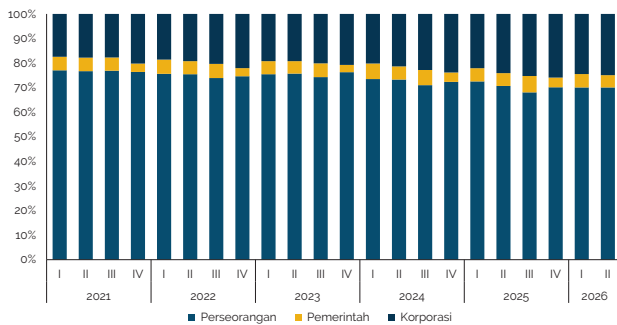
3.1.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,65% (yoy), melambat dibandingkan kinerja pertumbuhan DPK triwulan sebelumnya sebesar 7,08% (yoy). Pertumbuhan DPK yang masih positif menunjukkan likuiditas domestik di Bali tetap kuat dan mampu menopang ekspansi kredit yang berkelanjutan. Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh pertumbuhan tabungan dan kinerja deposito yang berkontraksi. Hal ini mencerminkan penyesuaian preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi lain

dan mengindikasikan peningkatan penggunaan dana untuk jangka pendek. Sementara itu, pertumbuhan giro yang tetap positif mengindikasikan aktivitas ekonomi dan transaksi usaha di Bali masih terjaga. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan giro tercatat sebesar 9,76% (yoy) dan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan jenis DPK lainnya. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang didorong oleh berbagai penyelenggaraan *event*, kegiatan MICE, serta momentum libur sekolah yang berlangsung pada periode tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut mendorong intensitas transaksi pembayaran dan kebutuhan likuiditas pelaku usaha, sehingga menopang pertumbuhan giro. Secara keseluruhan, kondisi DPK di Bali masih berada pada level yang memadai meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat.

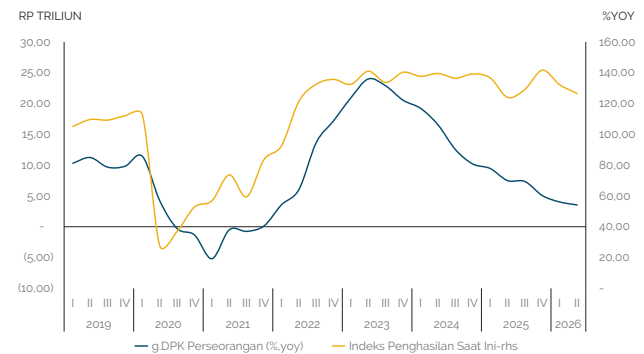
Pada triwulan II 2026, kepemilikan DPK di Bali masih didominasi oleh DPK perseorangan. Pangsa DPK perseorangan tercatat sebesar 60,81% dari total DPK, relatif stabil dibandingkan pangsa pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pangsa DPK korporasi dan

Grafik 3.3. Pangsa Kepemilikan DPK



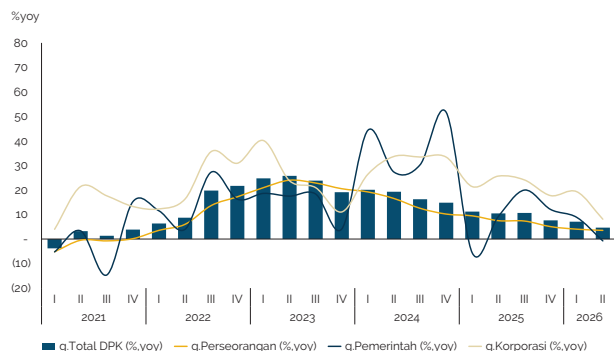
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan Saat Ini



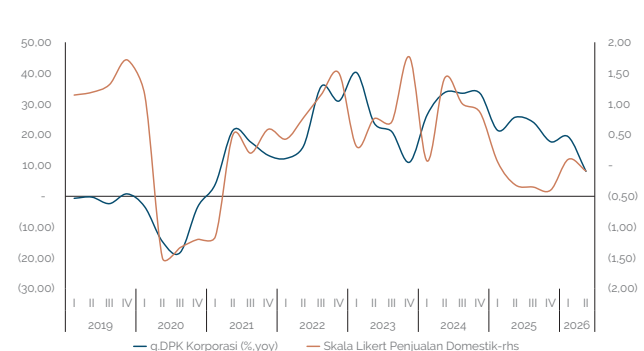
Sumber: Laporan Bank Umum BI dan BPS (diolah)

Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

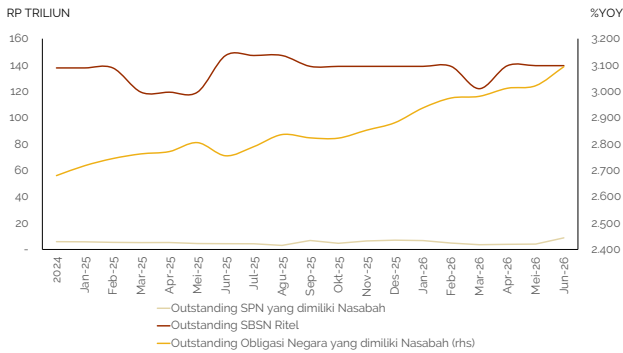


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.6. Perkembangan DPK Perseorangan dan Skala Likert Penjualan Domestik



Sumber: Laporan Bank Umum dan Laporan Liaison BI (diolah)

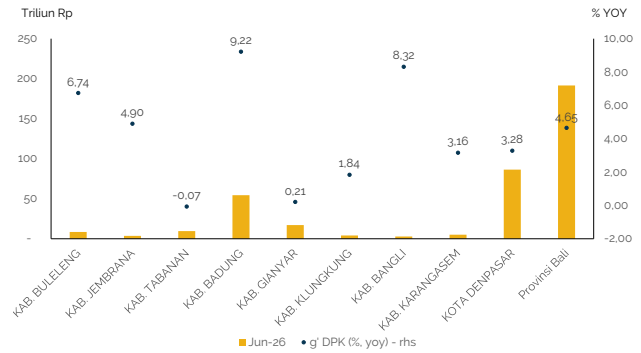
Grafik 3.7. Perkembangan Posisi Surat Berharga Negara Berdasarkan Jenis dan Kepemilikan

Sumber: SEKI BI (diolah)

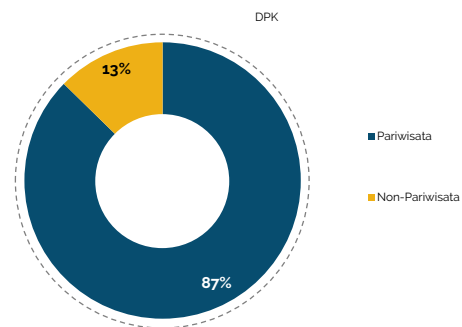
pemerintah masing-masing sebesar 21,63% dan 4,32%. Pertumbuhan DPK perseorangan tercatat sebesar 3,53% (yoy), kembali melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yang mengindikasikan adanya perlambatan penempatan dana oleh masyarakat. Selain dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan konsumsi, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya diversifikasi penempatan dana masyarakat ke instrumen investasi alternatif sejalan dengan pergerakan deposito yang berkontraksi pada triwulan II 2026 maupun tren peningkatan *outstanding* SBN Ritel. Di sisi lain, pertumbuhan DPK pemerintah berkontraksi sebesar 0,76% (yoy). Perlambatan tersebut terindikasi dipicu oleh kebijakan reprioritisasi anggaran Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Sementara itu, DPK korporasi pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 8,09% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya seiring penurunan penjualan domestik yang tercermin dari indikator Skala Likert Penjualan Domestik. Meski demikian, pertumbuhan yang tetap positif menunjukkan likuiditas korporasi masih terjaga, didukung oleh aktivitas usaha yang tetap berlangsung dan perputaran ekonomi Bali yang masih cukup baik.

Secara spasial, sejumlah Kabupaten dan Kota di Bali mencatat pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK provinsi.

Pertumbuhan DPK tertinggi tercatat di Kabupaten Badung sebesar 9,22% (yoy), sedangkan pertumbuhan DPK di Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi -0,07% (yoy). Tingginya pertumbuhan DPK di Kabupaten Badung didorong oleh aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata yang meningkatkan penghimpunan

Grafik 3.8. Total Nominal dan Pertumbuhan DPK Kabupaten/Kota

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.9. Proporsi DPK Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

dana dari pelaku usaha atau rumah tangga. Selain itu konsentrasi rekening operasional perhotelan berbintang turut mendukung pertumbuhan DPK di wilayah tersebut. Proporsi penghimpunan DPK masih terkonsentrasi di wilayah primadona pariwisata, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang mencapai 87% dari total DPK. Pertumbuhan penghimpunan DPK di daerah pariwisata tercatat 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK di wilayah nonpariwisata (Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem) sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan DPK yang relatif lebih tinggi di wilayah nonpariwisata menjadi sinyal positif bagi pemerataan ekonomi daerah. Apabila tren ini berlanjut, potensi penghimpunan dana dan penyaluran kredit dapat semakin tersebar ke berbagai wilayah di Bali, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap risiko yang bersumber dari perlambatan sektor pariwisata.

3.1.2. Penyaluran Kredit

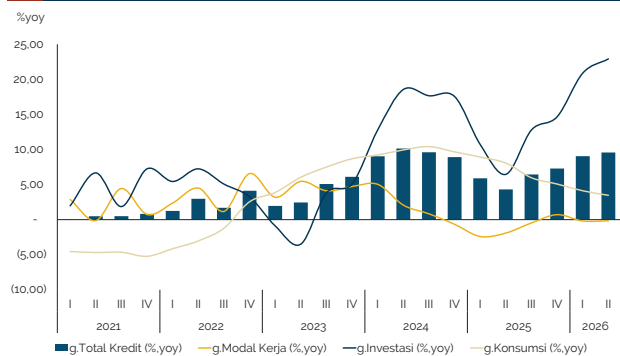
Penyaluran kredit di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 9,57% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 9,05% (yoy).

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan ekspansi bisnis, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Kredit investasi tumbuh signifikan mencapai 22,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,89% (yoy), mengindikasikan meningkatnya keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi sehingga menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi beberapa triwulan mendatang. Pertumbuhan kredit konsumsi kembali melambat menjadi 3,47% (yoy) dari sebelumnya 4,11% (yoy), yang mengindikasikan preferensi yang lebih selektif dalam melakukan pengeluaran di tengah ketidakpastian global dan kondisi ekonomi domestik. Sementara itu, kredit modal kerja masih berkontraksi sejalan dengan melemahnya indikator persediaan cenderung menurun

pada triwulan II 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan modal kerja oleh dunia usaha masih dipenuhi secara selektif, didukung oleh kondisi likuiditas internal perusahaan yang relatif memadai. Meskipun demikian, dari sisi komposisi, penyaluran kredit di Bali relatif seimbang antara kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi, menunjukkan distribusi pembiayaan yang proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi baik pada sektor rumah tangga maupun korporasi.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), peningkatan penyaluran kredit di Bali pada triwulan II 2026 terjadi pada sebagian besar sektor utama yang masih tumbuh positif, yaitu sektor Akmamin, Perdagangan, dan Konstruksi. Kredit pada sektor akomodasi, makan, dan minum (Akmamin) tumbuh tinggi sebesar 23,64% (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Akselerasi pertumbuhan kredit tersebut mengindikasikan semakin kondusifnya kinerja sektor pariwisata di Bali. Selain itu, pertumbuhan ini juga mencerminkan masih kuatnya aktivitas pariwisata yang mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan oleh pelaku usaha, baik untuk ekspansi maupun peningkatan kapasitas layanan akomodasi dan konsumsi guna memenuhi tingginya permintaan wisatawan. Sementara itu, kredit sektor konstruksi tumbuh 4,61% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja tersebut sejalan dengan perkembangan PDRB Bali yang menunjukkan pertumbuhan positif pada kedua sektor dimaksud. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 1,67% (yoy), sementara sektor industri mencatatkan kontraksi sebesar 2,15% (yoy). Secara keseluruhan, penyaluran kredit di sektor pariwisata tetap berada dalam tren positif dan

Grafik 3.10. Perkembangan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan



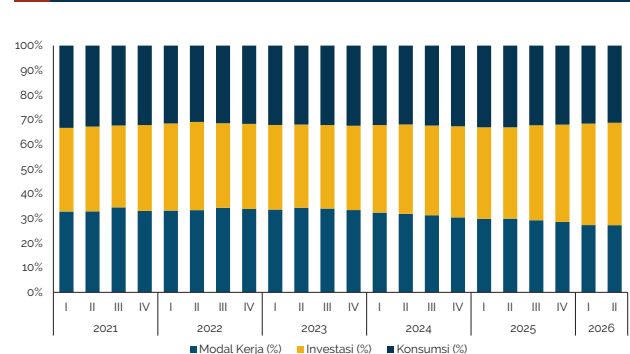
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Skala Likert Persediaan, dan Penjualan Domestik



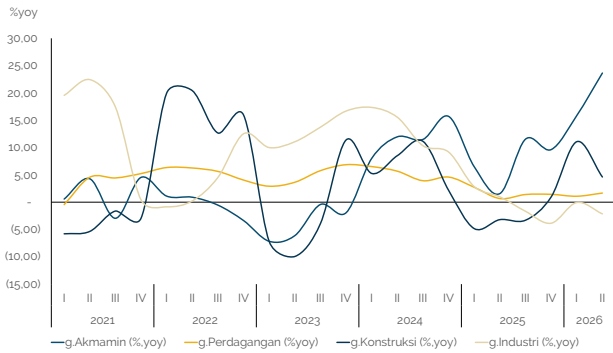
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.12. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali



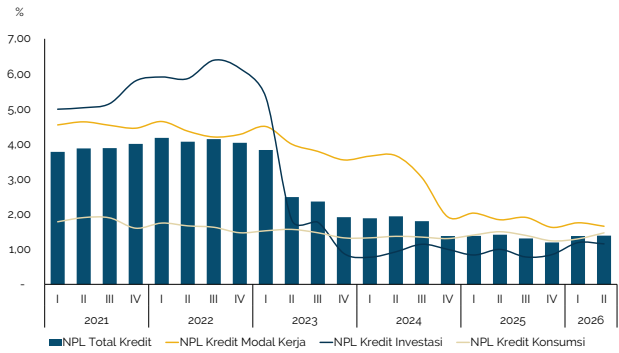
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.15. Perkembangan NPL Kredit



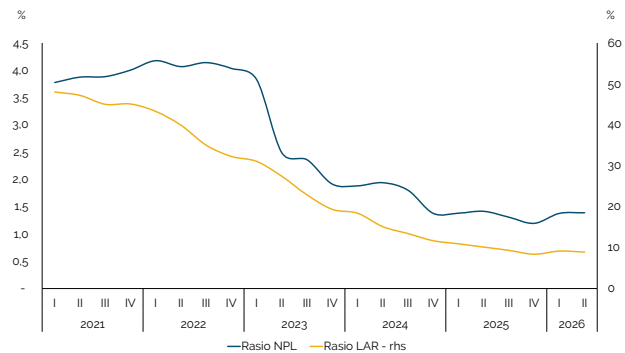
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.14. Perkembangan PDRB Provinsi Bali

Struktur PDRB (%)		Pertumbuhan (% y-on-y)	
21,91	Akomodasi & Makan Minum	3,68	
12,85	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	6,35	
10,21	Transportasi & Pergudangan	-0,64	
9,45	Konstruksi	8,40	
8,76	Perdagangan Besar & Eceran	8,22	
6,36	Industri Pengolahan	8,28	
5,58	Administrasi Pemerintahan	14,31	
4,98	Jasa Pendidikan	7,28	
4,92	Informasi & Komunikasi	3,89	
4,79	Jasa Keuangan & Asuransi	1,89	
3,63	Real Estat	3,36	
2,37	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	4,98	
1,82	Jasa Lainnya	7,74	
1,16	Jasa Penunjang	4,76	
0,79	Pertambangan & Penggalian	2,35	
0,24	Pengadaan Listrik & Gas	15,98	
0,15	Pengadaan Air	4,76	

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 3.16. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit

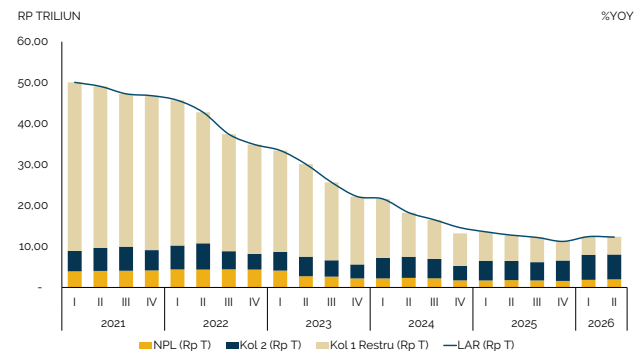


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

terus menjadi lokomotif pertumbuhan kredit di Provinsi Bali.

Kualitas penyaluran kredit di Bali hingga triwulan II 2026 tetap terjaga, tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang berada di bawah ambang batas 5%. Pada periode laporan, NPL tercatat sebesar 1,39%, tidak jauh berbeda dibandingkan NPL triwulan sebelumnya sebesar 1,38%. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan rasio NPL pada triwulan II 2026 terutama didorong oleh kenaikan NPL kredit konsumsi. Meski demikian, indikator risiko kredit secara umum menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio Loan at Risk (LAR) yang menurun dari 9,16% pada triwulan II 2025 menjadi 8,91% pada triwulan II 2026. Perbaikan LAR menunjukkan proses normalisasi kualitas kredit pascapandemi telah berlanjut. Tren penurunan LAR tersebut berlangsung konsisten sejak akhir 2020, sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Bali yang ditopang oleh normalisasi aktivitas pariwisata dan membaiknya kinerja dunia usaha. Penurunan LAR mengindikasikan berkurangnya porsi kredit yang berpotensi mengalami penurunan

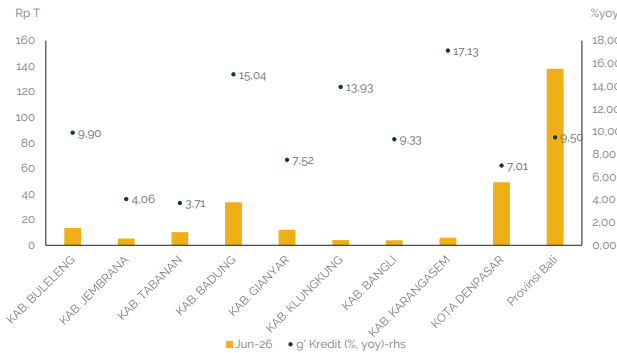
Grafik 3.17. Perkembangan LAR Kredit



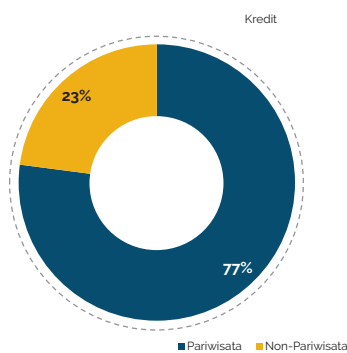
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

kualitas, sehingga mencerminkan perbaikan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Secara keseluruhan risiko kredit perbankan di Bali secara keseluruhan masih berada pada level yang terjaga dan didukung oleh kualitas kredit yang terus membaik.

Secara spasial, penyaluran kredit seluruh kabupaten dan kota di Bali mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2026. Pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di Kabupaten Karangasem dan Badung, masing-masing sebesar 17,13% (yoy) dan 15,04% (yoy). Kondisi tersebut

Grafik 3.18. Total Nominal dan Pertumbuhan Kredit Kabupaten/Kota

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

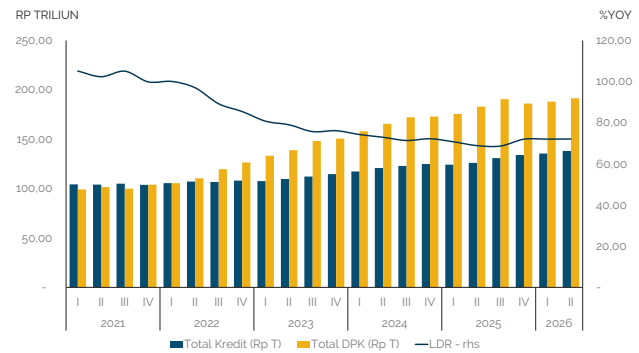
Grafik 3.19. Proporsi Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

juga mendorong pada pertumbuhan penyaluran kredit baik di daerah pariwisata dan non pariwisata yang masing-masing tercatat sebesar 9,77% (yoy) dan 10,56% (yoy). Proporsi penyaluran kredit terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yakni sebesar 77% dan daerah nonpariwisata sebesar 23%. Di antara wilayah tersebut, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki pangsa terbesar sejalan dengan perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Bali. Sementara itu, wilayah nonpariwisata memiliki skala kebutuhan pembiayaan yang relatif lebih rendah sehingga pangsa kredit penyalurannya relatif terbatas.

3.1.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat intermediasi perbankan di Bali pada triwulan II 2026 relatif stabil, sehingga masih terdapat ruang optimalisasi penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau rasio antara penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank dibandingkan penghimpunan DPK, sebesar 72,13% dan masih berada di bawah rentang

Grafik 3.20. Perkembangan LDR

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

yang ditetapkan¹. Di tengah kredit yang tumbuh 9,57% dan DPK tumbuh 4,65%, LDR yang tetap berada pada 72,13% menunjukkan ruang likuiditas perbankan Bali masih longgar. Terdapat ruang dan kapasitas yang cukup bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor riil dan masyarakat seiring dengan beberapa insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia terkait Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), utamanya pada sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan perkembangan terkini, pertumbuhan ekonomi di Bali masih relatif terkonsentrasi pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata. Oleh karena itu, diversifikasi pembiayaan ke sektor-sektor produktif lainnya perlu terus didorong untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, tetapi juga untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam. Dengan struktur pembiayaan yang lebih terdiversifikasi, ketahanan perekonomian Bali terhadap berbagai risiko eksternal maupun sektoral diharapkan semakin kuat serta mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI

3.2.1. Potensi Risiko Korporasi

Kinerja korporasi di Bali masih menghadapi sejumlah kerentanan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik, terutama karena tingginya ketergantungan terhadap sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

1. Berdasarkan PBI No.17/11/PBI/2015, tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR ditetapkan pada rentang 78%-92%.

Ketergantungan tersebut menyebabkan korporasi pada sektor akomodasi, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan relatif sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, mobilitas wisatawan, dan dinamika daya beli masyarakat. Pada triwulan II 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebesar 605.013 orang atau mengalami kontraksi sebesar 5,15% (yoy), yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja sektor-sektor terkait.

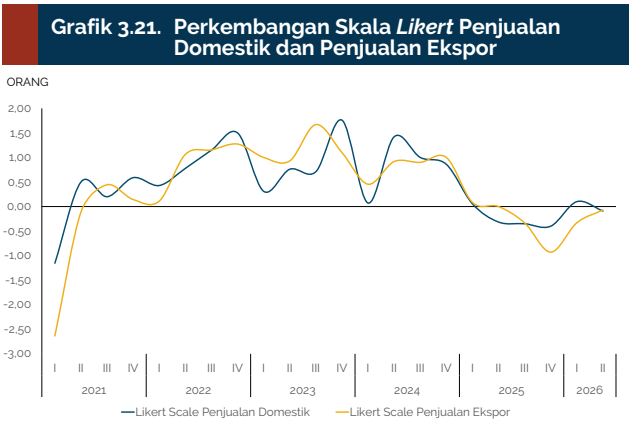
Keberlanjutan pertumbuhan sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja korporasi di Bali. Selain peningkatan jumlah wisatawan, kualitas aktivitas pariwisata yang dihasilkan juga perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, upaya menjaga daya tarik dan daya saing destinasi wisata Bali perlu terus diperkuat. Ke depan, penguatan konsep *quality tourism* menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, berbagai isu strategis seperti pengelolaan sampah, kemacetan, serta kualitas infrastruktur dan layanan wisata perlu mendapat perhatian bersama guna mempertahankan daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global yang semakin ketat.

Fokus pada pengembangan *quality tourism* tidak hanya penting untuk mempertahankan peran sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi Bali, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap berbagai gejolak global maupun domestik. Selain itu,

pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Bali menuju struktur ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2.2. Kondisi Perkembangan Korporasi

Pada triwulan II 2026, kinerja perusahaan di Bali terindikasi optimis seiring dengan capaian PDRB Provinsi Bali yang tumbuh kuat. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia dengan pelaku usaha, mayoritas perusahaan melaporkan peningkatan kegiatan dunia usaha yang tercermin dalam nilai SBT (Saldo Bersih Tertimbang) sebesar 49,32%, lebih tinggi dari SBT triwulan sebelumnya yaitu 17,91%. Perkembangan kredit korporasi di sektor akmamin juga terpantau meningkat. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh masuknya *high season* wisatawan dan liburan sekolah sehingga mendorong mobilisasi masyarakat sejalan dengan penjualan ekspor menunjukkan tren perbaikan yang mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk dan jasa di Bali tetap terjaga.



Sumber: Laporan Liaison, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bali (Kedatangan Wisman Ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Paspor yang Dipegang)

No.	Asal Paspor	Wisman Juni 2026				Wisman Mei 2026	Wisman Juni 2025	Perubahan Wisman Juni 26 Thd Mei 26	Perubahan Wisman Juni 26 Thd Juni 25 (%)
		Bandara	Pelabuhan Laut	Total	Persentase (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	AUSTRALIA	156.706	0	156.706	25,90	145.638	143.915	7,60	8,89
2	INDIA	55.584	2	55.586	9,19	59.014	66.659	-5,81	-15,34
3	TIONGKOK	41.731	0	41.731	6,90	41.700	45.755	0,07	-8,79
4	AMERIKA SERI	28.964	0	28.964	4,79	24.073	29.738	20,32	-2,60
5	INGGRIS	25.436	5	25.441	4,21	25.111	27.721	1,31	-8,22
6	SINGAPURA	24.683	2	24.685	4,08	17.467	28.766	41,32	-14,19
7	PRANCIS	22.274	0	22.274	3,68	25.444	23.933	-12,46	-6,93
8	KOREA SELATAN	22.221	0	22.221	3,67	22.383	30.258	-0,72	-26,56
9	MALAYSIA	17.946	1	17.947	2,97	20.569	21.600	-12,75	-16,91
10	NEW ZEALAND	17.058	0	17.058	2,82	14.059	19.254	21,33	-11,41

Sumber: BPS

Sementara itu, kondisi rentabilitas, likuiditas, dan akses pembiayaan korporasi di Bali masih didominasi oleh persepsi yang relatif lebih baik. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), pangsa korporasi yang melaporkan kondisi rentabilitas pada level yang lebih baik mencapai 71,54% dari total responden yang mengindikasikan aktivitas usaha yang tetap berjalan positif. Selain itu, kondisi likuiditas pada level yang lebih baik juga mencapai 71,54% yang mengindikasikan kemampuan korporasi dalam menjaga arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek masih relatif terjaga. Lebih lanjut, akses pembiayaan korporasi juga masih terpantau positif, tercermin dari 88,46% responden yang menyatakan kondisi akses kredit tetap terjaga, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

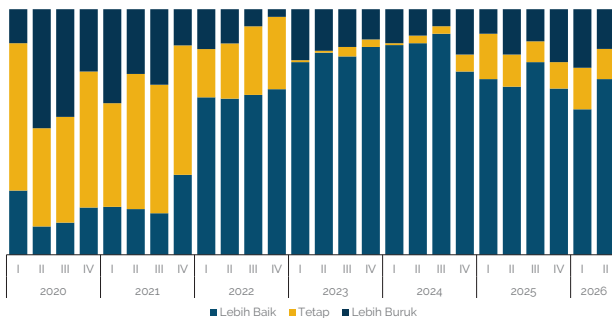
3.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit korporasi di Bali pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 13,82% (yoy), meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 10,71% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kredit investasi dari 14,72% (yoy) menjadi 16,93% (yoy).

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa korporasi tetap melakukan ekspansi usaha dengan fokus pada pembiayaan jangka menengah dan panjang. Realisasi kredit investasi tersebut menjadi sinyal positif bagi peningkatan kapasitas produksi dan prospek aktivitas bisnis pada periode mendatang. Lebih lanjut, kredit modal kerja mencatatkan pertumbuhan, setelah dalam tren perlambatan dari 3,39% (yoy) menjadi 8,25% (yoy).

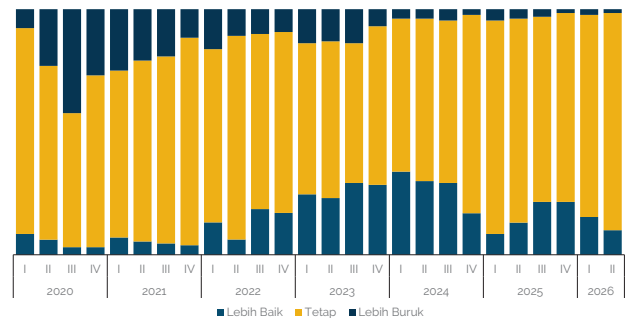
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari sektor perdagangan dan sektor akumasi. Kredit korporasi pada sektor Perdagangan tumbuh sebesar 12,35% (yoy), sementara kredit sektor Akumasi meningkat 11,43% (yoy), keduanya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan masih kuatnya kebutuhan pembiayaan pada sektor-sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata dan perdagangan. Sejalan dengan kredit konstruksi keseluruhan di Provinsi Bali, kredit konstruksi pada segmen korporasi juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut pertumbuhan kredit korporasi secara keseluruhan

Grafik 3.22. Kondisi Rentabilitas Korporasi



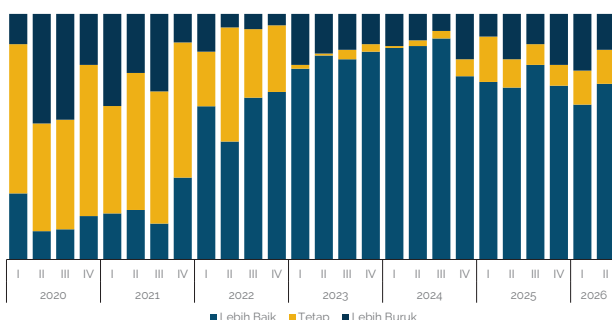
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.24. Kondisi Akses Kredit Korporasi



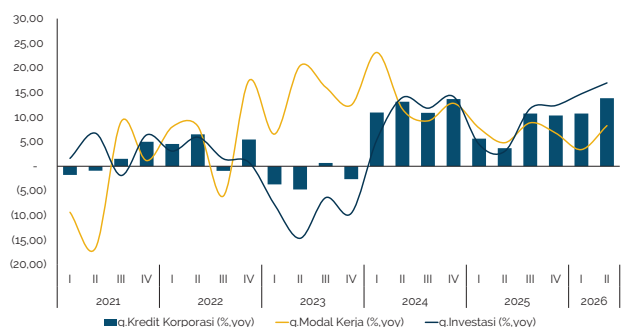
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.23. Kondisi Likuiditas Korporasi



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.25. Perkembangan Kredit Korporasi

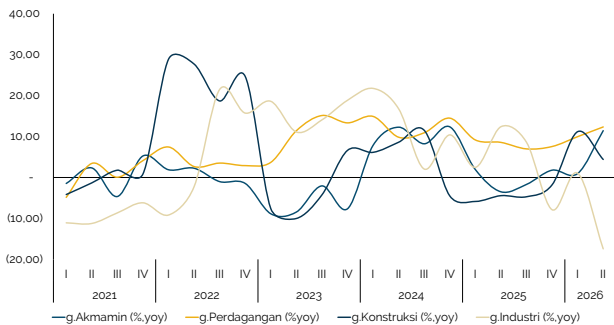


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

masih tertahan oleh kinerja sektor Industri yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -17,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan di Provinsi Bali. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terbatasnya ekspansi pembiayaan pada sektor industri sehingga mengurangi akselerasi pertumbuhan kredit korporasi.

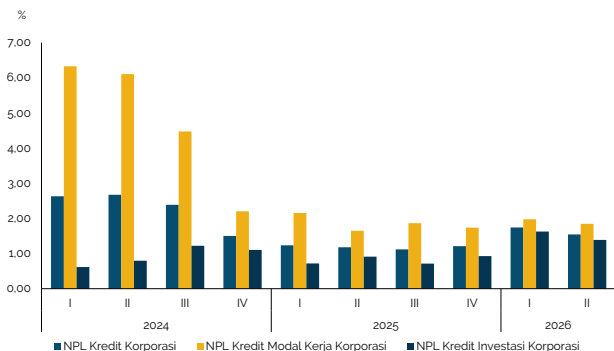
Risiko kredit korporasi di Bali hingga triwulan II 2026 tetap terjaga dan berada di bawah ambang batas 5%. Rasio NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,54%, menurun dari 1,74% pada triwulan sebelumnya. Penurunan rasio NPL terutama berasal dari kedua jenis kredit, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi, masing-masing menjadi sebesar 1,85% dan 1,39%. Kedua jenis kredit tersebut masih berada pada level NPL yang rendah. Hal ini mengindikasikan risiko kredit masih terkendali dan memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap mendorong pembiayaan produktif, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan perekonomian Bali dan penciptaan lapangan kerja.

Grafik 3.26. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.27. Perkembangan NPL Kredit Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

3.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA

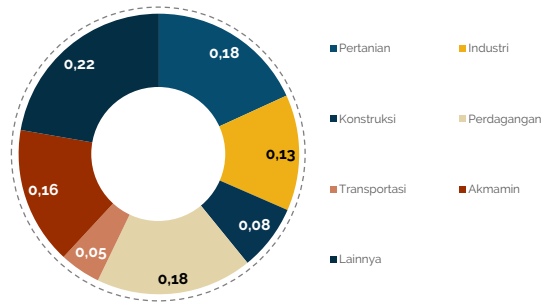
3.3.1. Potensi Risiko Rumah Tangga

Kinerja sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kerentanan rumah tangga di Bali. Ketergantungan ini tercermin dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada sektor-sektor yang terkonsentrasi pada sektor pariwisata, seperti akomodasi dan makan-minum, perdagangan, serta transportasi. Berdasarkan data BPS Mei 2026, sekitar 38,61% dari total penduduk bekerja di Bali terserap pada sektor-sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pariwisata secara signifikan memengaruhi stabilitas pendapatan dan daya tahan ekonomi rumah tangga di Bali.

3.3.2. Perkembangan Tingkat Keyakinan Rumah Tangga

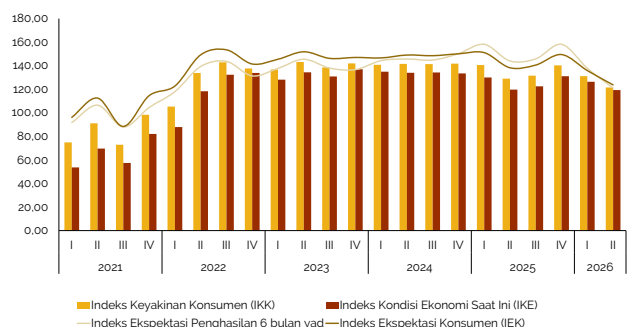
Pada triwulan II 2026, optimisme rumah tangga di Bali tetap terjaga di tengah dinamika ketidakpastian global dan domestik. Hasil Survei Konsumen (SK) menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih berada pada level optimis (di atas 100),

Grafik 3.28. Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Mei 2026



Sumber: BPS (diolah BI)

Grafik 3.29. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (diolah)

meskipun mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persepsi rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ekonomi ke depan masih positif. Adapun Indeks Ekspektasi Penghasilan enam bulan mendatang juga tetap berada pada level yang tinggi, meskipun cenderung melandai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga masih meyakini prospek peningkatan pendapatan ke depan, namun mulai bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran sebagai respons terhadap berbagai risiko dan ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung. Terjaganya optimisme rumah tangga menjadi modal penting bagi perekonomian Bali menjelang periode *peak season* pariwisata pada semester II 2026. Peningkatan aktivitas wisatawan diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga, memperkuat aktivitas ekonomi domestik, serta mendukung peningkatan inklusi keuangan dan stabilitas harga. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Bali pada periode mendatang, sejalan dengan berlanjutnya penguatan sektor pariwisata dan membaiknya aktivitas ekonomi daerah.

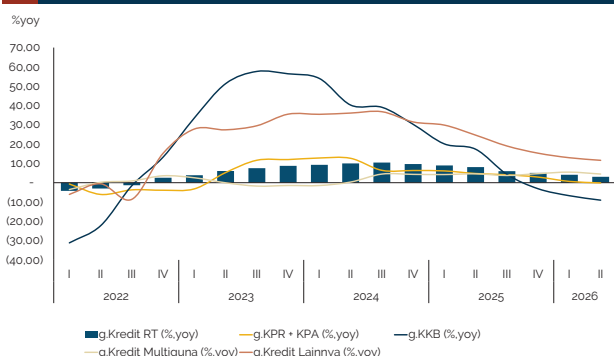
3.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Penyaluran kredit kepada rumah tangga di Bali pada triwulan II 2026 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat sebesar 3,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan 4,12% (yoy) pada triwulan I 2026. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja kredit konsumtif jangka panjang,

tercermin dari kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA) serta Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing-masing berkontraksi sebesar 0,12% (yoy) dan 9,05% (yoy). Selain itu, perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga juga dipengaruhi oleh melambatnya kredit multiguna yang tumbuh sebesar 4,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,48% (yoy). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga cenderung lebih selektif dalam melakukan pembiayaan konsumsi, terutama untuk pembelian aset bernilai besar. Sikap kehati-hatian tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang menunjukkan bahwa meskipun optimisme rumah tangga masih terjaga, ekspektasi pendapatan ke depan cenderung melandai di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang masih berlangsung. Kendati demikian, pertumbuhan kredit rumah tangga yang tetap berada pada zona positif menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari rumah tangga masih terjaga. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata pada periode libur sekolah dan *peak season* wisatawan, kebutuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan kredit pada periode mendatang.

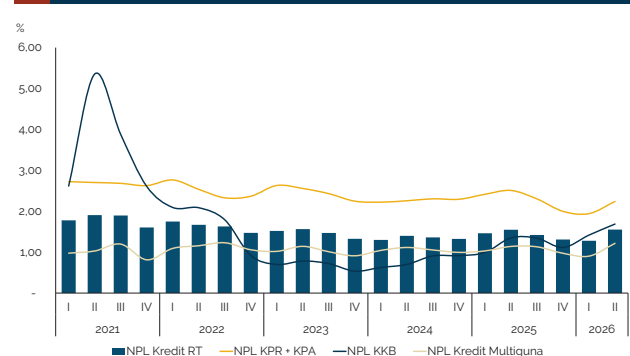
Meskipun pertumbuhan kredit rumah tangga mengalami perlambatan pada triwulan II 2026, berbagai kebijakan dan insentif yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah berperan dalam menjaga permintaan kredit agar tidak melambat lebih dalam. Dukungan tersebut antara lain melalui keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menawarkan cicilan lebih terjangkau, serta kebijakan

Grafik 3.30. Perkembangan Kredit RT



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.31. Perkembangan NPL Kredit RT



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

insentif Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembiayaan properti. Berbagai kebijakan tersebut membantu menjaga minat masyarakat terhadap pembiayaan perumahan dan kendaraan di tengah sikap kehati-hatian rumah tangga dalam melakukan konsumsi serta pembelian aset bernilai besar. Dukungan kebijakan yang berkelanjutan diperkirakan mampu menahan perlambatan kredit rumah tangga dan menjadi faktor penopang pertumbuhan pembiayaan konsumsi ke depan.

Kualitas penyaluran kredit rumah tangga di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 secara umum masih terjaga. Rasio NPL tercatat sebesar 1,55%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,28%. Kenaikan NPL tersebut terutama bersumber dari kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA), kredit multiguna, serta Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Meskipun meningkat, rasio NPL masih jauh berada di bawah ambang batas 5%, yang menunjukkan bahwa risiko kredit rumah tangga tetap terkendali dan kualitas aset perbankan masih relatif sehat.

Terjaganya kualitas kredit tersebut turut mendukung *lending appetite* perbankan terhadap segmen rumah tangga. Risiko kredit yang masih rendah memberikan keyakinan bagi perbankan untuk tetap menyalurkan pembiayaan konsumsi, meskipun secara lebih selektif

di tengah perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga. Dengan profil risiko yang masih terkendali, ruang ekspansi kredit kepada rumah tangga tetap terbuka, terutama didukung oleh berbagai insentif kebijakan di sektor perumahan dan kendaraan bermotor.

3.3.3.1 Penyaluran KPR dan KPA

Penyaluran KPR dan KPA pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Total kredit KPR dan KPA tercatat berkontraksi -0,12% (yoy), menurun dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang 0,66% (yoy), didorong oleh kedua jenis kredit tersebut. Pertumbuhan KPR tercatat berkontraksi sebesar 0,03% (yoy) sementara KPA mencatatkan kontraksi yang lebih dalam. Perlambatan kredit KPR yang melambat disebabkan oleh berkontraksinya jenis kredit KPR < 21 dan KPR 21 s.d. 70 serta perlambatan KPR Ruko/Rukan. Sebaliknya, kredit KPR > 70 mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan IHPR Provinsi Bali pada triwulan II 2026 yang terutama didorong oleh kenaikan harga properti tipe menengah (luas bangunan 36 m² hingga 70 m²) dan tipe besar (luas bangunan di atas 70 m²), yang masing-masing tumbuh sebesar 1,52% (yoy) dan 0,82% (yoy). Di tengah tren kenaikan harga rumah, skema KPR tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam pembiayaan hunian. Pemanfaatan fasilitas KPR berperan penting

Tabel 3.2. Perkembangan Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	g.Kredit (%yoy)									Pangsa TW I 2026 (%)
	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KPR	12.77	12.66	6.52	6.31	6.09	4.68	4.05	2.88	0.68	
RT. KPR <21	-40.92	-19.87	-19.61	-20.47	69.95	-11.07	-9.89	-8.11	-10.86	3.57
RT. KPR 21 sd 70	-13.39	8.01	6.27	5.72	26.04	4.06	3.44	2.29	0.03	53.45
RT. KPR >70	28.46	23.71	9.21	9.16	8.70	7.73	5.96	3.79	2.07	38.26
KPR Ruko/Rukan	432.87	48.25	28.97	33.83	-73.65	2.71	10.13	15.45	8.55	3.90
KPA	12.70	8.29	1.00	5.40	7.57	13.85	10.64	5.34	-0.95	
RT. KPA <21	-22.86	70.72	29.40	28.95	68.87	-3.64	90.83	73.38	31.79	0.03
RT. KPA 21 sd 70	29.08	15.17	6.51	12.06	6.67	16.55	13.20	5.01	3.79	0.54
RT. KPA >70	-5.74	-5.69	-8.54	-6.23	6.21	10.88	1.04	1.63	-11.56	0.27
KPR+KPA	12.77	12.63	6.47	6.30	6.10	4.75	4.10	2.90	0.66	100.00

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.3. Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	NPL (%)								
	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KPR	2.21	2.26	2.28	2.26	2.42	2.49	2.29	1.99	1.93
KPA	3.82	2.32	4.91	5.74	3.87	4.06	3.60	2.69	2.98
KPR+KPA	2.22	2.26	2.30	2.29	2.41	2.51	2.30	2.00	1.94

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.4. Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna

Jenis Kredit	g.Kredit (%yoy)									Pangsa TW I 2026 (%)
	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KKB	54.03	40.22	39.07	30.25	20.09	17.33	4.31	-3.14	-6.75	
Mobil	55.87	41.24	39.22	29.59	19.92	17.04	3.74	-3.84	-7.32	94.61
Sepeda Motor	37.36	29.08	33.50	26.62	18.06	24.06	24.00	29.16	24.37	372
Truk	-12.61	-27.09	-28.69	19.82	29.26	29.37	31.09	-10.51	-25.99	0.48
Lainnya	20.69	41.27	108.77	123.70	32.99	19.50	-4.33	-15.56	-21.70	120
RT Multiguna	-1.46	0.34	4.47	4.32	4.22	4.61	3.74	4.69	5.48	

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.5. Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna

Jenis Kredit	NPL (%)								
	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KKB	0.63	0.70	0.91	0.92	0.99	1.35	1.34	1.11	1.42
Mobil	0.58	0.66	0.90	0.91	0.97	1.32	1.35	1.12	1.42
Sepeda Motor	1.65	1.86	1.67	1.36	1.25	1.44	1.46	1.15	1.71
Truk	3.31	2.31	0.00	0.00	1.39	1.54	1.33	0.00	0.00
Lainnya	0.96	0.61	0.32	0.59	1.90	2.97	0.70	1.17	0.79
RT Multiguna	1.04	1.11	1.05	0.99	1.03	1.14	1.13	0.97	0.90

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

dalam menjaga akses masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah di Bali, untuk tetap memiliki rumah meskipun harga properti terus meningkat. Lebih lanjut, rasio NPL KPR dan KPA tetap rendah dan terjaga pada 2,24% di triwulan II 2026.

3.3.3.2. Penyaluran KKB dan Kredit Multiguna

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada triwulan II 2026 masih menunjukkan tren perlambatan.

KKB tercatat berkontraksi -9,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi -6,75% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berlanjutnya kontraksi kredit kendaraan roda empat yang memiliki pangsa dominan dalam total portofolio KKB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permintaan pembiayaan kendaraan masih tertahan, sejalan dengan sikap kehati-hatian rumah tangga dalam melakukan pembelian barang tahan lama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya kebutuhan konsumsi pada sektor lainnya.

Sementara itu, kredit multiguna masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,48% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,48% (yoy). Perlambatan tersebut mengindikasikan moderasi kebutuhan pembiayaan konsumsi rumah tangga, namun tetap menunjukkan bahwa permintaan kredit untuk kebutuhan nonproduktif

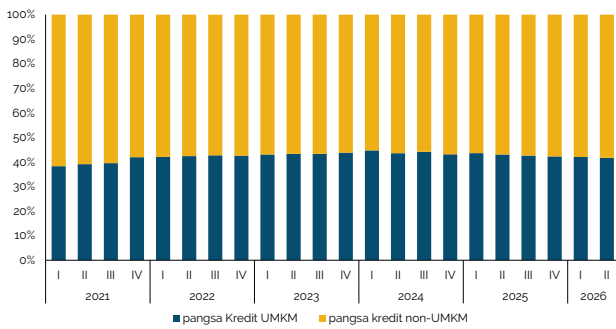
masih terjaga. Dari *sisi lending appetite* perbankan terhadap kredit konsumsi relatif masih terjaga. Hal ini tercermin dari kualitas kredit yang tetap sehat, dengan rasio NPL KKB sebesar 1,69% dan rasio NPL kredit multiguna sebesar 1,22%, yang masih jauh berada di bawah ambang batas 5%. Risiko kredit yang terkendali tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menyalurkan pembiayaan konsumsi secara selektif. Selain itu, berbagai insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, antara lain kebijakan Loan to Value (LTV) hingga 100%, dukungan pembiayaan kendaraan tanpa uang muka (down payment), serta insentif kendaraan bermotor listrik, turut menjadi faktor penahan perlambatan kredit lebih dalam.

3.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

3.4.1. Asesmen Kredit UMKM

Akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan di Bali pada triwulan II 2026 tetap terjaga. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar **41,69%**, relatif stabil pada level di atas **40%** dan telah **memenuhi ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)** yang diatur oleh Bank Indonesia². Kondisi tersebut menunjukkan komitmen perbankan yang masih kuat dalam mendukung akses

2. Berdasarkan PBI No.24/3/PBI/2022 disampaikan bahwa Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial minimal 30% dari total penyaluran kredit pada posisi akhir bulan Desember.

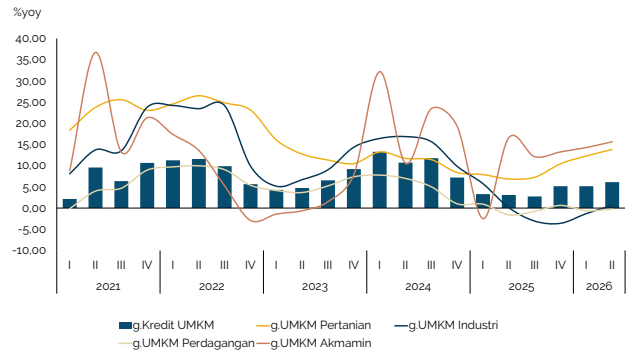
Grafik 3.35. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

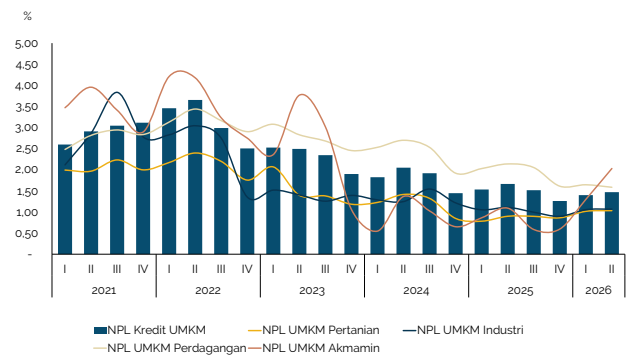
pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 6,11% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kinerja positif kredit UMKM pada LU akmamin, Industri Pengolahan, dan Pertanian. Di sisi lain, kredit UMKM pada LU Perdagangan masih mengalami kontraksi sehingga menahan pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan.

Peningkatan kredit UMKM mengindikasikan membaiknya aktivitas produktif dan kebutuhan pembiayaan usaha, khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pariwisata Bali. Momentum libur sekolah triwulan II 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa, sehingga meningkatkan kebutuhan modal kerja serta investasi usaha. Dengan pangsa kredit yang tetap tinggi dan pertumbuhan yang meningkat, UMKM terus menunjukkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Bali. Ke depan, penguatan akses pembiayaan kepada UMKM diharapkan dapat memperluas basis pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata.

Dari sisi perbankan, *lending appetite* terhadap segmen UMKM juga masih terjaga, didukung oleh kualitas kredit yang relatif terjaga. NPL kredit UMKM tercatat sebesar 1,47%, sedikit meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 1,40%. Namun demikian, kondisi NPL tersebut masih berada di kisaran yang cukup rendah dibawah ambang batas 5%. Kenaikan rasio NPL bersumber dari seluruh LU akmamin. Secara

Grafik 3.33. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.34. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

keseluruhan, rendahnya tingkat NPL menunjukkan bahwa UMKM masih memiliki kapasitas pembayaran yang baik dan mampu menjaga kualitas pembiayaannya. Kondisi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM, baik melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan skema penjaminan kredit, maupun optimalisasi berbagai program pemerintah dan Bank Indonesia yang mendukung sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, UMKM berpotensi tetap menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi Bali ke depan.

3.4.2. Program Pengembangan Akses Keuangan UMKM dan Ekonomi Syariah

Pengembangan UMKM dilakukan oleh Bank Indonesia melalui tiga pilar utama, yaitu **Peningkatan Kapasitas, Korporatisasi, dan Pembiayaan**. Hal ini penting dilakukan dalam memperkuat akses keuangan UMKM. Peningkatan Kapasitas membantu UMKM meningkatkan kompetensi, kualitas produk, serta daya saing. Selanjutnya, melalui Korporatisasi UMKM didorong

untuk memiliki kelembagaan dan skala usaha yang lebih kuat. Sementara itu, pilar Pembiayaan diarahkan untuk memfasilitasi UMKM agar lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menunjang perluasan akses keuangan UMKM sekaligus mendukung intermediasi pembiayaan yang lebih inklusif. Dalam implementasinya, Bank Indonesia Provinsi Bali memiliki beberapa program strategis melalui tiga pilar utama yaitu:

1) Kapasitas

Peningkatan kapasitas diarahkan baik sisi sumber daya manusia, maupun proses bisnis sehingga memperbesar peluang akses pembiayaan perbankan. Selain itu, peningkatan kapasitas dilakukan untuk memperkuat daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha UMKM sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, penguatan akses pasar, serta pendampingan dalam memperoleh akses pembiayaan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melakukan implementasi terhadap peningkatan kapasitas melalui beberapa program strategis di antaranya:

- a) Program *Onboarding* UMKM RAHAYU (Rintis, Akselerasi, Hebatkan, Daya Saing UMKM) untuk mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat melakukan promosi maupun penjualan melalui *e-commerce*.
- b) Fasilitasi Bantuan Teknis (Bantek) dalam mendorong peningkatan produksi sehingga usaha yang dimiliki dapat berjalan berkelanjutan. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM dalam meningkatkan produksi serta produktivitas telah dilakukan, hal ini menjadi salah satu strategi dalam pengendalian komoditas inflasi.
- c) Program *capacity building* UMKM sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi

para pelaku usaha sehingga dapat menjadi UMKM yang naik kelas dan berdaya saing baik di dalam maupun di luar negeri.

- d) Program pemberdayaan kelompok subsisten sehingga dapat berkembang dan menjadi kelompok yang produktif. Program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan usaha, meningkatkan literasi dan akses keuangan, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, serta membantu kelompok subsisten agar memiliki pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- e) Program Inovasi UMKM Hijau yang memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM sehingga dapat melakukan praktik bisnis hijau dengan konsep *zero waste management*. Hal ini dilakukan sejalan dengan Program ASTA CITA Pemerintah dalam konsep ekonomi hijau sehingga UMKM dapat menciptakan nilai tambah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
- f) Promosi perdagangan serta perluasan akses pasar melalui fasilitasi *showcasing* baik di dalam maupun luar negeri seperti pada *event* Bali Jagadhita, Karya Kreatif Indonesia (KKI), Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF). Adapun pada tahun 2025, Bank Indonesia Provinsi Bali telah menghasilkan *outcome* penjualan UMKM binaan/mitra Bank Indonesia Bali hingga Rp19,714 miliar. Selanjutnya, untuk UMKM binaan/mitra Bank Indonesia Bali yang telah ekspor hingga tahun 2026 tercatat sejumlah lebih dari Rp8,7 miliar.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, menciptakan nilai tambah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

2) Korporatisasi

Strategi korporatisasi UMKM diarahkan untuk memperbesar skala usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. Upaya ini dilakukan melalui

pembentukan maupun penguatan kelembagaan UMKM, termasuk pengelompokan usaha yang memiliki kesamaan karakteristik baik berdasarkan wilayah maupun jenis produk yang dihasilkan. Melalui korporatisasi, UMKM diharapkan dapat memiliki kinerja usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga lebih siap dalam mengakses pembiayaan dari Perbankan. Selain itu, strategi ini turut mendorong intermediasi keuangan yang lebih berkesinambungan, dengan memperhatikan kelayakan usaha serta keberlanjutan akses pembiayaan bagi UMKM.

Strategi Korporatisasi diimplementasikan Bank Indonesia Provinsi Bali antara lain melalui:

- a) Sosialisasi sertifikasi halal kepada pengusaha UMKM/Pelaku Usaha Syariah sebagai upaya pembekalan kepada UMKM/Pelaku Usaha Syariah yang akan diberikan fasilitasi sertifikasi halal. Sosialisasi halal merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dimana dalam enam tahun terakhir telah dilakukan fasilitasi terhadap 123 UMKM/Pelaku Usaha Syariah dan 4 Tempat Pemotongan Hewan (TPH) untuk mendapatkan sertifikat halal. Pada program ini, Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Kementerian Agama Provinsi Bali dalam pengembangan *Halal Value Chain* (HVC) melalui penguatan sertifikasi halal untuk produk UMKM Bali.
- b) Memberikan fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan lembaga/badan usaha lain melalui kegiatan promosi perdagangan, temu bisnis, serta forum perdagangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat membuka peluang kemitraan, meningkatkan eksposur produk, dan mendorong penetrasi pasar yang lebih luas. Adapun Bank Indonesia Provinsi Bali telah memberikan dukungan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - *Business matching* antara UMKM potensial ekspor dengan *potential buyer* melalui beberapa *event* internasional seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Bali Beyond Travel Fair (BBTF), serta Trade Expo Indonesia (TEI).
 - Penjajakan bersama Persatuan Hotel dan Resto-

ran Indonesia (PHRI) Bali untuk dapat menjadikan desa wisata menjadi bagian dari paket wisata disetiap hotel di Bali untuk peningkatan kualitas berwisata bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

3) Pembiayaan

Pengembangan UMKM melalui dorongan pembiayaan dengan Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank, memiliki tujuan bagi UMKM untuk memperluas akses UMKM Bali terhadap sumber permodalan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha, mendorong UMKM naik kelas, membuka peluang kerja, memperkuat pendapatan masyarakat serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berdaya saing. Fasilitasi *Business Matching* antara UMKM dengan Perbankan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Bali Jagadhita, Bali Business Matching (BBM), Festival Kopi & Hijau, Karya Kreatif Indonesia (KKI) maupun *International Sharia Economic Festival* (ISEF). Adapun pada tahun 2025, Bank Indonesia Provinsi Bali telah berhasil mendorong pembiayaan pada UMKM binaan/mitra hingga mencapai Rp50,05 Miliar dan angka ini akan bertambah untuk setiap tahunnya.

Selain melalui skema konvensional, Bank Indonesia Provinsi Bali turut mendorong potensi perluasan akses pembiayaan syariah melalui peningkatan kapasitas bisnis UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia Bali turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) KTI Tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Juli 2026 di Nusa Tenggara Barat. Adapun bentuk partisipasi Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangkaian FESyar KTI 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pameran UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Bali, promosi produk pada Halal Mart, dan pelaksanaan program unggulan berupa fasilitasi sertifikasi halal bagi 30 UMKM di Bali, serta literasi ekonomi syariah bagi pelajar. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pasar UMKM ke tingkat nasional dan global, sekaligus memperkuat literasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 7 UMKM fesyen binaan Bank Indonesia Provinsi Bali

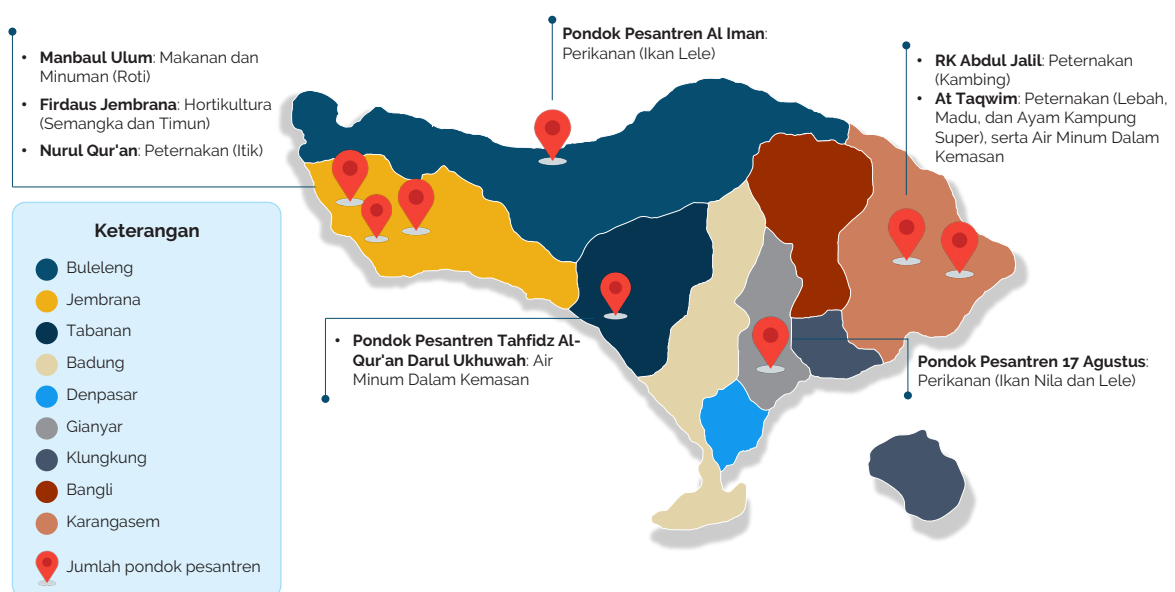
yang berpartisipasi dalam *showcasing* UMKM yaitu Lusi Damai, Pagi Motley, Artha Dharma, Basudewa, Suka Pandawa, Haluan Bali, dan KRINS. Selain itu, terdapat 5 UMKM sektor mamin olahan yang mengikuti *showcasing* UMKM dengan konsep halal mart yaitu Krilazz, Sambal Mantu, Sehat Segar, Bali Honey, dan Prabata Radhika Lavana (Litgo). Selama Road to FESyar tahun 2026, Bank Indonesia Provinsi Bali memperoleh total penjualan secara *offline* dan *online*, baik penjualan domestik maupun ekspor sejumlah Rp19,13 miliar. Adapun capaian tersebut sudah melebihi target sebesar Rp2 miliar.

- 2) Bank Indonesia Provinsi Bali juga turut berpartisipasi dalam kegiatan "*Sharia Competition*" seperti Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah, Kompetisi Konten FESyar KTI, Kompetisi Halal Chef, dan Kompetisi Modest Fashion. Dari 5 kompetisi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali berhasil mendapatkan Juara 2 untuk kompetisi OESN untuk selanjutnya akan diikuti pada babak perebutan juara pada penyelenggaraan ISEF (*Indonesia Sharia Economic Festival*) yang akan diselenggarakan pada September 2026 (tentatif).

Ke depan, demi mendorong peningkatan partisipasi dan kapabilitas peserta dalam FESyar KTI di tahun 2027, akan dilakukan Roadshow/Sosialisasi FESyar KTI untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi penyelenggaraan FESyar.

Dalam hal potensi akses pembiayaan ke depan, pondok pesantren merupakan mitra kerja Bank Indonesia Provinsi Bali yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi syariah, khususnya pada aspek ketahanan pangan. Hingga Juli 2026, terdapat 8 (delapan) pondok pesantren binaan yang berfokus pada komoditas pangan. Program dukungan Bank Indonesia Provinsi Bali bagi salah satu pondok pesantren, At Taqwim, telah dilaksanakan pada tahun 2025 melalui *Letter of Intent* antara UMKM Bali Honey dan pondok pesantren At Taqwim. Pondok pesantren At Taqwim memiliki lahan seluas dua hektar yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pakan lebah guna meningkatkan produktivitas madu lokal. Guna memaksimalkan manfaat lahan tersebut, pondok pesantren didampingi oleh UMKM Bali Honey dalam pengelolaan budidaya lebah, termasuk jenis Cerana, Trigona, dan Melifera, serta dukungan dalam

Grafik 3.1. Persebaran Pondok Pesantren Binaan KPwBI Provinsi Bali



perluasan akses pasar untuk mendorong terciptanya ekosistem ekonomi halal inklusif.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi perluasan kerja sama antara Bank Indonesia Provinsi Bali dengan pondok pesantren di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai 2 (dua) wilayah dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Provinsi Bali. Pengembangan model bisnis pesantren di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung nantinya akan difokuskan pada komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Melalui berbagai upaya penguatan ekosistem bisnis syariah di Provinsi Bali tersebut, diharapkan dapat tercipta permintaan pembiayaan modal kerja syariah yang positif.





BOKS 3



BALI JAGADHITA VII 2026: PENGUATAN
PERDAGANGAN, PARIWISATA, DAN
INVESTASI UNTUK MENDUKUNG EKONOMI
BALI YANG TANGGUH DAN BERKELANJUTAN



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantar
No. 4, Denpasar



Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya persaingan destinasi wisata internasional, penguatan perdagangan, pariwisata, dan investasi menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Bali. Dalam konteks tersebut, Bali Jagadhita VII Tahun 2026 menjadi platform sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperkuat sektor pariwisata yang berkelanjutan. Mengusung tema "Suddha Bumi Parahita", Bali Jagadhita VII 2026 menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang transformatif sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar UMKM, promosi pariwisata dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Pelaksanaan Bali Jagadhita VII Tahun 2026 melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan rangkaian kegiatan promosi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar B4.1.

Pada pilar perdagangan, Bali Jagadhita menghadirkan pameran UMKM yang melibatkan lebih dari 60 UMKM se-Bali-Nusra dari sektor makanan dan minuman, kriya, fesyen, serta sektor kreatif lainnya. Selain itu, pasar murah bahan pangan juga digelar melalui kolaborasi dengan Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai upaya mendukung stabilisasi harga, menekan inflasi, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Rangkaian transaksi perdagangan dalam gelaran Bali Jagadhita berhasil mencapai Rp 30 miliar. Realisasi transaksi perdagangan sebesar Rp30 miliar tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM lokal sekaligus menunjukkan pentingnya event promosi sebagai sarana memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet pelaku usaha. Bagi Bali yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil, perluasan akses pasar menjadi salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Pada pilar pariwisata, Bali Jagadhita VII 2026 mendukung penguatan pariwisata berkualitas melalui rangkaian Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 pada

28-30 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh enam desa wisata Bali-Nusra dan berhasil menghadirkan 286 *seller* serta 404 *buyer* dari 44 negara, dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp6,9 triliun. Capaian ini menunjukkan tingginya minat pasar internasional terhadap destinasi wisata Bali dan Nusa Tenggara. Potensi transaksi sebesar Rp6,9 triliun juga mengindikasikan bahwa promosi pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat potensi penerimaan devisa dan mendorong aktivitas ekonomi pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata.

Pada pilar investasi, Bali Jagadhita VII 2026 menghadirkan Bali Investment Forum 2026 yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS). Berbagai proyek investasi unggulan yang dipromosikan pada *showcasing* dan presentasi Bali Jagadhita Investment Forum, merupakan hasil kurasi Bali Investment Challenge 2026. Pendalaman lebih lanjut terkait proyek dilakukan melalui sesi *one on one business meeting* antara *project owner* dan calon investor. Sesi *one on one meeting* tersebut diikuti oleh lebih dari 35 calon investor dari berbagai negara, termasuk hadir pula Duta Besar Bulgaria, Duta Besar Kerajaan Bahrain, Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Republik Armenia, Duta Besar Republik Islam Pakistan, Duta Besar Rumania, serta perwakilan konsulat dan atase perdagangan dari berbagai negara sahabat. Program ini merupakan wujud kolaborasi PIKBS dalam menghasilkan 22 proyek investasi potensial dari Bali, NTB, dan NTT. Beberapa proyek tersebut di antaranya KEK Kesehatan Sanur, proyek penerangan jalan, dan proyek pengadaan electric vehicle yang kemudian disusun dalam Katalog Investasi, dan selanjutnya diserahkan oleh PIKBS kepada perwakilan duta besar dan perwakilan delegasi yang hadir. Melalui publikasi Katalog Investasi ini diharapkan mampu mempermudah perluasan

informasi dan promosi proyek investasi strategis kepada investor potensial yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung peningkatan realisasi investasi. Pengembangan 22 proyek investasi potensial dari Bali, NTB, dan NTT menunjukkan semakin kuatnya upaya menjadikan kawasan Balinusra sebagai tujuan investasi yang kompetitif. Inisiatif tersebut menjadi penting mengingat investasi merupakan sumber utama peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Sinergi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diusung dalam Bali Jagadhita sejalan dengan struktur ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor-sektor terkait pariwisata. Penguatan UMKM, promosi destinasi wisata, dan perluasan investasi diharapkan dapat menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi lokal. Selain promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi, Bali Jagadhita VII 2026 turut menghadirkan berbagai kegiatan kreatif, antara lain lomba masak serba ikan yang bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta PLN UIP Bali, lomba kreasi kerajinan tas dari bahan purna pakai bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, lomba gebogan bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, lomba videografi bersama Institut Desain dan Bisnis Bali, lomba melukis motif endek, serta lomba mewarnai anak. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM dan edukasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan melalui kegiatan sosialisasi produk pembiayaan UMKM, edukasi QRIS, serta perlindungan konsumen. Selain itu, Bank Indonesia turut menghadirkan layanan Kas Keliling untuk penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Bali Jagadhita VII 2026 menunjukkan pentingnya sinergi antara promosi perdagangan, pengembangan pariwisata berkualitas, dan peningkatan investasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi Bali. Melalui perluasan akses pasar UMKM, peningkatan konektivitas dengan pasar global,

serta promosi proyek investasi strategis, Bali Jagadhita diharapkan mampu menjadi katalis bagi penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, peningkatan daya saing daerah, serta pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar B4.1. Dokumentasi Kegiatan Bali Jagadhita





BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net outflow sebesar Rp0,90 triliun sejalan penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata serta momentum libur pada triwulan II 2026. Kemudian, velositas pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. BI Bali pun terus memperkuat sistem pembayaran dan mendorong digitalisasi melalui kerja sama berbagai pihak guna mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Net Inflow

Tw I 2026 **1,76%**

Tw II 2026 **Rp0,90T**



Pertumbuhan RRH
Nominal Transaksi RTGS

Tw I 2026 **-26,21%**

Tw II 2026 **-26,61%**



Pertumbuhan RRH
Nominal Transaksi SKNBI

Tw I 2026 **-9,54%**

Tw II 2026 **-3,55%**



Pertumbuhan Nominal
Transaksi UE

Tw I 2026 **39,44%**

Tw II 2026 **37,48%**



Pertumbuhan Nominal
Transaksi QRIS

Tw I 2026 **496,25%**

Tw II 2026 **75,10 %**

GAMBARAN UMUM

Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net outflow sebesar Rp0,90 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatat net inflow sebesar Rp1,76 triliun. Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal masyarakat seiring penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata serta momentum libur pada triwulan II 2026. Kondisi ini juga sejalan dengan pola siklikal aliran uang kartal di Bali yang pada triwulan II cenderung mengalami net outflow seiring peningkatan kebutuhan transaksi masyarakat.

Kemudian, velositas pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Pada layanan BI-FAST, pertumbuhan nominal dan volume transaksi terus tumbuh menjadikan BI-FAST sebagai salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Sementara itu, transaksi pada SKNBI dan BI-RTGS mengalami perbaikan. Peningkatan velositas transaksi juga tercermin dari peningkatan transaksi kartu kredit, uang elektronik, dan QRIS, meskipun transaksi ATM/debit mengalami perlambatan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten memperkuat perannya dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, baik berbasis tunai maupun digital, guna menunjang aktivitas perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dorongan terhadap peningkatan penggunaan transaksi nontunai terus diakselerasi melalui kerja sama erat dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Inisiatif ini melibatkan institusi keuangan, kalangan pendidikan, generasi muda, serta masyarakat luas, dengan harapan dapat menciptakan proses transaksi yang lebih praktis dan aman, sekaligus memperluas akses keuangan serta membangun ekosistem pembayaran yang semakin modern dan inklusif di Bali.

4.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI

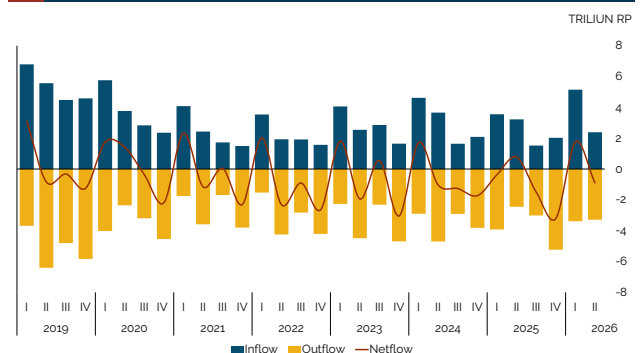
Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net outflow sebesar Rp0,90 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatat net inflow sebesar Rp1,76 triliun. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan aliran uang masuk (*inflow*) menjadi Rp2,39 triliun, dari Rp5,14 triliun pada triwulan sebelumnya, seiring normalisasi setoran uang kartal perbankan setelah tingginya inflow pada awal tahun. Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) tercatat relatif stabil sebesar Rp3,29 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan Rp3,39 triliun pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan uang kartal masyarakat yang tetap terjaga, antara lain didukung oleh aktivitas ekonomi dan pariwisata serta periode libur pada triwulan II 2026.

4.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI

4.2.1. Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Pada triwulan II 2026, transaksi melalui BI-FAST meningkat baik dari nominal maupun sisi volume. Berdasarkan

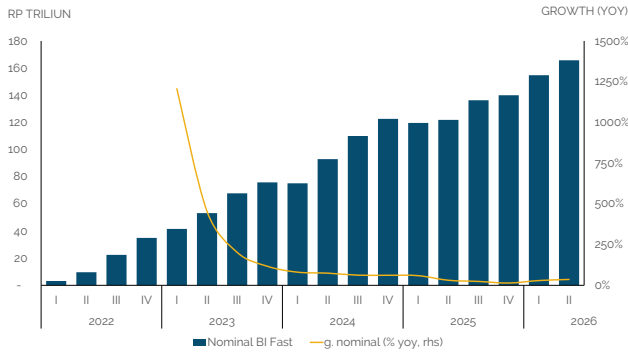
Grafik 4.1. Aliran Uang Kartal di Provinsi Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

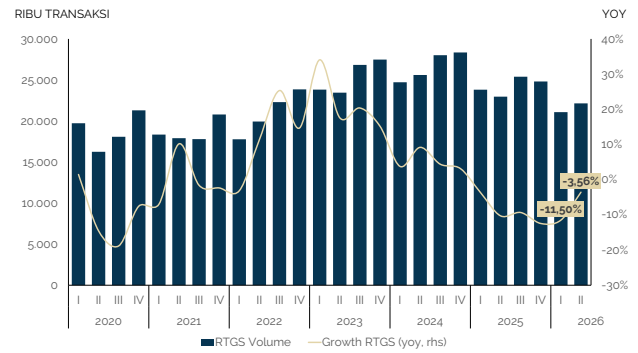
data BI-FAST di Bali, nilai transaksi menembus Rp166 triliun, tumbuh 36,02% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.2). Sementara itu, volume transaksi mencapai 60,52 juta, tumbuh 41,82% (yoy) atau meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 (Grafik 4.3). Tingginya pertumbuhan BI-FAST menunjukkan semakin kuatnya preferensi masyarakat dan pelaku usaha terhadap instrumen pembayaran digital yang cepat, murah, dan *real-time*. Di Bali, peningkatan penggunaan BI-FAST juga didukung oleh tingginya aktivitas sektor jasa, perdagangan, serta pariwisata yang membutuhkan fleksibilitas transaksi

Grafik 4.2. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST



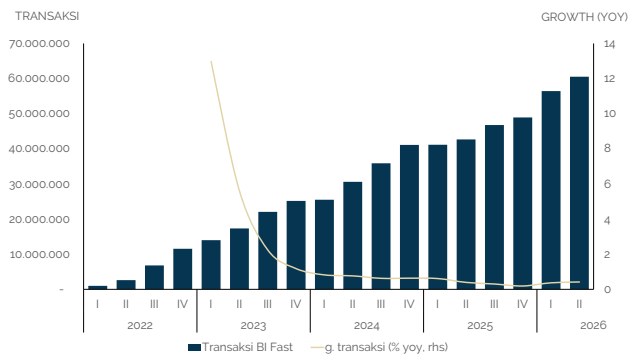
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali



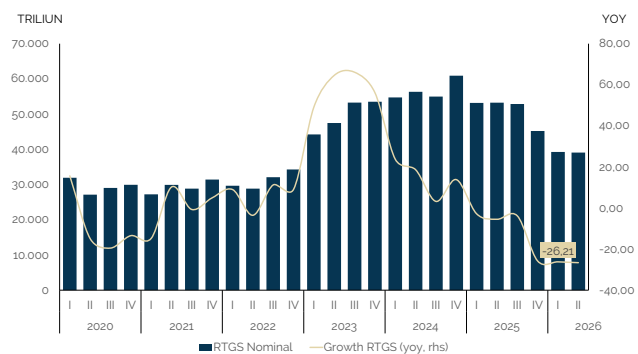
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali



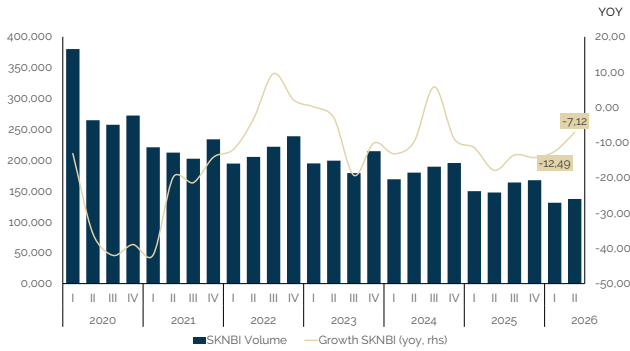
Sumber: Bank Indonesia, diolah

antarpelaku ekonomi.

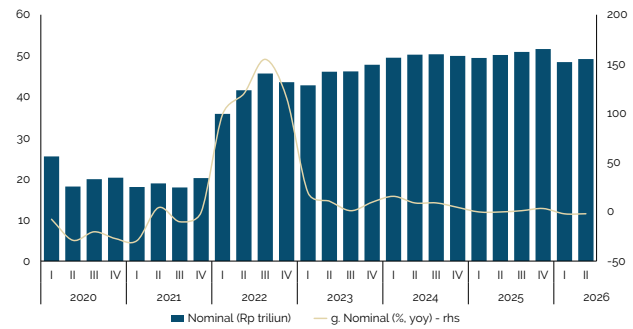
Penggunaan Bank Indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS)¹ di Provinsi Bali pada triwulan II 2026 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS terkontraksi sebesar -3,56 % (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang turun -11,50% (yoy) (Grafik 4.4). Dari sisi nominal, transaksi mengalami penurunan sebesar -26,61% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar -26,21% (yoy) (Grafik 4.5). Meskipun masih mengalami kontraksi, perlambatan penurunan transaksi BI-RTGS mengindikasikan mulai membaiknya aktivitas transaksi korporasi dan transaksi bernilai besar. Namun demikian, sebagian transaksi bernilai menengah terindikasi mulai bergeser ke instrumen pembayaran yang lebih efisien seperti BI-FAST.

Kinerja transaksi nontunai melalui kliring SKNBI di Provinsi Bali membaik pada triwulan II 2026, meskipun masih dalam teritori kontraksi. Di sisi volume, pertumbuhan transaksi SKNBI secara tahunan mengalami kontraksi sebesar -7,12% (yoy), membaik dibandingkan penurunan pada triwulan I 2026 sebesar -12,49% (yoy) (Grafik 4.6). Sejalan dengan perbaikan volume, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI juga menunjukkan perbaikan, dari kontraksi -7,68% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi kontraksi -3,55% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 4.7). Kontraksi transaksi SKNBI yang masih berlangsung juga menunjukkan adanya pergeseran preferensi penggunaan sistem pembayaran dari kanal kliring konvensional menuju kanal pembayaran digital yang menawarkan kecepatan dan kemudahan lebih tinggi.

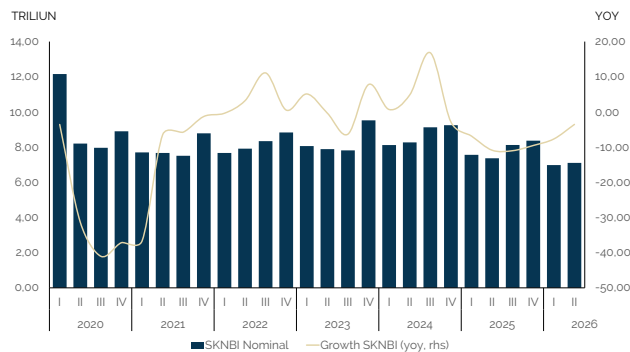
1. BI-RTGS merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika per transaksi secara individual. BI-RTGS digunakan untuk transfer dana dalam jumlah besar (>Rp100 juta).

Grafik 4.6. Perkembangan Vol. Transaksi SKNBI Bali

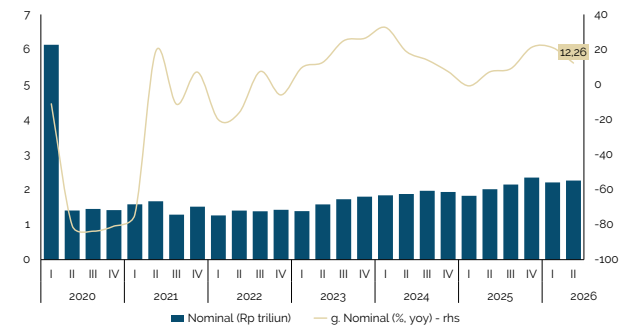
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/debit di Bali

Sumber: BPD Bali, diolah

Grafik 4.7. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

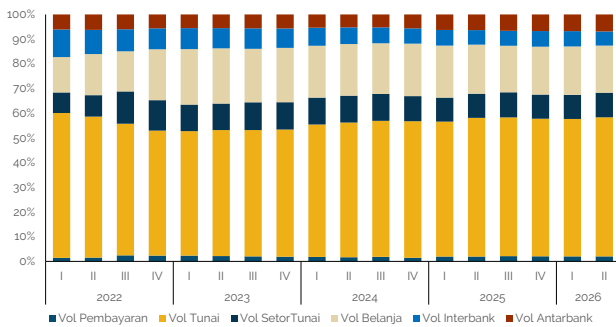
4.2.2. Sistem Pembayaran Retail

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus mengamati perkembangan transaksi dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari kartu ATM/debit, kartu kredit, serta penggunaan Uang Elektronik (UE). Pada triwulan II 2026, nominal transaksi kartu ATM/debit mengalami penurunan sedangkan transaksi dengan kartu kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi nominal, transaksi kartu ATM/debit turun sebesar 1,97 (yoy). Volume transaksi ATM/debit juga tercatat lebih rendah dengan pertumbuhan -6,35 (yoy). Sementara itu, nominal transaksi kartu kredit tercatat tumbuh tinggi sebesar 21,06% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,26% (yoy) (Grafik 4.9). Adapun volume transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 juga menunjukkan peningkatan, tumbuh 20,67% (yoy).

Berdasarkan jenisnya, volume transaksi ATM/debit pada triwulan II 2026 didominasi oleh penarikan tunai, sementara transaksi kartu kredit terutama digunakan

untuk aktivitas belanja. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih terjaga selama triwulan II 2026. Pada kartu ATM/debit, penarikan tunai menyumbang 56,28% dari total transaksi, diikuti transaksi belanja sebesar 19,09% (Grafik 4.10). Di sisi lain, penggunaan kartu kredit hampir sepenuhnya diarahkan untuk belanja, dengan pangsa mencapai 99,01% dari total transaksi (Grafik 4.11). Divergensi perkembangan transaksi ATM/debit dan kartu kredit menunjukkan perubahan perilaku pembayaran masyarakat yang semakin mengarah pada instrumen pembayaran berbasis kredit. Kondisi ini juga mencerminkan terjaganya konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat menengah atas dan wisatawan yang memiliki intensitas penggunaan kartu kredit relatif lebih tinggi.

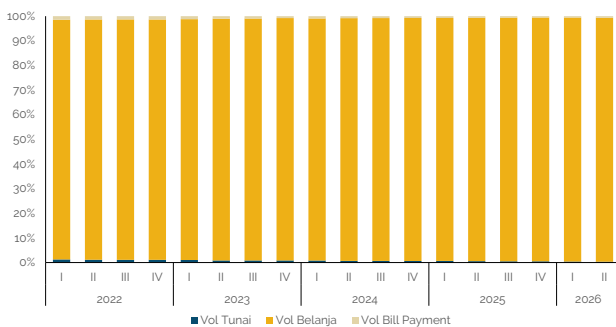
Penggunaan Uang Elektronik (UE) sebagai salah satu instrumen APMK menunjukkan pertumbuhan yang tetap tinggi, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Secara nominal, nilai transaksi UE pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,27 triliun, tumbuh sebesar 37,48% (yoy) (Grafik 4.12). Tingginya

Grafik 4.10. Volume Transaksi Kartu ATM/debit Berdasarkan Jenis Transaksi

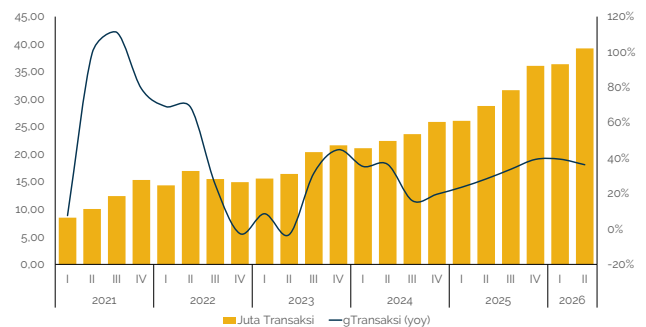
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Perkembangan Nominal Transaksi UE Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan Transaksi UE di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pertumbuhan nominal transaksi UE juga ditopang dari sisi volume. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan volume transaksi UE mencapai 36,31% (yoy)(Grafik 4.13).

Ditinjau dari jenis penggunaannya, volume transaksi Uang Elektronik pada triwulan II 2026 didominasi oleh transaksi untuk belanja. Aktivitas belanja menyumbang 94,70% dari total transaksi, diikuti oleh transaksi transfer sebesar 4,86% dan tarik tunai sebesar 0,43% (Grafik 4.14). Peningkatan penggunaan uang elektronik tersebut juga sejalan dengan meningkatnya agenda penyaluran bansos pemerintah yang direalisasikan pada triwulan II 2026. Peningkatan penggunaan uang elektronik menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital bernilai kecil hingga menengah dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan tersebut sejalan dengan semakin tingginya akseptasi pembayaran digital pada sektor perdagangan, transportasi, kuliner, dan destinasi wisata di Bali.

Sementara itu, perkembangan implementasi kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga triwulan II 2026

Grafik 4.14. Volume Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Jenis Transaksi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

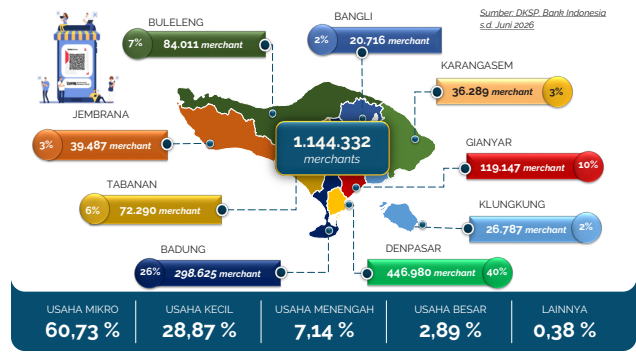
terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Perkembangan transaksi dari sisi nominal relatif meningkat signifikan dengan nilai sebesar Rp10,08 triliun (tumbuh 75,10% yoy) dan lebih tinggi dari posisi triwulan sebelumnya yang mencapai Rp8,16 triliun. Tingginya nominal transaksi QRIS ditopang oleh volume transaksi mencapai 97,44 juta transaksi, tumbuh 169,52% (yoy). Selain itu, peningkatan juga terlihat dari sisi jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi Bali. Jumlah pengguna QRIS tumbuh sebesar 11,45 % (yoy) atau menjadi sebanyak 1.227.028 pengguna per akhir Triwulan

II 2026. Pada periode yang sama, jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 1.144.332, didominasi oleh usaha mikro sebesar 60,73% dengan sebaran merchant paling besar di wilayah Kota Denpasar (39,36%), Kabupaten Badung (26,33%), dan Kabupaten Gianyar (10,39%). Sementara itu, 45,11% merchant QRIS lainnya tersebar di Kabupaten Buleleng, Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Jembrana. Pertumbuhan transaksi QRIS yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen pembayaran nontunai lainnya mengindikasikan semakin kuatnya pergeseran perilaku pembayaran masyarakat menuju transaksi digital berbasis QR. Tingginya pertumbuhan tersebut juga didukung oleh karakteristik ekonomi Bali yang didominasi sektor perdagangan, restoran, akomodasi, dan UMKM yang relatif mudah mengadopsi QRIS sebagai sarana pembayaran.

Transaksi QRIS Cross Border (CB) juga menunjukkan tren yang positif. Inovasi QRIS CB menjadi terobosan penting dalam memfasilitasi transaksi internasional yang lebih mudah dan efisien. Pada bulan Juni 2026, nilai transaksi QRIS CB mencapai Rp24,31 miliar,

Gambar 4.1. Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Bali

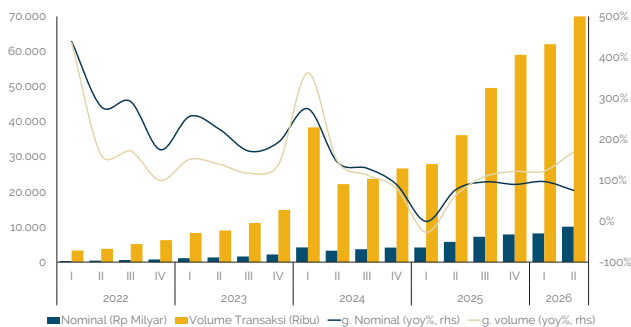


Sumber: Bank Indonesia, diolah

meningkat 496,25% (yoy). Kenaikan signifikan ini sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai 90.009 transaksi atau tumbuh 2.776,7% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan mayoritas transaksi dilakukan oleh pengguna dari Malaysia.

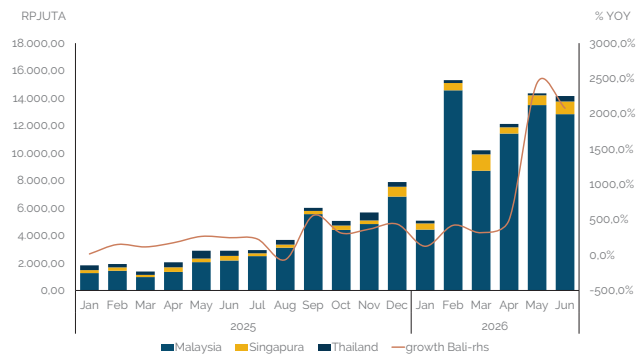
Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran pada triwulan II 2026 menunjukkan semakin kuatnya aktivitas ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan uang kartal meningkat yang tercermin dari posisi net outflow. Di sisi lain, transaksi digital terus mengalami akselerasi,

Grafik 4.17. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali



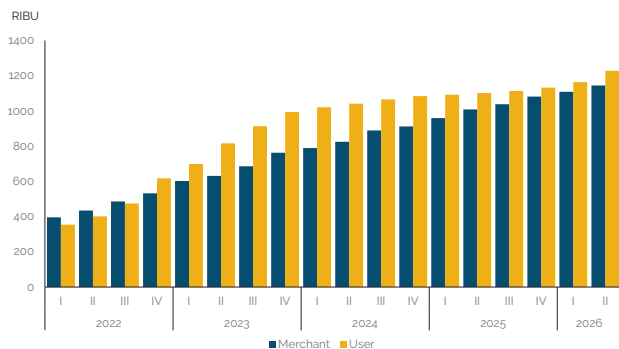
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Nominal Transaksi QRIS CB



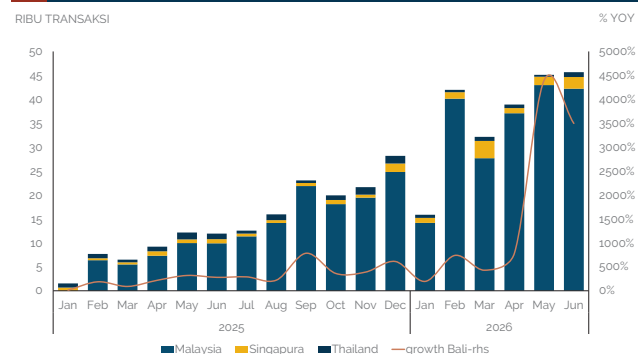
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16. Volume Transaksi QRIS CB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

khususnya melalui BI-FAST, uang elektronik, dan QRIS. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya meningkatkan permintaan transaksi secara keseluruhan, tetapi juga mendorong semakin dalamnya digitalisasi sistem pembayaran di daerah.

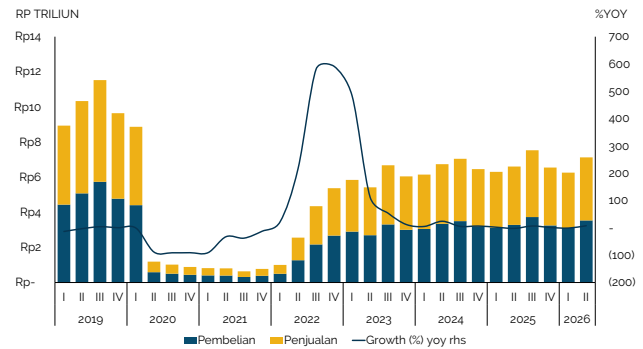
4.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI

Aktivitas transaksi jual-beli valuta asing (valas) di Provinsi Bali melalui KUPVA pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan, sejalan dengan pola musiman kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai meningkat di pertengahan tahun. Sepanjang triwulan II 2026 total transaksi KUPVA BB tercatat sebesar Rp7,12 triliun, terdiri dari penjualan valas sebesar Rp3,58 triliun, dan pembelian valas sebesar Rp3,53 triliun. Secara triwulanan, total transaksi pada triwulan II 2026 meningkat sebesar 13,85% (qto), sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan di Bali sebesar 18,41% (qto), terutama dari negara Australia, Tiongkok, dan India. Secara tahunan, total transaksi jual-beli valas tumbuh sebesar 7,87% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,70% (yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang terkontraksi 1,96% (yoy).

Layanan penukaran valas melalui KUPVA BB di Bali, sebagai salah satu sarana penunjang pariwisata, didukung oleh jumlah jaringan kantor yang besar. Hingga triwulan II 2026, terdapat 141 Kantor Pusat KUPVA BB dan 458 Kantor Cabang (baik berlokasi di Bali maupun luar bali). Sebaran jaringan kantor KUPVA BB di Bali terutama terkonsentrasi di tiga wilayah tujuan wisata, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar.

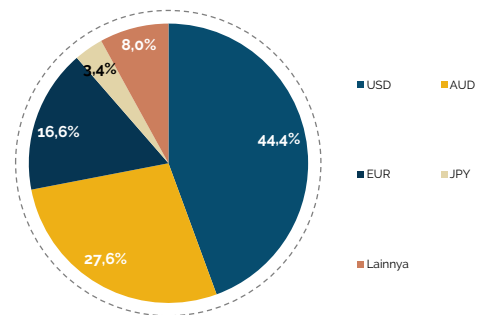
Berdasarkan jenis mata uang, transaksi penukaran valas pada KUPVA BB di Bali tetap didominasi oleh USD. Selama triwulan II tahun 2026 transaksi penukaran USD mencapai 44,4% dari total transaksi, diikuti AUD, EUR, dan JPY masing-masing sebesar 27,6%, 16,6%, dan 3,4%. Adapun 8% lainnya merupakan mata uang yang berasal dari berbagai negara, baik Asia, Eropa, Amerika, hingga

Grafik 4.19. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20. Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Triwulan 1 Tahun 2026 di Bali Berdasarkan Mata Uang



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Afrika. Di luar USD, struktur penukaran berdasarkan jenis mata uang tersebut juga dapat memberikan gambaran negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung di Provinsi Bali.

4.4. UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

4.4.1. Sistem Pembayaran Tunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali terus mendorong ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas di masyarakat sekaligus memperkuat implementasi Gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Inisiatif ini tidak hanya difokuskan pada kelancaran peredaran uang dan stabilitas likuiditas, tetapi juga pada peningkatan kesadaran publik untuk lebih menghargai dan merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya, BI Bali menyediakan berbagai layanan perbankan seperti setoran dan pembayaran, fasilitas penukaran uang, kas keliling dalam kota dan luar kota serta kegiatan remise yang dilakukan secara rutin. Upaya edukasi kepada masyarakat turut diperkuat

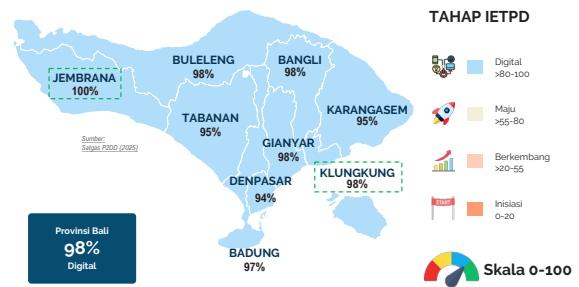
melalui kampanye CBP Rupiah, yang menekankan pentingnya kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap Rupiah, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra di wilayah Bali. Sepanjang triwulan I 2026 dan bulan April s.d. Mei 2026, sejumlah inisiatif konkret telah direalisasikan untuk mendukung tujuan tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan layanan kas keliling bersama dengan 12 Perbankan dalam rangka Serambi 2026 serta berkolaborasi bersama dengan 6 Perbankan di 30 titik penukaran uang di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali pada triwulan I 2026. Sementara itu, KPwBI Provinsi Bali juga melaksanakan 2 kali layanan kas keliling dalam kota di Kabupaten Denpasar dan 1 kali layanan kas keliling luar kota di Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung pada triwulan II 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kebutuhan transaksi tunai masyarakat yang tinggi pada triwulan laporan.
2. Bank Indonesia Bali secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah untuk menumbuhkan kecintaan dan menjaga Rupiah oleh masyarakat. Sepanjang triwulan I 2026, tercatat sebanyak 34 kali aktifitas edukasi yang berhasil melibatkan total 14.763 peserta dan pada bulan April dan Mei 2026 tercatat sebanyak 30 aktifitas edukasi serta melibatkan total 31.637 peserta. Program-program tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, pencapaian rekor MURI, termasuk kunjungan edukatif yang memberikan pengetahuan praktis mengenai cara mengenali keaslian Rupiah, merawatnya agar tetap layak edar, menggunakan Rupiah secara bijak, serta memahami peran dan nilai Rupiah dalam perekonomian nasional.

4.4.2. Sistem Pembayaran Nontunai

Secara umum, KPwBI Provinsi Bali terus mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Bali, yang meliputi perluasan penggunaan QRIS dan juga elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, KPwBI Provinsi Bali berperan aktif

Gambar 4.2. Indeks ETPD Provinsi Bali Semester II Tahun 2025



Sumber: Bank Indonesia, diolah

melalui berbagai kegiatan kolaborasi baik dengan Pemerintah Daerah, Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), dan komunitas dan mitra strategis perluasan QRIS lainnya, kemudian dalam hal elektronifikasi pemerintah daerah KPwBI Provinsi Bali terus berkolaborasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui TP2DD, akselerasi transformasi digital difokuskan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang mencakup optimalisasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan penilaian semester II 2025, indeks ETPD Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang positif, di mana seluruh pemerintah daerah telah berada pada tahap digital dengan nilai IETPD di atas 80% (Gambar 4.2). Sebagai bagian dari TP2DD, KPwBI Provinsi Bali turut melakukan asesmen digitalisasi transaksi pemda serta menjalin koordinasi intensif untuk meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran daerah, termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang diterbitkan oleh BPD Bali.

Pada triwulan II 2026, KPwBI Provinsi Bali telah melaksanakan sejumlah program strategis, antara lain:

1. Roadshow Edukasi BALIGIVATION 2026

Sebagai tindaklanjut Kick-off BALIGIVATION 2026, KPwBI Provinsi Bali berkolaborasi dengan Universitas Udayana dan BNI untuk melakukan *roadshow* edukasi di Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Universitas Udayana pada 24 Juni 2026, kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 200 Mahasiswa dan 100 Pelajar SMA dan SMK. Rangkaian kegiatan meliputi

edukasi CBP Rupiah, Digitalisasi Sistem Pembayaran, dan Pelindungan Konsumen dengan narasumber Bank Indonesia, serta materi literasi keuangan yang dibawakan oleh BNI, roadshow edukasi akan terus dilakukan ke seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis kepada berbagai segmen Masyarakat di Provinsi Bali, seperti pelajar, Masyarakat Banjar, lansia, dll.

meliputi cakupan QRIS Cross Border, QRIS Tap, Pelindungan Konsumen, CBP Rupiah, APU-PPT, dan promosi kuliner *legend* dan *hidden* gem asal Bali.

2. Pasar Rakyat Bali Go Digital

Sebagai upaya untuk mengakselerasi capaian QRIS di Provinsi Bali, khususnya user dan merchant QRIS secara inklusif di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, KPwBI Provinsi Bali berkolaborasi dengan 13 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tingkat Provinsi serta seluruh Kota dan Kabupaten untuk melakukan digitalisasi pada 26 Pasar di Provinsi Bali dengan bentuk kegiatan kompetisi kepada PJP selaku motor penggerak digitalisasi di Provinsi Bali, dimana setiap PJP akan melakukan digitalisasi terhadap 2 pasar, dengan ketentuan 1 pasar area Sarbagita dan 1 pasar di luar Sarbagita dalam bentuk edukasi dan akuisisi kepada masyarakat dan pedagang untuk menjadi *user* dan *merchant* QRIS.

3. Advisory KPwBI Provinsi Bali dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Bali

Sebagai upaya dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Bali, KPwBI Provinsi Bali melakukan berbagai kegiatan strategis yang bersinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Level Provinsi dan Kota/Kabupaten melalui berbagai program strategis yang meliputi:

- a. Kolaborasi Semarapura Festival : Dalam rangka memperluas akseptasi digital di Provinsi Bali, KPwBI Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan Semarapura Festival yang dilaksanakan pada 28 April sampai dengan 1 Mei 2026, rangkaian kegiatan meliputi edukasi dan experience QRIS kepada masyarakat Klungkung, serta pemberian insentif atau *sweetener* kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan QRIS berkolaborasi dengan TP2DD Kabupaten Klungkung.
- b. Rapat Persiapan HLM TPID-TP2DD Kota Denpasar : Kegiatan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 Rapat membahas rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam HLM dan materi serta program yang akan di-launching pada HLM dimaksud. Dalam kegiatan ini Bank Indonesia menyampaikan masukan terkait pentingnya memenuhi kriteria HLM yang telah ditentukan oleh Satgas P2DD antara lain kehadiran pimpinan, kelengkapan dokumen pendukung, serta melaksanakan tindak lanjut atas HLM yang akan dilaksanakan.
- c. HLM TP2DD Kabupaten Karangasem : HLM dilaksanakan pada 22 Mei 2026 di Aula Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, dimana kegiatan dihadiri oleh Bupati Karangasem, Kapolres Karangasem, Ketua Komisi 3 DPRD Karangasem, serta OPD, dan stakeholder terkait. Bank Indonesia menyampaikan pentingnya penguatan kebijakan penguatan Digitalisasi Daerah (P2DD) sesuai arah kebijakan pemerintah, yang perlu berfokus pada perbaikan pelayanan serta mendorong terciptanya Pemerintahan yang bersih dan adil. Realisasi penerimaan pajak/retribusi dan belanja pemerintah di Karangasem perlu terus didorong terutama dengan berfokus pada kanal digital.

DOKUMENTASI KEGIATAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI







BOKS 4



QRIS CROSS BORDER DAN PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL BALI



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tuntular
No. 4, Denpasar



Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menghadapi kebutuhan yang semakin besar terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman, dan terhubung dengan ekosistem digital global. Dalam beberapa tahun terakhir, QRIS berkembang tidak hanya sebagai instrumen pembayaran domestik, tetapi juga sebagai fondasi penguatan ekonomi digital yang mendukung efisiensi transaksi, inklusi keuangan, serta pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, berbagai program perluasan akseptasi dan edukasi QRIS terus dilakukan untuk memperkuat pengalaman transaksi digital bagi masyarakat maupun wisatawan, sekaligus mendukung visi Bali sebagai *Digital Island*. Digitalisasi sistem pembayaran memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor perdagangan, akomodasi, makan minum, dan jasa pariwisata. Kemudahan transaksi digital dapat meningkatkan efisiensi pembayaran, mempercepat perputaran ekonomi, serta memperluas akses pelaku UMKM terhadap ekosistem ekonomi formal.

Salah satu fokus pengembangan QRIS di Bali adalah

penguatan implementasi **QRIS Cross Border**, yang memungkinkan wisatawan mancanegara melakukan pembayaran menggunakan aplikasi pembayaran negaranya masing-masing pada merchant QRIS di Indonesia. Kehadiran teknologi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Melalui program **QRIS AMIGO Bali 2026**, Bank Indonesia Provinsi Bali memperluas edukasi dan pengalaman penggunaan QRIS Cross Border di destinasi wisata unggulan. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman wisatawan dan pelaku usaha terhadap pembayaran lintas negara, tetapi juga memperkuat kesiapan destinasi wisata dalam menyambut semakin tingginya mobilitas wisatawan internasional. Implementasi QRIS AMIGO Bali 2026 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi di destinasi wisata utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar B3.1. Bagi destinasi wisata internasional seperti Bali, kemudahan transaksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan. Ketersediaan QRIS Cross

BOKS 4

76

Border memungkinkan wisatawan melakukan transaksi secara langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukarkan uang tunai dalam jumlah besar. Kemudahan tersebut berpotensi meningkatkan kenyamanan bertransaksi sekaligus mendorong konsumsi wisatawan pada sektor akomodasi, restoran, perdagangan ritel, dan berbagai usaha pendukung pariwisata.

Penguatan QRIS Cross Border menjadi semakin relevan mengingat Bali merupakan salah satu destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia. Di tengah meningkatnya preferensi terhadap pembayaran non tunai, perluasan akseptasi QRIS Cross Border berpotensi mendukung peningkatan konsumsi wisatawan sekaligus memperluas peluang usaha bagi UMKM lokal. Di samping memberikan kemudahan transaksi, penggunaan QRIS Cross Border juga meningkatkan efisiensi pengelolaan pembayaran bagi merchant melalui pencatatan transaksi yang lebih terintegrasi dan transparan. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital oleh wisatawan mancanegara, transaksi QRIS Cross Border di Bali menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi sebagaimana terlihat pada Grafik B3.1 dan Grafik B3.2.

Selain melalui sektor pariwisata, perluasan penggunaan QRIS juga dilakukan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan **QRIS Bali Summer**

Run 2026 (Gambar B3.2), yang mengintegrasikan digitalisasi pembayaran dengan kegiatan olahraga, budaya, keberlanjutan lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga dengan pembentukan perilaku dan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara nyata dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperluas literasi pembayaran digital sekaligus meningkatkan jumlah pengguna dan merchant QRIS secara berkelanjutan.

Integrasi QRIS dalam kegiatan yang melibatkan banyak lapisan masyarakat memberikan peluang untuk memperluas literasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi digital. Di saat yang sama, sinergi antara regulator, pemerintah daerah, industri sistem pembayaran, UMKM, dan komunitas menjadi modal penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan QRIS di Bali tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan sektor pariwisata, serta terwujudnya Bali sebagai destinasi yang semakin digital, terhubung, dan berdaya saing di tingkat global.

Ke depan, pengembangan QRIS Cross Border dan perluasan ekosistem QRIS domestik di Bali diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi digital daerah

Gambar B3.1. QRIS AMIGO Bali 2026



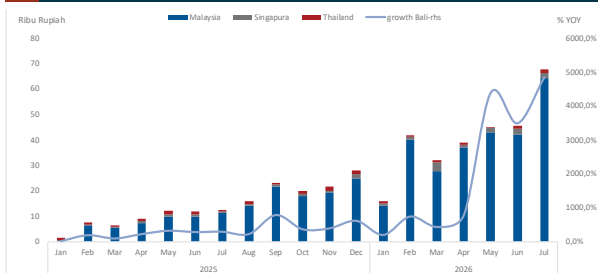
Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia, 2026

Gambar B3.2. QRIS Bali Summer Run 2026



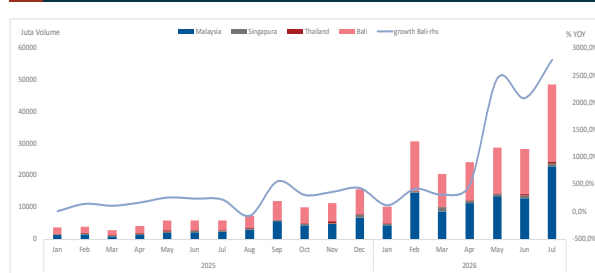
Sumber: Dokumentasi Bank Indonesia, 2026

Grafik B3.1. Nominal Transaksi QRIS Cross Border Provinsi Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.1. Volume Transaksi QRIS Cross Border Provinsi Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

dengan ekosistem pembayaran global. Bagi Bali yang memiliki tingkat keterbukaan ekonomi dan ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata, transformasi sistem pembayaran menjadi faktor

penting untuk meningkatkan daya saing destinasi, mendukung pertumbuhan UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.



BAB V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, mendukung capaian pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan II 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan nasional, tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2025 mencatat kenaikan dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Angkatan Kerja (Juta Orang)

Februari
2026

2,66

November
2025

2,71



Kemiskinan (%)

September
2025

3,42

Maret
2025

3,72



Pengangguran Terbuka (%)

Februari
2026

1,59

November
2025

1,45



Gini Ratio

September
2025

0,333

Maret
2025

0,353

GAMBARAN UMUM

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, mendukung capaian pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan II 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan penyerapan tenaga kerja terbesar secara pangsa sektoral terjadi pada LU Pertanian, Perdagangan, dan Akomodasi dan Makan Minum.

Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan kondisi nasional, tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada ketimpangan dan intensitas kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat Bali terus membaik.

Dengan perkembangan ini, Bali terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja pada berbagai LU utama, dan stabilitas inflasi yang terjaga.

5.1. KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali terjaga baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat relatif stabil pada level yang rendah yakni sebesar 1,52% pada Mei 2026, menurun 0,07 poin persentase dibandingkan Februari 2026 di tengah jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 2,70 juta orang, naik sekitar 37,70 ribu orang dibandingkan Februari 2026. TPT Bali yang hanya sebesar 1,52% menempatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pasar kerja yang relatif ketat (*tight labor market*), di mana sebagian besar angkatan kerja dapat terserap ke dalam aktivitas ekonomi. Tingginya aktivitas pariwisata dan sektor jasa menjadi faktor utama yang menopang kondisi tersebut.

Adapun penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada LU Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, serta

Akomodasi dan Makan Minum. Lebih lanjut, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui penyampaian informasi mengenai investasi melalui *website* Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) yang dapat mendorong persepsi positif investor dan memperkuat realisasi investasi pada berbagai sektor unggulan di Bali. Selain itu, pada kegiatan Bali Jagadhita 2026, juga telah diluncurkan Buku Katalog Investasi PIKBS yang memuat mengenai perkembangan perekonomian serta profil investasi potensial. Adapun prinsip pengelolaan PIKBS diharapkan mampu menyinergikan seluruh peran kementerian dan lembaga, melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan proyek investasi di sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan padat karya.

Secara pangsa sektoral, LU Pertanian, Perdagangan, dan Akomodasi dan Makan Minum menjadi penyumbang

Tabel 5.1. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali

KEGIATAN UTAMA	2021		2022		2023		2024		2025			2026	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov	Feb	Mei
Penduduk Usia Kerja (15+ thn) (Jt Orang)	3,48	3,51	3,48	3,56	3,53	3,49	3,51	3,52	3,54	3,55	3,56	3,56	3,57
Angkatan Kerja (15-65 thn) (Jt Orang)	2,57	2,58	2,68	2,74	2,73	2,69	2,71	2,71	2,74	2,74	2,71	2,66	2,70
Bekerja (Jt Orang)	2,43	2,44	2,55	2,61	2,62	2,62	2,66	2,67	2,69	2,70	2,67	2,62	2,66
Pengangguran (Rb Orang)	139,14	138,67	129,68	131,47	101,82	72,42	50,68	48,68	43,13	40,99	39,25	43,32	40,97
Bukan Angkatan Kerja (Rb Orang)	915,17	928,57	794,90	824,60	805,83	799,97	793,45	805,79	799,04	804,80	843,10	904,14	874,45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,71	73,54	77,14	76,86	77,19	77,08	77,37	77,11	77,40	77,31	76,29	74,63	75,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,42	5,37	4,84	4,80	3,73	2,69	1,87	1,79	1,58	1,49	1,45	1,59	1,52

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.2. Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)

Lapangan Usaha	2021		2022		2023		2024	2025	2026				
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov	Feb	Mei
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	564	534	599	519	503	496	514	480	515	464	417	497	483
Industri Pengolahan	305	394	391	404	422	384	437	386	428	404	410	358	355
Konstruksi	155	155	160	176	182	175	184	200	186	206	206	200	202
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	535	511	554	553	536	560	520	538	526	562	563	488	479
Transportasi dan Pergudangan	88	58	53	86	95	99	111	108	119	121	116	133	126
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	220	234	233	315	320	358	380	381	388	392	403	343	421
Jasa Keuangan dan Asuransi	67	63	72	63	65	56	73	74	73	68	63	70	55
Jasa Perusahaan	33	34	40	51	41	46	45	49	48	41	53	65	65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	112	137	117	126	101	114	102	115	106	108	112	118	110
Jasa Pendidikan	101	109	103	97	119	109	115	116	113	117	105	112	115
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59	56	79	60	47	49	51	50	53	53	44	60	50
Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi; Real Estate dan Jasa Lainnya	189	157	150	158	192	171	130	168	138	165	181	173	196
Jumlah	2.428	2.440	2.553	2.607	2.625	2.618	2.663	2.665	2.694	2.702	2.673	2.617	2.656

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali pada periode Mei 2026. Penyerapan tenaga kerja LU Pertanian menjadi yang tertinggi, selanjutnya pada LU Perdagangan dan Industri. Tingginya serapan tenaga kerja pada LU tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja pariwisata dan kebutuhan pangan di Provinsi Bali yang mendorong konsumsi komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil olahan produk lokal.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada Mei 2026 dibandingkan Februari 2026 terutama didorong oleh penurunan TPT pada kelompok pendidikan SMK dan Diploma ke atas. Menurunnya TPT lulusan Diploma ke atas mengindikasikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha yang membutuhkan kompetensi, keterampilan, dan kualifikasi tertentu. Kondisi ini mencerminkan membaiknya permintaan tenaga kerja terampil di Bali. Pada Mei 2026, TPT lulusan SMA tercatat sebesar 2,09%, lulusan SMK sebesar 1,87%, dan lulusan Diploma ke atas sebesar 1,20%. Dibandingkan Februari 2026, TPT lulusan SMA meningkat dari 1,69% menjadi 2,09%, sedangkan TPT lulusan SMK dan Diploma ke atas menurun masing-masing

dari 3,15% menjadi 1,87% dan dari 2,71% menjadi 1,20%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama terjadi pada kelompok tenaga kerja berpendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi. Di sisi lain, meningkatnya TPT lulusan SMA mengindikasikan bahwa kelompok tersebut masih menghadapi tantangan yang relatif lebih besar dalam memasuki pasar kerja, yang dapat mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia.

Struktur tenaga kerja Bali menunjukkan peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pekerja berpendidikan SMK dan Diploma, sementara pekerja berpendidikan SMP ke bawah masih mendominasi struktur ketenagakerjaan. Pada Mei 2026, jumlah pekerja lulusan SMK meningkat menjadi 435 ribu orang dari 351 ribu orang pada Februari 2026, sementara pekerja berpendidikan Diploma meningkat dari 142 ribu orang menjadi 188 ribu orang pada periode yang sama. Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin besarnya penyerapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis dan kompetensi

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)	2024	2025	2026	
	Februari	Februari	Februari	Mei
SMP ke bawah (%)	0,43	0,61	NA	1,23
SMA (%)	2,80	1,57	1,69	2,09
SMK (%)	3,01	2,57	3,15	1,87
Diploma I-III dan D IV-S III (%)	3,06	2,91	2,71	1,20
TOTAL	1,87	1,58	1,59	1,52

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2021		2022		2023		2024		2025			2026	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov	Feb	Mei
SMP ke bawah (ribu orang)	1.082	1.093	1.232	1.155	1.294	1.212	1.156	1.192	1.133	1.132	1.131	1.014	1.064
SMA (ribu orang)	555	534	513	571	486	555	608	604	649	632	591	689	581
SMK (ribu orang)	326	360	380	402	378	393	383	395	403	441	443	351	435
Diploma I / II / III (ribu orang)	136	122	123	148	123	135	159	138	154	144	136	142	188
Universitas (ribu orang)	328	331	305	331	344	323	357	336	355	353	372	421	388
TOTAL (Ribuan Orang)	2.427	2.440	2.553	2.607	2.625	2.618	2.663	2.665	2.694	2.702	2.673	2.617	2.656

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

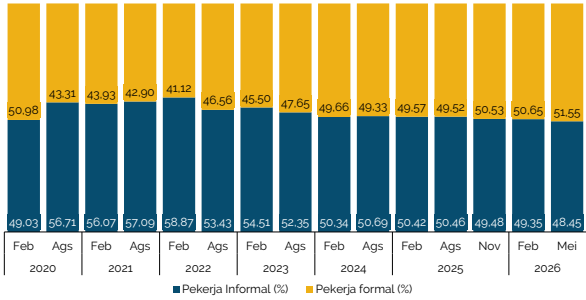
yang lebih tinggi, terutama pada sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas ekonomi modern lainnya

Sebagian besar pekerja di Provinsi Bali memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Jumlah pekerja lulusan setingkat SMP ke bawah tercatat mencapai 1,06 juta orang pada periode Mei 2026 atau 40,06% dari total pekerja, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2026 yakni 1,01 juta orang atau 38,74%. Sementara itu, pekerja dengan tingkat pendidikan diploma merupakan golongan pekerja dengan jumlah paling kecil, yakni 188 ribu orang dengan pangsa sebesar 7,07%.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah melalui Program Magang Nasional¹ berupaya memperkuat keterampilan teknis dan daya saing pekerja khususnya lulusan baru perguruan tinggi (*fresh graduate*) dengan memberikan pengalaman kerja di berbagai perusahaan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan visi pemerintahan yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah tersebut mencakup Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan pekerja, dengan tujuan mendorong produktivitas dan memajukan tenaga kerja Bali menuju kategori kelas menengah atas. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Bali juga memfasilitasi berbagai pelatihan yang menunjang kesiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dalam dunia kerja pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali juga memfokuskan upaya pada penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Program Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8*4*5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.

Grifik 5.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

(UMKM) untuk meningkatkan nilai tambah sektor riil sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan strategi ini, diharapkan struktur ketenagakerjaan di Bali dapat semakin bertransformasi menuju tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan berdaya saing.

Mayoritas pekerja di Provinsi Bali bekerja pada sektor formal. Pada Mei 2026, proporsi pekerja formal tercatat sebesar 51,55%, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 50,65%. Sementara itu, proporsi pekerja informal menurun dari 49,35% menjadi 48,45%. Peningkatan proporsi tenaga kerja formal mengindikasikan semakin membaiknya kualitas pekerjaan yang tercipta di Bali. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong pergeseran tenaga kerja menuju pekerjaan dengan tingkat perlindungan dan kepastian pendapatan yang lebih baik.

Pangsa pekerja formal menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah pekerja pada lapangan usaha (LU) pertanian. Sektor pertanian didominasi oleh pekerja informal dan terdapat indikasi penurunan tenaga kerja karena *shifting* ke pekerja formal atau pensiun tanpa ada pergantian dari tenaga kerja baru.

Tabel 5.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)

Status Pekerjaan Utama	2021		2022		2023		2024		2025			2026	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Nov	Feb	Mei
Berusaha sendiri (%)	15,17	16,15	15,46	17,22	15,53	18,27	16,38	18,41	16,96	21,13	20,34	18,32	20,52
Berusaha dibantu buruh tidak tetap (%)	20,76	18,29	21,57	15,88	18,58	14,55	14,62	13,19	14,16	11,12	11,17	12,29	11,49
Pekerjaan bebas di nonpertanian (%)	3,30	3,97	3,81	4,01	4,49	3,72	5,02	3,75	5,10	5,81	5,92	6,04	4,63
Pekerja bebas di pertanian (%)	1,51	1,92	1,29	2,43	1,40	2,46	1,65	2,41	2,80	2,02	1,63	2,54	1,13
Pekerja tak dibayar (%)	15,33	16,76	16,74	13,89	14,51	13,35	12,67	12,93	11,40	10,38	10,42	10,17	10,68
Pekerja Informal (%)	56,07	57,09	58,87	53,43	54,51	52,35	50,34	50,69	50,42	50,46	49,48	49,35	48,45
Berusaha dibantu buruh tetap (%)	3,68	2,96	1,85	2,91	3,07	3,13	3,22	3,22	3,48	3,49	3,69	3,67	3,68
Buruh/karyawan (%)	40,25	39,94	39,27	43,65	42,43	44,52	46,44	46,11	46,09	46,03	46,84	46,97	47,87
Pekerja formal (%)	43,93	42,90	41,12	46,56	45,50	47,65	49,66	49,33	49,57	49,52	50,53	50,65	51,55
TOTAL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Adapun, tipe tenaga kerja formal didominasi oleh buruh/karyawan sedangkan tenaga kerja informal didominasi oleh kelompok dengan status berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Tenaga kerja informal didominasi oleh pelaku usaha pariwisata. Meskipun sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, namun kualitas pekerjaan yang tercipta sebagian besar masih bersifat informal sehingga perlu mendapatkan perhatian pada aspek tingkat perlindungan maupun kepastian pendapatan pekerja.

5.2. KESEJAHTERAAN

5.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada Maret 2026 persentase penduduk miskin tercatat 3,44% atau 162,01 ribu orang. Angka tersebut meningkat 0,02 poin persentase dan 1,92 ribu orang dibandingkan September 2025 yaitu 3,42% atau 160,09 ribu orang. Faktor yang cukup penting berpengaruh karena perbedaan pola musiman aktivitas ekonomi dimana September merupakan periode aktivitas pariwisata Bali relatif lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun hingga Maret cenderung lebih lemah. Di samping itu, produksi sektor pertanian seperti padi pada periode September lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I, sehingga pendapatan sebagian rumah tangga lebih terbatas di awal tahun, sejalan dengan ekonomi Bali pada triwulan I – 2026 mengalami kontraksi 4,57% dibandingkan dengan triwulan IV-2025.

Berdasarkan daerah tinggal, kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 sebesar 4,54%, lebih tinggi dari perkotaan sebesar 3,06%. Pada periode pelaporan Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan

tetap tercatat sebesar 3,06%, dibandingkan periode September 2025 yang juga tercatat sebesar 3,06%. Lebih lanjut, pada wilayah perdesaan jumlah penduduk miskin untuk periode Maret 2026 tercatat sebesar 4,54% dari total penduduk, atau lebih tinggi dibandingkan periode September 2025 yang tercatat sebesar 4,44%. Meningkatnya tingkat kemiskinan perdesaan di Bali memperlihatkan bahwa risiko kemiskinan relatif lebih besar di wilayah desa walaupun jumlah absolut penduduk miskin lebih banyak berada di perkotaan karena basis penduduknya lebih besar.

Selain itu, Garis Kemiskinan meningkat dari Rp642.986 menjadi Rp675.354 per kapita per bulan, sehingga sebagian penduduk yang berada dekat dengan batas kemiskinan menjadi lebih rentan jatuh ke bawah Garis Kemiskinan. Kenaikan kemiskinan pada Maret 2026 lebih mencerminkan fluktuasi jangka pendek dan kerentanan kelompok *near-poor* dibandingkan pemburukan struktural kesejahteraan Bali. Meskipun meningkat dibandingkan September 2025, tingkat kemiskinan Bali secara tahunan masih menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan kemiskinan pada Maret 2026 lebih bersifat musiman dibandingkan mencerminkan pelemahan fundamental kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin tercatat menurun dari 3,72% pada Maret 2025 menjadi 3,44% pada Maret 2026 atau turun 0,28 poin persentase. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2025, kemiskinan Bali justru turun dari 3,72% menjadi 3,44%, atau turun 0,28 poin persentase. Secara tahunan kesejahteraan masih membaik, namun secara semesteran terdapat tekanan musiman terhadap kelompok miskin dan rentan miskin.

5.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)² Provinsi Bali tercatat sebesar 0,56 pada Maret 2026, lebih rendah dari September 2025 sebesar 0,58.

Indeks P1 yang menurun menunjukkan bahwa semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan (pengeluaran Rp675.354 per kapita per bulan). Penurunan tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan semakin menyempit. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan tipis persentase penduduk miskin dari 3,42% menjadi 3,44%, sehingga mengindikasikan bahwa bertambahnya penduduk miskin tidak disertai dengan memburuknya kedalaman kemiskinan secara agregat.

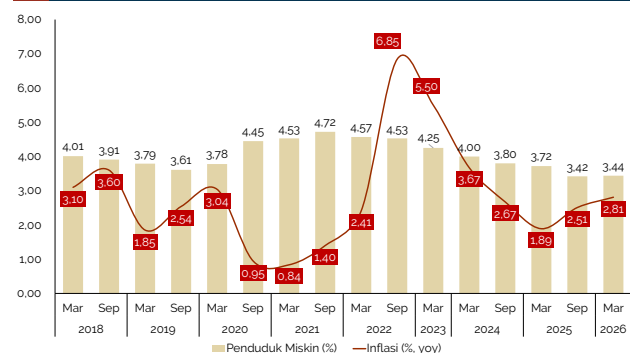
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*)³ relatif stagnan dan cenderung meningkat tipis pada Maret 2026 yaitu 0,14 dibandingkan dengan September 2025 yaitu 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pengeluaran di antara penduduk miskin masih perlu mendapat perhatian. Meskipun secara rata-rata penduduk miskin semakin dekat dengan Garis Kemiskinan, disparitas pengeluaran di antara sesama penduduk miskin belum mengecil secara berarti. Ada kemungkinan sebagian penduduk miskin berada sangat dekat dengan Garis Kemiskinan dan relatif mudah diangkat keluar dari kemiskinan, sementara terdapat kelompok lain yang posisi ekonominya jauh lebih rendah dan membutuhkan intervensi lebih besar.

Di tengah perekonomian Bali triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,58% secara tahunan (y-on-y), namun mengalami kontraksi sebesar 4,57% dibandingkan

Triwulan IV-2025 (q-to-q). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara fundamental perekonomian Bali masih tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi terdapat pelemahan aktivitas ekonomi secara musiman pada awal tahun 2026. Pelemahan jangka pendek tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan rumah tangga, khususnya pekerja pada sektor yang sensitif terhadap pola musiman seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, pertanian, dan kegiatan informal.

Pada saat yang sama, tekanan harga turut memengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi Bali tercatat sebesar 2,81% secara tahunan pada Maret 2026, setelah pada Februari 2026 mencapai 3,89%. Kenaikan biaya kebutuhan dasar tersebut meningkatkan ambang pengeluaran minimum yang harus dipenuhi rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin, sehingga kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas Garis Kemiskinan menjadi semakin rentan. Kombinasi pertumbuhan perekonomian dan stabilitas harga menjadi prasyarat penting bagi penurunan kemiskinan Bali yang lebih berkelanjutan, sekaligus untuk menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan pada kelompok masyarakat yang masih tertinggal.

Grafik 5.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

2. Indeks P1 merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 5.6. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2021 – 2026

Keterangan	2021		2022		2023	2024		2025		2026
	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret	September	Maret	September	Maret
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	201,97	211,46	205,68	205,36	193,78	184,43	176,21	173,24	160,09	162,01
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,53	4,72	4,57	4,53	4,25	4,00	3,80	3,72	3,42	3,44
- Kota	4,12	4,33	4,23	4,12	3,77	3,55	3,32	3,27	3,06	3,06
- Desa	5,52	5,68	5,39	5,58	5,50	5,20	5,11	4,97	4,44	4,54
Garis Kemiskinan (Rp)	452.221	461.532	485.022	515.037	529.643	568.510	580.306	607.847	642.986	675.354
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,76	0,63	0,56	0,553	0,499	0,44	0,560	0,58	0,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,15	0,17	0,13	0,10	0,102	0,090	0,07	0,117	0,13	0,14

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Periode	Kota	Desa	Kota & Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2021	0,653	0,753	0,682
September 2021	0,710	0,878	0,759
Maret 2022	0,618	0,641	0,625
September 2022	0,446	0,858	0,563
Maret 2023	0,480	0,740	0,553
Maret 2024	0,428	0,689	0,499
September 2024	0,399	0,547	0,439
Maret 2025	0,564	0,551	0,560
September 2025	0,473	0,881	0,579
Maret 2026	0,490	0,765	0,560
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2021	0,154	0,156	0,154
September 2021	0,148	0,226	0,171
Maret 2022	0,137	0,109	0,129
September 2022	0,075	0,170	0,102
Maret 2023	0,086	0,142	0,102
Maret 2024	0,074	0,135	0,090
September 2024	0,057	0,085	0,065
Maret 2025	0,128	0,086	0,117
September 2025	0,105	0,218	0,134
Maret 2026	0,117	0,185	0,135

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada Maret 2026, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di perdesaan tercatat sebesar 0,765, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 0,490. Demikian pula, indeks keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan mencapai 0,185, sedangkan di perkotaan sebesar 0,117. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di wilayah perdesaan tidak hanya mengalami tingkat kemiskinan yang lebih dalam, tetapi juga memiliki rata-rata pengeluaran yang semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Bali perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada rumah tangga perdesaan melalui peningkatan produktivitas, penguatan sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta perlindungan daya beli masyarakat.

5.2.3. Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Tingkat ketimpangan pendapatan dilihat dari pengeluaran penduduk di Bali pada Maret 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode September 2025. Hal ini tercermin dari Gini Ratio yang meningkat dari 0,333 menjadi 0,342. Meskipun demikian, Gini Ratio Bali masih berada di bawah nasional yang tercatat sebesar 0,368.

Meskipun ketimpangan Bali meningkat dibandingkan periode sebelumnya, tingkat ketimpangan masih berada pada kategori sedang dan lebih rendah dibandingkan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pemulihan ekonomi Bali relatif lebih tersebar di berbagai kelompok masyarakat dibandingkan rata-rata nasional. Gini Ratio Bali sebesar 0,342, lebih rendah dibandingkan Nusa Tenggara Barat sebesar 0,358, namun lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,319. Ketiga provinsi tersebut masih mencatat tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,368. Indeks rasio gini yang rendah menunjukkan kesenjangan ekonomi antarpengeluaran yang rendah di Provinsi Bali. Meskipun NTT memiliki distribusi pengeluaran yang paling merata di kawasan Balinusra, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena persentase penduduk miskinnya masih jauh di atas Bali.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, ketimpangan pengeluaran di Provinsi Bali pada Maret 2026 lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, dengan Gini Ratio masing-masing sebesar 0,340 dan 0,281. Sementara di daerah perdesaan, indeks rasio gini pada September 2025 tercatat sebesar 0,269, menurun dibandingkan periode Maret 2025 yang tercatat sebesar

0,277. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk Provinsi Bali pada Maret 2026 berada pada kategori ketimpangan rendah. Kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah menikmati 19,58% dari total pengeluaran penduduk. Jika dirinci menurut wilayah, perkotaan tercatat sebesar 19,67% dan perdesaan tercatat sebesar 22,54%, sehingga kedua wilayah termasuk kategori ketimpangan rendah.

5.2.4. Perkembangan Nilai Tukar Petani

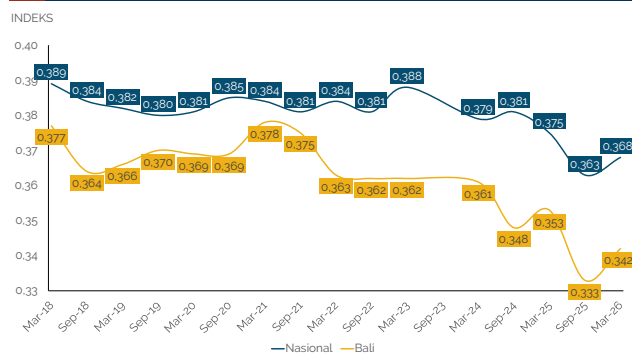
Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya. Sepanjang triwulan II 2026, rata-rata indeks NTP Provinsi Bali tercatat sebesar 105,47, meningkat dibandingkan rata-rata NTP periode triwulan I 2026 sebesar 103,59. Indeks NTP Bali pada triwulan II 2026 yang berada di atas 100, mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu, nilai tukar produk yang dihasilkan petani sudah mampu memenuhi kebutuhan

rumah tangga petani baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun sisi pembiayaan produksi pertanian.

Peningkatan NTP Bali pada triwulan II 2026 berkontribusi oleh meningkatnya NTP di tiga subsektor, yakni subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 11,51 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan NTP Bali tertahan oleh penurunan nilai tukar pada subsektor perikanan dan perkebunan rakyat.

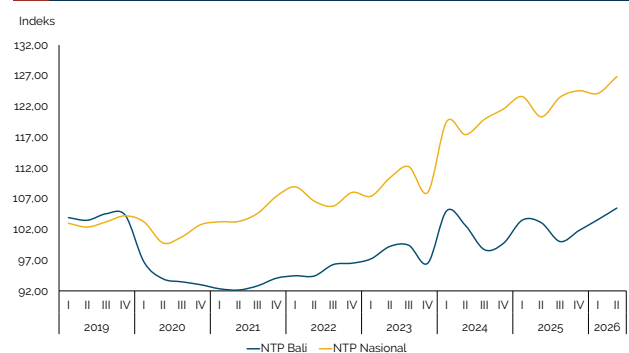
Pada triwulan II 2026, indeks yang diterima petani (IT) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (IB) atau berada dalam kondisi surplus. Pada triwulan II 2026, IT sebesar 136,38, meningkat 5,10 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, IB tercatat sebesar 129,31 meningkat 2,71 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan petani tercatat lebih tinggi dibandingkan

Grafik 5.3. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional



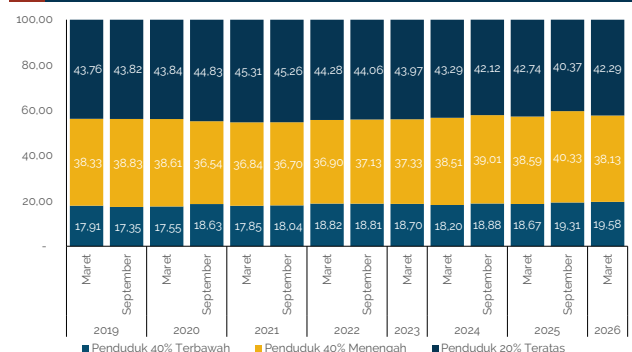
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.5. Perkembangan NTP Bali dan Nasional



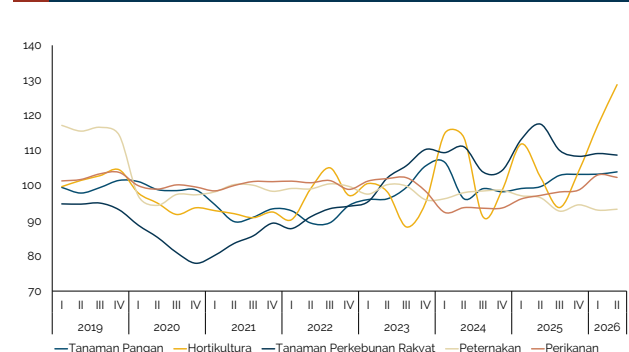
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.4. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

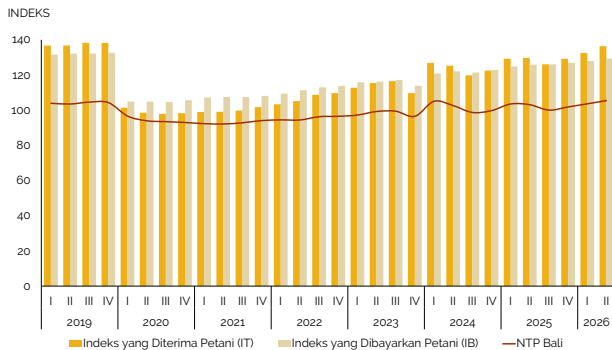
Grafik 5.6. Perkembangan NTP Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

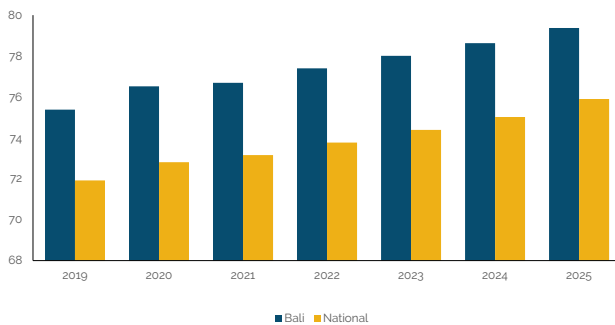
pengeluaran petani. Peningkatan NTP mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan petani. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat pendapatan rumah tangga pertanian dan menjadi faktor penahan peningkatan kemiskinan di wilayah perdesaan Bali.

Grafik 5.7. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.8. Perbandingan IPM Bali dengan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

5.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025

semakin meningkat dan masih di atas nasional. IPM Bali tahun 2025 tercatat sebesar 79,37, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2024 sebesar 78,63. Peningkatan IPM Bali pada tahun 2025 didukung oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM, yakni Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,48 persen (yoy), 0,07 persen (yoy), dan 2,20 persen (yoy). Sejalan dengan itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat meningkat 3,10 persen (yoy). Peningkatan IPM mengindikasikan perekonomian Bali semakin inklusif dan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali pada periode pelaporan

tetap terjaga baik. Pasar kerja menunjukkan perbaikan yang ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran serta meningkatnya proporsi tenaga kerja formal. Di sisi lain, meskipun kemiskinan mengalami kenaikan secara semesteran akibat faktor musiman, tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan ketimpangan secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali masih mampu ditransmisikan ke perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun penguatan kesejahteraan kelompok rentan dan masyarakat perdesaan tetap perlu menjadi perhatian.



BOKS 4



HIGH LEVEL MEETING TPID PROVINSI BALI:
PENGUATAN SINERGI PENGENDALIAN INFLASI
DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA DAN
PASOKAN DI BALI MENJELANG GALUNGAN-
KUNINGAN TAHUN 2026



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tuntular
No. 4, Denpasar



Inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Namun demikian, memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan, tekanan inflasi perlu terus diantisipasi seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan tingginya mobilitas wisatawan pada periode libur sekolah.

Dalam rangka mengantisipasi potensi tekanan harga tersebut, TPID Provinsi Bali memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui *High Level Meeting* (HLM) pada 10 Juni 2026 atau sebelum berlangsungnya puncak momentum HBKN Galungan dan Kuningan. Pelaksanaan koordinasi pada periode tersebut memberikan ruang bagi TPID untuk memperkuat langkah antisipatif, khususnya dalam memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Sejalan dengan berbagai upaya tersebut, inflasi Bali pada Juni 2026 tetap terkendali sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional

sebesar 3,34% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (Grafik 1). Dengan demikian, sepanjang Mei–Juni 2026, inflasi Bali konsisten berada di bawah inflasi nasional dan tetap terjaga dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, meskipun berlangsung pada periode peningkatan permintaan akibat HBKN dan menjelang *high season* pariwisata.

Tekanan inflasi Bali terutama bersumber dari tiga faktor. Pertama, peningkatan permintaan barang dan jasa pada periode HBKN yang berlangsung bersamaan dengan *high season* pariwisata berpotensi meningkatkan tekanan pada harga pangan. Kedua, ketidakpastian cuaca pada masa peralihan musim serta potensi El Nino moderat dapat memengaruhi produksi pertanian dan kontinuitas pasokan pangan lokal. Ketiga, berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi meningkatkan harga energi, yang selanjutnya dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi. Selain itu, ekspektasi masyarakat menjelang HBKN juga perlu terus dikelola untuk mencegah pembelian berlebih yang dapat meningkatkan tekanan harga. Berbagai faktor risiko tersebut beserta potensi dampak dan

BOKS 5

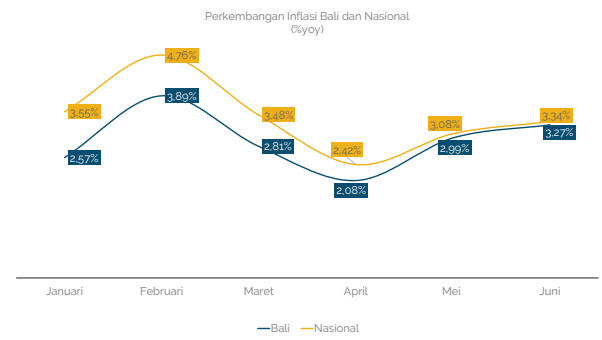
respons kebijakan TPID Provinsi Bali dirangkum pada Tabel 1.

Risiko tersebut menjadi semakin penting mengingat sebagian kebutuhan pangan Bali masih dipenuhi dari luar daerah. Dengan demikian, selain menjaga kapasitas produksi lokal, kelancaran distribusi antarwilayah menjadi faktor strategis dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di Bali. Kondisi stok pangan Bali hingga Juni 2026 secara umum masih terjaga, sementara pemantauan distribusi terus dilakukan pada tingkat pasar maupun distributor.

Sebagai respons terhadap perkembangan inflasi, melalui penguatan koordinasi dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali pada 10 Juni 2026, TPID Provinsi Bali terus memperkuat implementasi strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pada aspek keterjangkauan harga, operasi pasar/pasar murah dioptimalkan dengan mengedepankan prinsip 3T: tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Sepanjang Semester I 2026, pasar murah telah dilaksanakan sebanyak 350 kali di seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Dari sisi ketersediaan dan distribusi, TPID memperkuat pengawasan stok, inspeksi pasar, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta fasilitas pengairan untuk menjaga produksi pangan lokal. Hingga Mei 2026, salah satu

Grafik B5.1. Perkembangan Inflasi Bali dan Nasional, Mei–Juni 2026 (% yoy)



implementasi KAD berupa perdagangan B2B telur ayam dari Kabupaten Bangli ke wilayah NTT telah mencapai 3,412 juta butir, menunjukkan pentingnya konektivitas pasokan antarwilayah dalam mendukung ketahanan pangan regional.

Ke depan, pengendalian inflasi Bali perlu diarahkan tidak hanya melalui intervensi jangka pendek pada harga, tetapi juga melalui penguatan produksi pangan lokal, peningkatan efisiensi rantai pasok, optimalisasi peran Perumda/BUMD pangan dan KAD, serta penguatan sistem informasi pangan dan komunikasi publik. Sinergi tersebut menjadi penting untuk memperkuat ketahanan Bali terhadap risiko cuaca, peningkatan permintaan pada periode HBKN, maupun gangguan pasokan eksternal. Dokumentasi pelaksanaan HLM TPID Provinsi Bali pada 10 Juni 2026 sebagai salah satu bentuk penguatan sinergi pengendalian inflasi disajikan pada Gambar 1.

Tabel B5.1. Tantangan Pengendalian Inflasi dan Respons TPID Bali

Tantangan	Potensi Dampak	Respons Kebijakan
Peningkatan permintaan HBKN dan high season	Tekanan harga pangan	
Pasar murah/operasi pasar dengan prinsip 3T, pemantauan harga dan stok		
Ketidakpastian cuaca dan potensi El Nino	Gangguan produksi pangan lokal	
Penguatan fasilitas pengairan, produktivitas, dan monitoring produksi		
Ketergantungan pasokan luar daerah	Kerentanan pasokan dan biaya distribusi	Optimalisasi KAD, Perumda/BUMD pangan, dan pemantauan distribusi
Ketidakpastian harga energi global	Peningkatan biaya produksi dan logistik	Monitoring distribusi pangan dan energi serta koordinasi lintas instansi
Ekspektasi masyarakat menjelang HBKN	Potensi pembelian berlebih dan tekanan harga	Penguatan komunikasi publik dan edukasi belanja bijak

Gambar B5.1. Dokumentasi Kegiatan





BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4-5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional 4,9-5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.



Pertumbuhan Global Yoy

3,0%

2026



Pertumbuhan Nasional Yoy

4,9%-5,7%

2026



Pertumbuhan Bali Yoy

5,4%-5,9%

2026



Inflasi Bali Yoy

2,5%±1%

2026

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan tetap tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global. Prakiraan pertumbuhan ekonomi Bali tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional yang sebesar 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan Bali pada 2026 ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diperkirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin luasnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diperkirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multiyears, khususnya terkait infrastruktur, dan dimulainya konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambangan. Kinerja LU terkait pariwisata dan konstruksi diperkirakan menjadi motor utama pertumbuhan kendati sedikit termoderasi akibat gejolak geopolitik global.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, di tengah Konflik Timur Tengah yang menyebabkan gejolak harga minyak dunia, termasuk avtur global. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan kinerja sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya tahan, serta inflasi yang tetap terkendali, ekonomi Bali mampu tumbuh tinggi dan berdaya tahan di tengah gejolak global.

6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL

6.1.1. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2026

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan melambat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan proyeksi *World Economic Outlook* (WEO) yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada Juli 2026, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 3,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan proyeksi sebelumnya pada bulan April 2026 sebesar 3,1% (yoy), dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 sebesar 3,5% (yoy) sebagaimana tertera pada Tabel 6.1. Melambatnya ekonomi global disebabkan oleh dampak perang di Timur Tengah. Kendati demikian, dampak perang di Timur Tengah sebagian terimbangi oleh percepatan permintaan dalam siklus teknologi global, berkat kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan penerapannya. Harga energi diproyeksikan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum perang. Rata-rata indeks harga spot minyak bumi diproyeksikan sebesar \$89 per barel. Tingginya biaya energi dan pupuk, serta mahalannya biaya transportasi, diperkirakan akan meningkatkan harga pangan sebesar 8%.

Pertumbuhan di negara-negara maju diproyeksikan sebesar 1,7% (yoy) pada tahun 2026 dan 1,8% (yoy) pada tahun 2027. Kinerja ekonomi di negara maju tidak merata dan sangat bergantung dengan posisi apakah negara tersebut merupakan net importir atau net eksportir. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat diproyeksikan sebesar 2,3% (yoy) pada tahun 2026, tetap dibandingkan perkiraan pada bulan April. Aktivitas ekonomi di Amerika Serikat didukung oleh kebijakan fiskal, kondisi keuangan yang akomodatif, serta investasi bisnis terkait teknologi dan produktivitas yang tetap kuat. Lebih lanjut, dampak dari perang relatif terbatas mengingat status Amerika Serikat yang merupakan net eksportir energi. Di kawasan Eropa, pertumbuhan diproyeksikan sebesar 0,9% (yoy) pada tahun 2026. Prakiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026, mengalami revisi bawah terhadap proyeksi laporan WEO bulan April. Hal ini disebabkan tekanan akibat harga energi yang lebih tinggi dan tingkat keyakinan konsumen yang belum kuat.

Sementara itu, ekonomi negara berkembang, diproyeksikan tumbuh melambat menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2026 sebelum kembali meningkat ke angka 4,5% (yoy) pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu kantung wisman utama pada tahun 2026 diproyeksikan melambat menjadi 4,6% (yoy).

Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Country/Region (%YOY)	2025	Proyeksi Juli 2026		Delta Perubahan dari Proyeksi April 2026
		2026	2027	2026
World Output	3.5	3.0	3.7	-0.1
Advanced Economies	1.9	1.7	1.8	-0.1
United States	2.1	2.3	2.2	0.0
Euro Area	1.4	0.9	1.2	-0.2
Japan	1.1	0.6	0.7	-0.1
Australia**	2.0	1.9	1.7	-0.1
Korea**	1.1	2.6	2.5	0.7
United Kingdom**	1.4	1.0	1.3	0.2
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.8	4.5	-0.1
Emerging and Developing Asia	5.6	5.0	4.8	0.1
China**	5.0	4.6	4.1	0.2
India**	7.7	6.4	6.7	-0.1
Emerging and Developing Europe	2.0	1.9	2.1	-0.1
Russia	1.0	1.1	1.1	0.0
ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand)	4.5	4.1	4.3	0.0
World Trade Volume (goods and services)	5.0	3.5	4.3	0.7
Commodity Prices (US dollars)				
Oil	-14.4	31.8	-11.8	10.4
Nonfuel	9.6	18.6	1.3	-3.1

Keterangan: ** 5 Besar Kantong Wisman Utama Bali

Sumber: IMF - World Economic Outlook Juli 2026

Hal ini disebabkan harga minyak global yang lebih tinggi, ditambah dengan ketidakpastian yang berkepanjangan dan hambatan struktural, yang diperkirakan akan membebani aktivitas ekonomi. Di sisi lain, India yang juga merupakan kantung utama wisman, menjadi salah satu ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 6,4% (yoy), yang didukung oleh konsumsi swasta dan aktivitas sektor jasa. Sejalan dengan India, Australia dan Korea juga diperkirakan tumbuh tetap kuat pada 2026.

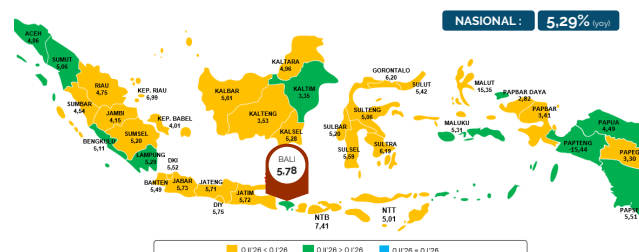
Meskipun ketidakpastian global meningkat, struktur ekonomi Bali yang didominasi aktivitas domestik dan pariwisata menyebabkan transmisi risiko eksternal relatif lebih terbatas dibandingkan daerah berbasis manufaktur ekspor.

6.1.2. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2026

Ekonomi nasional di tahun 2026 diperkirakan tumbuh tetap tinggi ditopang implementasi berbagai program stimulus pemerintah dan terjaganya keyakinan pelaku ekonomi. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Maluku Utara sebesar 15,35% (yoy), sejalan

dengan aktivitas hilirisasi nikel dan pengolahan mineral. Pertumbuhan ekonomi spasial Indonesia sebagaimana tertera pada Gambar 6.1. Capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 ditopang oleh stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan konsumsi Pemerintah dan investasi. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi bersumber dari peningkatan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus ditingkatkan memanfaatkan momentum kuatnya stimulus fiskal. Demikian pula ekspor juga perlu terus didorong sehingga makin memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh implementasi program stimulus yang didukung optimisme pelaku

Gambar 6.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan II 2026



Sumber: BPS, diolah

ekonomi. **Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7%.**

Dari sisi inflasi, perkembangan terkini menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga dalam sasaran. Inflasi IHK pada Juli 2026 tercatat 2,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,34% (yoy). Perkembangan ini didukung inflasi inti yang terjaga 2,76% (yoy) didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat 3,58% (yoy) seiring penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamina. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) melambat menjadi 2,52% (yoy) dipengaruhi oleh panen komoditas hortikultura aneka cabai dan bawang merah. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027, termasuk stabilisasi nilai tukar Rupiah guna memitigasi dampak rambatan global dari imported inflation. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan.

6.2. PRAKIRAAN DAN RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2026

6.2.1. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 diperkirakan tetap kuat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dan berada di atas proyeksi PDB Nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan tetap tinggi dan berada pada kisaran 5,4– 5,9% (yoy). Perekonomian Bali diproyeksikan di atas proyeksi PDB Nasional sebesar 4,9 – 5,7% (yoy). Kontributor utama pertumbuhan tetap berasal dari sektor terkait pariwisata, sementara akselerasi pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya didorong oleh menguatnya sektor Pertanian dan Konstruksi.

LU Pertanian diperkirakan meningkat didukung cuaca yang lebih kondusif dan berlanjutnya program swasembada pangan, serta meningkatnya kinerja

subsektor peternakan terutama dalam rangka pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mendukung ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian juga penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Bali di luar sektor pariwisata sehingga meningkatkan resiliensi ekonomi daerah. LU Konstruksi didorong oleh proyek strategis *multiyears*, seperti pembangunan berbagai klinik kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, pengembangan fasilitas di KEK Kura-Kura, dimulainya proyek PSN PPN Pengambengan, tingginya proyek konstruksi pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pemerintah. LU Perdagangan diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang didukung berbagai stimulus pemerintah, serta meluasnya program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kinerja LU terkait pariwisata yakni Akomodasi, Makan, dan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan tetap menjadi motor pertumbuhan didukung oleh kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara meskipun pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena tertahan oleh tingginya harga tiket dan perubahan minat berwisata akibat konflik Timur Tengah.

SISI PENGELUARAN

Kinerja konsumsi RT pada 2026 tetap kuat meskipun sedikit termoderasi dibandingkan tahun sebelumnya. Termoderasinya kinerja konsumsi RT diakibatkan oleh perkembangan ekspektasi konsumsi Masyarakat yang dalam tren menurun sejalan dengan ketidakpastian geopolitik global meskipun indeks keyakinan konsumen masih tinggi (>100). Lebih lanjut, realisasi konsumsi juga tertahan oleh konsumsi pada HBKN Galungan-Kuningan yang lebih rendah dari tahun 2025 dikarenakan frekuensinya hanya satu kali pada tahun 2026.

Konsumsi Pemerintah pada 2026 diperkirakan meningkat. Peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan sekolah rakyat serta pengangkatan pegawai PPPK seiring penambahan Dapur SPPG. Pagu belanja APBN dan APBD 2026 diperkirakan meningkat, kenaikannya berpotensi tertahan oleh

penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Optimalisasi pengumpulan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) juga diperkirakan mendorong kinerja konsumsi pemerintah pada 2026.

Investasi pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

Prakiraan kinerja investasi yang menguat didukung oleh tetap kuatnya investasi terutama di sektor tersier terkait dengan pariwisata, berlanjutnya proyek-proyek strategis *multiyears*, serta penambahan proyek strategis baru pada 2026 di antaranya PSN PPN Pengembangan dan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik, serta proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan sejumlah ruas jalan, salah satunya Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Badung. Target realisasi PMDN dan PMA Bali pada 2026 mencapai 47,93 triliun rupiah, meningkat 11,93% dibanding realisasi 2025 sebesar 42,82 triliun rupiah. Perkembangan terkini menunjukkan realisasi PMA dan PMDN sampai dengan triwulan II 2026 sebesar 23,78 triliun rupiah (50% dari target 2026). Ke depan, rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali juga mendukung penguatan kinerja investasi Bali. Peningkatan investasi menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Bali tetap kuat meskipun ketidakpastian global meningkat. Gejala geopolitik global berpotensi menahan kinerja investasi lebih tinggi seiring appetite investor untuk berjaga-jaga. Penguatan investasi sektor primer dan sektor sekunder, termasuk hilirisasi perlu terus didorong guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, mengingat investasi saat ini didominasi sektor tersier.

Ekspor luar negeri Bali pada 2026 diproyeksikan tetap tumbuh meski melambat. Ekspor Bali yang didominasi ekspor jasa terkait aktivitas pariwisata turut terdampak akibat Perang di Timur Tengah yang berpotensi menahan kunjungan wisatawan, sehingga menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tidak setinggi periode sebelumnya di tengah kunjungan wisatawan yang masih terpusat di daerah Bali Selatan.

LAPANGAN USAHA

Sumber Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 diperkirakan masih didominasi oleh kinerja LU terkait

pariwisata, yaitu LU Akmamin, Perdagangan, dan Transportasi. LU Akmamin diproyeksikan tetap tumbuh kuat meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini utamanya akibat Konflik Timur Tengah yang mengakibatkan terganggunya konektivitas jalur penerbangan di Timur Tengah dan kenaikan harga avtur. Kendati demikian faktor pendorong terdapat pada kinerja wisatawan Australia yang diperkirakan menjadi penyangga utama pariwisata Bali karena memiliki konektivitas penerbangan langsung yang terus berkembang serta prospek ekonomi yang relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain.

Hingga semester I 2026, pertumbuhan wisman Australia tercatat 6,10% (yoy). Pemerintah Provinsi Bali juga terus meningkatkan program promosi pariwisata di antaranya melalui penyelenggaraan setidaknya 56 agenda dalam *Bali Calendar of Events* yang dirilis oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mencakup festival seni budaya, olahraga, kuliner, dan MICE. LU Perdagangan diperkirakan meningkat seiring perluasan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP. Hingga Juni 2026, realisasi dapur SPPG telah mencapai 78% yang mendukung perluasan program MBG ke seluruh wilayah Bali. Perbaikan kinerja pertanian khususnya padi juga turut mendukung kinerja Perdagangan. Meskipun melambat, kinerja LU Transportasi diperkirakan akan tetap solid, sejalan dengan penambahan rute direct flight sejumlah destinasi dalam dan luar negeri ke Bali.

LU Pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan pada LU Pertanian didukung membaiknya kondisi cuaca pada keseluruhan tahun 2026 dibanding tahun 2025 yang sempat terdampak La Nina lemah pada awal tahun. Peningkatan kinerja juga didorong oleh fokus program swasembada pangan melalui perluasan lahan tanam, kebijakan kemudahan perolehan pupuk subsidi, dan penggunaan bibit unggul, serta berbagai program yang mendukung peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan. Kinerja subsektor peternakan turut meningkat untuk mendukung perluasan program MBG. Selain itu, produktivitas pertanian berpotensi terdorong dengan beroperasinya *Rice Milling Unit* (RMU) di Provinsi Bali dan rencana Pembangunan RMU modern di Tabanan

yang diharapkan mampu menyerap dan mendorong produksi pertanian.

LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan turut menguat dibandingkan 2025. Pertumbuhan didorong oleh masih tingginya proyek konstruksi swasta seperti hotel, perkantoran, perumahan, dan villa. Berlanjutnya proyek strategis *multiyears*, termasuk pengembangan KEK Sanur, KEK Kura-Kura, serta penambahan proyek strategis seperti PSN PPN Pengembangan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi, turut menopang ekspansi sektor konstruksi. Kinerja infrastruktur Tahun 2026 juga didorong oleh masifnya proyek pemerintah khususnya di bidang infrastruktur, salah satunya Proyek Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Badung. Lebih lanjut rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali berpotensi mendorong kinerja LU Konstruksi.

6.2.2. RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI

Prospek ekonomi global pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan Tahun 2025, sejalan dengan berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan komoditas dunia lainnya kembali naik. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 belum kuat yang diperkirakan sekitar 3,0%. Sementara itu, IMF memprakirakan tekanan inflasi global tetap tinggi sekitar 4,7% pada 2026. Tingginya inflasi global mendorong kebijakan moneter menjadi lebih ketat, termasuk suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR) yang diperkirakan naik pada triwulan IV 2026. Imbal hasil (*yield*) US Treasury juga naik dan diperkirakan tetap tinggi seiring menguatnya ekspektasi kenaikan FFR dan defisit anggaran AS yang masih lebar. Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut sehingga menahan preferensi investor global terhadap investasi portofolio di negara *Emerging Markets* dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Perkembangan ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak hanya

berisiko mengganggu rantai pasok, tetapi juga dapat memengaruhi arus wisatawan ke Bali. Konflik Timur Tengah dapat mengganggu konektivitas, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu hub penerbangan bagi wisatawan Eropa menuju Bali. Kenaikan harga avtur yang menyebabkan kenaikan tiket pesawat, serta faktor security (keamanan) turut memengaruhi appetite wisatawan untuk berwisata ke Bali. Meningkatnya ketidakpastian, juga berpotensi menyebabkan pergeseran preferensi bagi wisman untuk berlibur ke destinasi yang lebih dekat, yang tidak perlu menggunakan transportasi udara. Selain itu, ekonomi Tiongkok yang belum kuat berpotensi menahan kinerja pariwisata Bali. Dari sisi domestik, relatif tingginya harga tiket penerbangan ke Bali berisiko menahan pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi RT berpotensi tertahan oleh meningkatnya sikap kehati-hatian (*precautionary motive*) masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Gangguan rantai pasok global berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor yang pada akhirnya dapat menekan daya beli dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, prospek ekonomi Australia sebagai negara dengan kunjungan tertinggi ke Bali yang tetap stabil dan jarak yang tidak terlalu jauh ke Bali dibandingkan destinasi lain seperti Thailand, diperkirakan sebagai faktor pendorong kunjungan wisman ke Bali. *Outlook* ekonomi India juga diperkirakan tetap kuat turut mendorong kunjungan wisman ke Bali. Dalam menghadapi prospek ekonomi yang belum kuat, diperlukan penguatan kolaborasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tersebut, **Bank Indonesia merekomendasikan 4 strategi utama untuk menjaga daya tahan ekonomi Bali yakni 4 Strategic Pillars** di antaranya:

- Menjaga momentum sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali pada periode peak season Triwulan III 2026 melalui penguatan implementasi konsep pariwisata berkualitas.
- Mendorong percepatan investasi, termasuk penguatan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan guna mendukung pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

- c. Memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai sumber diversifikasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. Mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah yang didukung penguatan literasi serta keamanan transaksi digital.

6.2.3. PRAKIRAAN INFLASI

Inflasi Provinsi Bali pada 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan stabil dibandingkan Tahun 2025. Dari sisi inflasi inti, tekanan inflasi diperkirakan menurun seiring berkurangnya frekuensi HBKN Galungan-Kuningan yang mana tahun 2026 hanya dilakukan sekali sehingga permintaan yang lebih moderat terhadap komoditas canangsari, kue basah, dan makanan jadi lainnya. Selain itu tekanan harga emas global juga diperkirakan lebih landai dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas, harga energi tercatat sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelum perang, dengan rata-rata indeks harga *spot* minyak bumi sebesar US\$78 per barel untuk tahun 2026. Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan lebih moderat seiring normalisasi cuaca pasca La Nina lemah pada tahun sebelumnya dan gagal panen sejumlah komoditas hortikultura pada akhir tahun 2025. Meski demikian, peningkatan permintaan pangan dan pantauan BMKG yang menunjukkan kemungkinan El Nino moderat hingga awal tahun 2027, tetap perlu diantisipasi. Dari sisi inflasi *Administered Price*, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan harga minyak global menyebabkan kenaikan sejumlah BBM Non Subsidi dan peningkatan fuel surcharge menjadi sumber utama tekanan inflasi *Administered Price*. Selain itu, kenaikan sejumlah tarif daerah seperti parkir di Kabupaten Badung pada Januari 2026 dan kenaikan tarif PDAM di Buleleng pada Februari 2026 diperkirakan menambah tekanan inflasi.

Dinamika global juga turut memengaruhi prospek inflasi Provinsi Bali. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF Juli 2026, inflasi global diproyeksikan sebesar

4,7% (yoy) pada tahun 2026, lebih tinggi dari inflasi 2025 sebesar 4,1% (yoy) dan angka ini direvisi atas sebesar 0,3 poin presentase dari *update* WEO pada April 2026. Dinamika inflasi diperkirakan akan tetap tidak seragam antarnegara, mencerminkan perbedaan dalam transmisi nilai tukar, kondisi pasar tenaga kerja, dan lainnya. Inflasi inti diperkirakan akan kembali ke tingkat sasaran secara bertahap di beberapa negara ekonomi utama yakni pada pertengahan tahun 2027 di Inggris, pada akhir tahun 2027 di Jepang dan Amerika Serikat, serta baru pada tahun 2028 di kawasan euro. Inflasi di Tiongkok diperkirakan akan meningkat dari tingkat yang rendah. Divergensi arah dan kecepatan penurunan inflasi antarnegara tersebut berpotensi memperlebar perbedaan *stance* kebijakan moneter antara Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan negara lainnya, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang dan memicu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar tersebut dapat mendorong risiko *imported inflation* di dalam negeri, terutama pada komoditas pangan yang masih bergantung pada impor seperti bawang putih, produk berbahan tepung terigu, minyak goreng, dan kopi bubuk. Selain pangan, pergerakan harga emas sebagai aset *safe haven* global yang berpotensi kembali menguat di tengah ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan menjadi faktor eksternal lain yang turut memengaruhi dinamika inflasi di Provinsi Bali.

Dalam rangka menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama TPID kota/kabupaten di Bali terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif). Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala menjelang HBKN. Pelaksanaan operasi pasar murah merupakan tindak lanjut/hasil *advisory* pada *High Level Meeting* HLM TPID dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Balinusra; (2) Pengawasan lapangan penyaluran beras SPHP dan koordinasi dengan Bulog dalam mendorong pemanfaatan kios sebagai agen penyalur SPHP di Bali, serta pembukaan posko sembako; (3) Upaya memastikan ketersediaan pasokan melalui penandatanganan

Kerjasama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dimana salah satu fokus program prioritas adalah penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi; *linkage* antara Perumda dengan SPPG dan Perhotelan, penyaluran vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) untuk ternak; program asuransi usaha tani; bantuan alsintan; perbaikan irigasi; pengembangan bibit unggul serta pertanian organik; (4) Pengendalian ekspektasi inflasi di antaranya melalui Pelaksanaan HLM TPID-TP2DD Provinsi Bali yang berfokus pada perumusan strategi pengendalian inflasi 2026 dan HBKN Nyepi-Ramadan-Idulfitri pada tanggal 10 Februari 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, serta High Level Meeting TPID Provinsi Bali pada 10 Juni 2026 dalam rangka stabilisasi harga di tengah momen HBKN Galingan dan Kuningan, serta periode *high season* pariwisata. Pengendalian ekspektasi juga dilakukan melalui perluasan informasi harga pangan di pasar tradisional melalui *running text* dan media sosial, pengaktifan gerai inflasi yang dikelola Perumda agar menjadi referensi harga pasar, serta diseminasi rutin upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi; serta (5) Penguatan data neraca pangan daerah, serta mendorong integrasi data nasional dan daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia optimis inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 terjaga pada sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



DAFTAR ISTILAH

Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kliring

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kontraksi

Pertumbuhan yang negatif.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kualitas kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang

dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Melambat

Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

mtm (month to month)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan *cash inflows*, dan *net inflows* bila terjadi sebaliknya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Terdiri atas PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perusahaan

Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

qtq (quarter to quarter)

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Saldo Bersih

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.

Survei Konsumen (SK)

Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.

yoy (year on year)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Achris Sarwani

Penanggung Jawab

Ronald D. Parluhutan

Koordinator Penyusun

Tri Setyoningsih

Editor

Tri Setyoningsih

Tim Penulis

Imma Nurma Sari

Zetra lez Zaputra

Witra Ghaitsa Gafara

Suhardina Dwi Putrisari

Ayu Putu Arantza Bonita

Hafizhah Farah Azhar

Ikhlasul Amal Rianto

Erwin Yosua Kurniawan Sihombing

M Haekal Dzaky

Hanifah Vinanda Adistya

Desainer

A.A. Gede Agung Maha Jaya

Supporting

I Gusti Ayu Agung Ade Tresya Dewi

A.A. Ayu Mas Radha Rani Dewi

Luh Putu Citra Kusuma

Komang Riska Febyanti Mastama

Kontributor

Divisi Implementasi KEKDA

Divisi Implementasi SP, Pengawasan SP-PUR, & Pelindungan Konsumen

Produksi dan Distribusi

Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email : kpw-bali-kpkwp@bi.go.id

Website : www.bi.go.id



Download e-book



Google



LPP BI PROVINSI BALI



Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian google atau pindai QR code atau tautan berikut

bit.ly/LPP-BALI

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 90235

Telp : 62 - 361 - 248982, Fax : 61 - 361 - 34993 - 222988

Website : <https://www.bi.go.id>